

Editor:
Laifa Annisa Hendarmin
Alvin Noor Sahab



PESANTREN & PANDEMI

BERTAHAN DI TENGAH KERENTANAN

**Laifa Annisa Hendarmin
Ida Rosyidah
M. Iqbal Nurmansyah
Farha Kamalia
Alvin Noor Sahab**

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta
2022

Editor:
Laifa Annisa Hendarmin
Alvin Noor Sahab

PESANTREN & PANDEMI

BERTAHAN DI TENGAH KERENTANAN

**Laifa Annisa Hendarmin
Ida Rosyidah
M. Iqbal Nurmansyah
Farha Kamalia
Alvin Noor Sahab**

Hak Cipta © PPIM-UIN Jakarta
Diterbitkan pertama kali oleh Pusat Pengkajian Islam
dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. 2022.

All Rights Reserved.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Judul : Pesantren & Pandemi: Bertahan di tengah Kerentanan

Editor : Laifa Annisa Hendarmin
Alvin Noor Sahab

Penulis-Peneliti : Laifa Annisa Hendarmin (Koordinator)
Ida Rosyidah
M. Iqbal Nurmansyah
Farha Kamalia
Alvin Noor Sahab

Penata Letak : Oryza Rizqullah

17,6 x 25 cm, viii+110
Cetakan Pertama: 15 Maret 2022

Penerbit:
PPIM UIN Jakarta
Gedung PPIM, Kampus 2 UIN Jakarta
Jalan Kertamukti No. 5 Cireundeu, Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan,
Banten 15419

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI—III **KATA PENGANTAR—VII** **BAB I** **PENDAHULUAN—1**

- Latar Belakang—1
- Metode dan Fokus Penelitian—7
- Tempat Penelitian—9
- Sistematika Penulisan—10

BAB II **DAMPAK & KETAHANAN KESEHATAN DI PESANTREN SELAMA** **PANDEMI COVID-19—13**

- Respon Individu pada Masyarakat Pesantren dalam Pandemi COVID-19 —14
 - Pengetahuan terkait Pandemi COVID-19—14
 - Sikap terhadap Pandemi dan Penanggulangannya—15
 - Keyakinan terkait Kerentanan terhadap Penularan COVID-19—16
- Respon Institusional Pesantren dalam Pandemi COVID-19 —18
 - Kepemimpinan Kiai dalam Penanganan Pandemi di Pesantren—18
 - Kepemilikan dan Pengerahan Sumber Daya dalam Penanganan Pandemi—20
 - Manajemen Upaya Preventif dan Promosi Kesehatan dalam Penanganan COVID-19 di Pondok Pesantren—21
- Dampak Pandemi terhadap Pesantren—24
 - Perilaku Kesehatan dan Vaksinasi COVID-19 di Pondok Pesantren—24
 - Kesehatan Mental Masyarakat Pondok Pesantren selama Pandemi COVID-19—25

BAB III

DAMPAK & KETAHANAN PENDIDIKAN DI PESANTREN SELAMA PANDEMI COVID-19—27

Hambatan Pembelajaran Pondok Pesantren Selama Pandemi COVID-19—28

Faktor Ketahanan Pesantren—35

Strategi Optimalisasi Kurikulum Pesantren selama COVID-19—41

BAB IV

PERAN PEMIMPIN PEREMPUAN SELAMA PANDEMI COVID-19—43

Pengetahuan dan Sikap Pemimpin Perempuan dalam Kesehatan—43

Pendidikan dan Sikap Progresivitas Pemimpin Perempuan dalam Bidang Kesehatan—44

Agensi, *Power Sharing* Kiai dan Pemimpin Perempuan—47

Peran Pemimpin Perempuan dalam Pendidikan—51

Peran *Mothering*: Kerja Domestik yang Melekat pada Perempuan (dalam Kesehatan)—52

Menguatnya Peran dalam Promosi Kesehatan—53

Countering COVID-19 Sebagai Isu Konspirasi—55

Peran Pemimpin Perempuan dalam Membangun Jaringan dan Memperkuat Ketahanan Pesantren—58

Kiprah Pemimpin Perempuan untuk Ketahanan Pesantren—59

BAB V

AKTUALISASI PESANTREN DALAM MEMBANGUN TOLERANSI & MENANGKAL RADIKALISME SELAMA PANDEMI COVID-19—65

Peran Kiai dalam Pembangunan Karakter dan Religiusitas di Pesantren selama Pandemi COVID-19—65

Spirit Toleransi Santri dan Harmonisasi Sosial selama Pandemi COVID-19—70

Pengajaran di Pondok Pesantren dalam Mencegah Faham Radikalisme dan Masuknya Konspirasi—74

BAB VI

KERENTANAN PESANTREN TERHADAP RELASI SOSIAL & KEPERCAYAAN PEMERINTAH SELAMA PANDEMI COVID-19—79

Respon Pesantren terhadap Media dan Informasi COVID-19—79

Kepercayaan dan Reaksi Pesantren terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan COVID-19—81

Kohesi Sosial Masyarakat Pesantren di Masa Pandemi—86

BAB VII

PENUTUP—89

DAFTAR PUSTAKA—95

BIODATA PENULIS—105

KATA PENGANTAR

Tuntasnya penelitian ini merupakan kerja bersama Tim Peneliti dengan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, Tim menyampaikan apresiasi mendalam kepada pihak-pihak yang telah terlibat. Ungkapan terima kasih pertama perlu kami sampaikan kepada para peneliti senior di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan masukan dan arahan sejak awal penelitian dilakukan, yaitu Prof. Dr. Jamhari Makruf, Prof. Dr. Ismatu Ropi, Dr. Didin Syafruddin, Dr. Fuad Jabali, Dr. Arief Subhan, dan Dr. Idris Thaha. Ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada Ibu Iklilah Muzayyanah sebagai gender spesialis yang telah memberikan masukan berharga terkait dengan penajaman isu gender dalam penelitian ini.

Terimakasih juga kami sampaikan kepada para pejabat dari Kementerian Agama RI (Kemenag) dan akademisi yang telah bersedia terlibat memberi kritik dan masukan atas penelitian ini. Direktorat Pendidikan Diniyah dan pondok pesantren Dr. Waryono Abdul Ghafur, M. Ag., direktur riset lembaga survey Indonesia Dr. Hendro Prasetyo, MA, dan Ketua RMI PBNU KH. Abdul Ghofar Rozin, MA atas kritik dan masukan mereka menjadikan substansi penelitian ini bisa berkembang lebih baik.

Selanjutnya, ungkapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada asisten peneliti Fauziah Muslimah, Musa, Rahma, Ana dan para enumerator. Semua jajaran yang sudah terlibat yakni pimpinan pesantren, bu nyai, kepala sekolah, satgas, guru, ustaz/ustazah, dan santri di 15 pesantren di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Terakhir, terima kasih juga perlu kami sampaikan kepada tim PPIM UIN Jakarta atas dukungan dan fasilitasi tanpa lelah mereka bagi kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

Tim Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang bertujuan membentuk santri menjadi mandiri dan berakhlak. Cita-cita dan tujuan pendidikan Islam adalah penanaman adab yang dalam istilah pendidikan Islam dikenal dengan istilah *ta'dib*. Penanaman adab ini merupakan tujuan utama dari pendirian pesantren.

Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural disebut pusat budaya Islam, yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat, setidaknya oleh masyarakat Islam sendiri yang secara *de facto* tidak dapat diabaikan keberadaannya. Itulah sebabnya menurut Nur Cholish Madjid (1997) bahwa dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*). Menurut Kementerian Agama (PMA No 30, 2020), pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwalkannya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa elemen-elemen pesantren terdiri dari asrama atau pondok, kiai dan santri, serta masjid dan pengajaran agama Islam. Pesantren pada dasarnya didirikan oleh beragam faktor, antara lain adalah karena kebutuhan masyarakat atas pendidikan Islam seperti yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda yang mendirikan sekolah-sekolah umum dengan menafikan eksistensi agama di dalamnya. Di sisi lain, karena adanya seorang kiai atau guru

yang diakui intelektual keislamannya oleh masyarakat sehingga ilmunya dituntut oleh santri yang berdatangan dari berbagai tempat.

Perkembangan pesantren ke berbagai wilayah diinisiasi oleh santri yang sudah mendapat izin dari guru untuk mendirikan pesantren dan mengajarkan ilmu yang selama ini dituntut. Pola perkembangan pesantren dapat dibagi dalam beberapa bentuk berikut (Noer, 2016).

Pertama, pesantren yang hanya terdiri dari masjid dan rumah kiai. Pesantren ini masih sangat sederhana di mana kiai menggunakan masjid atau rumahnya untuk mengajar. Santri berasal dari daerah sekitar pesantren tersebut. Kedua, pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok atau asrama. Pola ini telah dilengkapi dengan tempat tinggal yang disediakan bagi para santri yang datang dari daerah lain.

Ketiga, pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok atau asrama dan madrasah. Berbeda dengan yang pertama dan kedua, pola ini telah memakai sistem klasikal. Santri mendapat pengajaran di madrasah, di samping belajar mengaji dan mengikuti pengajaran yang diberikan oleh kiai.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, pada dasarnya hanya mengajarkan agama dengan sumber kajian ialah kitab-kitab dalam bahasa Arab. Penjenjangan berdasarkan kitab yang dipelajari santri dalam belajar tidak menjadi suatu kemutlakan. Suatu pesantren dapat saja memberikan tambahan atau melakukan inovasi dengan mengajarkan kitab-kitab yang lebih populer dan efektif.

Dalam proses pembelajarannya pesantren terbagi menjadi tiga. Pertama, pesantren tradisional dicirikan tidak mempunyai sekolah madrasah dan cara pembelajarannya menggunakan metode *wetonan*, *sorogan*, dan hafalan. Metode *wetonan* merupakan metode belajar di mana santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika perlu. Metode *sorogan* ialah suatu metode di mana santri menghadap guru atau kiai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Sedangkan metode hafalan ialah metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Biasanya cara menghafal ini diajarkan dalam bentuk syair atau *nazham*.

Kedua, pesantren modern dicirikan memiliki madrasah atau sekolah umum. Dalam kegiatan pembelajarannya sistem pendidikan yang diselenggarakan secara terpadu, kurikulumnya terdiri dari kurikulum intra kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler. Kurikulum intra diselenggarakan di sekolah atau madrasah, sementara kurikulum kokurikuler diselenggarakan di luar pembelajaran madrasah atau sekolah dalam bentuk pembelajaran tambahan. Selebihnya kurikulum ekstra kurikuler diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan di asrama selama 24 jam penuh. Secara umum sistem yang diterapkan adalah pendidikan dan pengasuhan.

Ketiga, pondok pesantren kombinasi merupakan pondok pesantren yang berupaya menggabungkan sistem pendidikan pesantren tradisional dan pendidikan pesantren modern. Ciri utamanya tampak pada penyelenggaraan pendidikannya. Pesantren tipe ini pada umumnya memiliki sistem pendidikan klasikal bisa berbentuk madrasah sedangkan di sekolah menggunakan kurikulum yang terdiri dari kurikulum pesantren tradisional berupa pembelajaran kitab kuning dan kurikulum madrasah atau sekolah. Seperti halnya pondok pesantren modern, pesantren tipe kombinasi memiliki kurikulum intra, kokurikuler, dan ekstra kurikuler. Kurikulum intra diselenggarakan di sekolah atau madrasah. Kokurikuler diselenggarakan sebelum dan/atau sesudah pembelajaran sekolah atau madrasah. Kurikulum ekstranya diselenggarakan dalam sistem asrama, di mana santri harus mengikuti seluruh pesantren.

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya virus yang muncul di Wuhan, Tiongkok. Badan kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada 31 Desember 2019 mengumumkan wabah virus dengan sebutan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Publik Internasional dari Kepedulian Internasional (*PHEIC/Public Health Emergency of International Concern*).

Fakta menunjukkan bahwa jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia pada awal bulan Maret mencapai 69 orang dalam jangka waktu 11 hari dengan 4 orang di antaranya meninggal dunia. Dengan adanya kondisi tersebut, berbagai upaya serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap potensi penyebaran pandemi COVID-19.

Pada 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PP ini dibuat karena pemerintah menganggap COVID-19 ini sebagai wabah penyakit yang beresiko sangat tinggi dan menyebabkan kematian. Salah satu isi dari PP tersebut adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan PSBB di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. Salah satu turunan dari PP tersebut adalah terbitnya Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 6. Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah COVID-19 (Kemenag.go.id, 2020).

Konsekwensi PP tersebut, maka dilakukan pembatasan sosial dan penutupan beberapa sarana masyarakat seperti pasar, mal, bank, masjid dan bahkan sekolah harus diberlakukan himbauan dan aturan untuk membatasi aktivitas di dalamnya. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Siswa di berbagai belahan dunia dituntut melaksanakan pembelajaran *online*. Menurut M. Hasan Chabibe (Kapusdatin Kemendikbud, 2020) menyampaikan ada 127 juta sekolah di dunia yang terdampak COVID-19. Sedangkan di Indonesia, dilaporkan terdapat 407.000 sekolah melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan jumlah kurang lebih 68 juta siswa terpaksa belajar dari rumah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa suatu pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara yakni sebagai sarana untuk menciptakan manusia yang unggul. Pendidikan tidak bisa terlepas dari kondisi sosial kultural masyarakat. Pendidikan memiliki tugas yakni menciptakan *output* yang dapat bersaing dalam kancah zaman modern seperti saat ini. Tidak terkecuali pendidikan Islam yang keberadaannya juga memiliki peran yang penting dalam menciptakan *output* pendidikan. Idealnya lembaga pendidikan Islam memiliki pendidikan yang sangat unggul karena dalam proses pendidikannya ditekankan aspek pendidikan umum dan pendidikan agama.

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia lembaga pendidikan Islam tertua adalah pondok pesantren. Bahkan menurut para cendekiawan dan sejarawan, salah satu warisan terpenting dan monumental sepanjang sejarah adalah pondok pesantren. Jumlah pesantren di Indonesia

saat ini lebih dari 33.000 dengan jumlah santri mencapai 4,29 juta (Kemenag RI, 2020).

Dalam mengikuti instruksi dari pemerintah tentang diberlakukannya pembelajaran jarak jauh, pesantren memulangkan santri ke rumah masing-masing berharap santri, ustaz, dan pimpinan pesantren tidak terpapar COVID-19. Setelah hampir tiga sampai enam bulan lamanya dirumah, santri kembali memasuki pesantren dengan syarat melakukan tes swab terlebih dahulu, karantina, berdatangan secara bertahap, serta orang tua tidak boleh memasuki area pesantren hingga dibentuknya satgas COVID-19 sesuai arahan SKB 4 menteri. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan klaster baru di pesantren.

Kegiatan pembelajaran di pesantren pada awalnya berjalan dengan baik, dan tenang tanpa adanya santri yang terpapar COVID-19. Namun, tiba-tiba ada santri yang mengalami sakit dan setelah di swab positif COVID-19. Santri ini bisa saja tertular saat di rumah. Paska memasuki pesantren dinyatakan negatif, tetapi belum terdeteksi. Tidak hanya itu, kesiapan pesantren dalam kelembagaan maupun individu untuk menghadapi COVID-19 baik secara pengetahuan, sikap, persepsi, dan perilaku kesehatan masih rendah. Hal inilah yang menyebabkan salah satu munculnya klaster baru di pesantren.

Menurut KH. Amin Ma'ruf selaku Wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan data yang diperoleh melalui (Kemenag, 2021) ada sekitar 605 kiai dan nyai meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Wafatnya para kiai, ulama, dan nyai memiliki arti yang sangat penting penting dan krusial bagi kehidupan umat. Bahkan, Rasulullah saw telah menegaskan bahwa ulama adalah pewaris para Nabi saw sehingga wafatnya para kiai dan ulama adalah musibah.

Para kiai dan ulama sebagai pewaris nabi, telah mentransformasikan ilmu, peradaban, mendidik dan melakukan berbagai perbaikan di segala bidang. Hal demikian termasuk mengawal para santri demi berkembangnya *khazanah* keilmuan di lingkungan pesantren serta masyarakat di sekitarnya. Selain itu, para kiai dan ulama juga telah mengajarkan sikap patriotik, cinta tanah air, dan bela negara kepada setiap warga bangsa Indonesia.

Pada masa pandemi COVID-19, nyai juga memiliki peran strategis dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 di pondok pesantren.

Ada kalanya para santri, khususnya santri putri, merasa enggan untuk berinteraksi langsung dengan sang kiai. Dalam hal ini, nyai berperan penting menjadi perantara para utusan dari kiai kepada murid-muridnya (Arrahma, 2021).

Kiai dan nyai adalah sosok teladan bagi para santri. Menurut Alissa Wahid selaku ketua PBNU “Nasihat dari kiai dan nyai, pengurus, serta ilmu yang cukup merupakan faktor tertinggi yang dapat membuat santri taat, selain dari hukuman. Secara psikologis, anak-anak suka meniru.” Hal ini disampaikan dalam rangka penegakan protokol kesehatan di pesantren (Alissa, 2022). Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, nyai aktif terlibat dalam urusan rumah tangga, seperti memenuhi kebutuhan nutrisi yang mendukung kekebalan tubuh.

Berbicara mengenai ketahanan dan kerentanan pesantren terhadap radikalisme, *Center for the Study of Religion and Cultures* melaporkan bahwa keterikatan dan koneksi sosial politik pesantren dapat menjadi salah satu faktor pelindung dari radikalisme. Faktor keterikatan dan koneksi sosial dan politik dapat bervariasi tergantung pada tipologi pesantren. Misalnya, pesantren salafi dan ajaran “ketaatan kepada pemerintah yang sah” dapat menjadi faktor pelindung karena dalam ajarannya, menaati pemerintah yang sah adalah wajib. Sementara itu, pesantren modern yang berafiliasi dengan ormas Muhammadiyah mau-pun PERSIS memiliki ikatan dan koneksi dengan organisasi pusatnya atau pimpinan pusatnya. Pesantren yang berafiliasi dengan Muhammadiyah maupun PERSIS tidak dapat menentukan sikap politiknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan titah yang disuarakan oleh pimpinan pusat. Hal ini menjadi faktor protektif karena organisasi di tingkat pusat bermitra dengan pemerintah yang memiliki kendali atas pondok pesantren yang berada di bawah kewenangannya (PPIM, 2019).

Pondok pesantren bisa rentan terhadap radikalisme atau bahkan ekstremisme kekerasan karena perhatian pemerintah dalam memfasilitasi pondok pesantren kurang berkontribusi selama pandemi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kelompok teror berusaha mendelegitimasi pemerintah karena ketidakmampuannya menangani pandemi (Permono, 2021). Jika pondok pesantren tidak terus menerus dibantu oleh pemerintah, ketidakpercayaan kepada pemerintah dapat tumbuh lebih besar dan mengembangkan pemahaman radikal di dalam pondok pesantren.

Melihat fakta tersebut, penting untuk melihat dampak pandemi ini terhadap siswa sekolah lanjutan tingkat atas (santri) di pondok pesantren. Kelompok usia ini adalah usia sekolah tingkat SMA, SMK, dan Aliyah. Jumlah penduduk usia remaja rentang 15-19 tahun adalah 22.139.400. Jumlah ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan kelompok umur lainnya.

Untuk itu, menjadi sangat penting melihat dinamika ketahanan dan kerentanan pesantren selama pandemi. Di samping itu, peran pimpinan pesantren juga sangat mempengaruhi daya lenting pesantren saat menghadapi COVID-19.

METODE DAN FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan untuk dapat menjelaskan dinamika ketahanan di 15 pesantren di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Untuk itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak COVID-19 terhadap institusi pondok pesantren?
2. Bagaimana ketahanan dan kerentanan pondok pesantren selama pandemi COVID-19?
3. Bagaimana peran nyai dan pemimpin perempuan dalam merespon pandemi COVID-19 di lingkungan pesantren?

Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang (*cross sectional*) dengan pendekatan *convergent mixed method study* di mana pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara simultan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *case study* di mana penelitian ini menangkap berbagai fenomena dalam konteks tertentu di mana dalam penelitian ini, bagaimana fenomena pesantren dalam merespon pandemi disorot dari berbagai perspektif (Rashid, Rashid, Warraich, Sabir, & Waseem, 2019).

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-November 2021 sedangkan waktu pengumpulan data ialah bulan Juli-September 2021. Penelitian ini dilakukan di 15 pesantren di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pesantren yang dipilih mewakili 6 afiliasi organisasi masyarakat, yaitu: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Salafi Manhaj, alumni Gontor, Tarbiyah. Tiga provinsi tersebut dipilih mengingat ting-

ginya penyebaran kasus COVID-19 di wilayah tersebut. Pemilihan pesantren dilakukan secara *purposive sampling*, mengingat tidak adanya data lengkap mengenai pesantren dengan afliasinya di 3 wilayah tersebut. Kriteria inklusi yang ditetapkan di antaranya: pesantren memiliki santri yang bersekolah di tingkat SMA, SMK, atau Aliyah; pesantren dipimpin oleh seorang kiai, dibantu oleh nyai; pesantren bersedia menjadi bagian dari penelitian; pesantren melakukan pembelajaran baik secara *online* atau *offline* atau keduanya selama pandemi. Beberapa pondok pesantren menolak untuk terlibat dalam penelitian ini dikarenakan adanya kesibukan pondok pesantren sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pengumpulan data pada pondok pesantren tersebut.

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik (*ethical approval*) dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor surat: Un.01/F.10/KP.01.1/KE.SP/05.08.033/2021.

Pada metode kuantitatif, responden penelitian terdiri dari santri serta pengurus pondok pesantren. Sampel penelitian dipilih secara *proportionate simple random sampling*. Pertama-tama, peneliti melakukan proporsionalitas terhadap jumlah laki-laki dan perempuan pada guru dan santri. Setelah ditentukan proporsionalitas lalu ditentukan secara acak sederhana sampel dari guru dan santri sesuai proporsi yang telah ditentukan. Setelah itu, peneliti mengumpulkan responden penelitian yang terdiri dari santri sebanyak 50 responden, dan guru sebanyak 10 responden per pondok pesantren. Jumlah total responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 820 responden. Karena dalam penelitian ini dilakukan pengecekan perhatian selama pengisian, maka responden yang tidak fokus dalam pengisian kuesioner dikeluarkan dalam penelitian sehingga jumlah responden dalam penelitian ini adalah 658 responden.

Pada metode kualitatif, informan dipilih secara *expert sampling*, salah satu jenis *purposive sampling*. Informan dipilih dengan mempertimbangkan bahwa informan yang dipilih ialah pihak yang memiliki kapabilitas serta mengetahui berbagai topik yang berkaitan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan keahlian mereka (Frey, 2018). Informan penelitian per pondok pesantren sendiri terdiri dari pimpinan pondok pesantren, nyai dan pe-

mimpin perempuan di pesantren, Satgas COVID-19, kepala sekolah se-tingkat SMA/SMK/Aliyah, 3 orang guru serta 3 orang santri yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah total informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 132, daftar detil informan penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Informan	Laki-Laki	Perempuan
Pimpinan Pondok Pesantren	12	-
Nyai dan Pemimpin Perempuan	-	10
Kepala Sekolah	13	2
Satgas COVID-19	11	2
Guru	23	13
Santri	23	23
Total	82	50
	132	

TEMPAT PENELITIAN

Nama Pesantren	Lokasi	Status	Afiliasi	Jenis Sekolah	Jumlah Santri
PP N	Jawa Barat	Kombinasi	Nahdlatul Ulama	SMK, MAN, MANU	8.000
PP LA	Jawa Barat	Kombinasi	Nahdlatul Ulama	SMK, MA	2000
PP TU	Banten	Kombinasi	Nahdlatul Ulama	MA, SMA, SMK	3000
PP SI	DKI Jakarta	Kombinasi	Nahdlatul Ulama	MA	6.000
PP RA	Jawa Barat	Modern	Muhammadiyah	MA	1.100
PP MG	Jawa Barat	Modern	Muhammadiyah	MA	54
PP BS	Jawa Barat	Modern	Muhammadiyah	SMA	1.000
PP RG	Jawa Barat	Modern	PERSIS	SMA	4.000
PP E	DKI Jakarta	Modern	PERSIS	SMA, SMK, MA	851
PP BA	Jawa Barat	Modern	PERSIS	SMAIT	800
PP A	Jawa Barat	Modern	Salafi	SMA	1.800
PP RH	DKI Jakarta	Modern	Alumni Gontor	SMA	9300
PP RL	Banten	Modern	Alumni Gontor	MA	5000
PP RI	Banten	Modern	Tarbiyah	MA	132
PP RR	Jawa Barat	Modern	Tarbiyah	MA	1600

SISTEMATIKA PENULISAN

Buku ini terdiri atas tujuh bab. Bab pertama, pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang bagaimana pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia telah melahirkan karakter seseorang menjadi berilmu dan beradab. Namun, saat terjadinya pandemi COVID-19, pesantren mengalami disrupsi baik dalam sistem pembelajaran, peran pimpinan pesantren, masalah kesehatan, adanya isu konspirasi, hingga kepercayaan pada pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Selain latar belakang, bagian ini juga mendeskripsikan batasan dan rumusan masalah yang terfokus.

Bab kedua, menjelaskan pengetahuan selama pandemi, sikap dalam penanggulangan, dan keyakinan untuk dapat bertahan selama pandemi. Tidak hanya itu, bab ini juga memberikan gambaran peran kiai dalam penanganan pandemi di Pesantren, serta manajemen kesehatan dalam mencegah menyebarnya virus COVID-19. Selanjutnya, bab ini menceritakan perilaku kesehatan dan vaksinasi di pesantren.

Bab ketiga, menyajikan hambatan-hambatan yang dialami oleh santri selama pandemi. Lebih jauh, bab ini juga menjelaskan beberapa faktor santri saat pembelajaran jarak jauh melalui media *online*. Terakhir, bab ini memberikan strategi dan inovasi pembelajaran selama pandemi.

Bab keempat, menjelaskan peran pemimpin perempuan di pesantren. Selama ini pimpinan pesantren selalu identik dengan kiai (laki-laki), tetapi ternyata dalam pengambilan keputusan selalu ada diskusi terlebih dahulu kepada nyai (istrinya). Fenomena tersebut jarang sekali terekspos di khalayak umum. Selama pandemi nyai selalu aktif dalam mengawasi santri-santrinya dengan memberikan pengetahuan kesehatan dan bahaya virus COVID-19, adanya sikap dan peran *mothering*. Bab ini juga mengeksplorasi peran pemimpin perempuan dalam mengkonter isu-isu konspirasi yang tersebar baik di media sosial maupun dalam lingkungan pesantren.

Bab kelima, menerangkan pentingnya peran kiai dalam pesantren agar tumbuh jiwa patriot tenggang rasa sesama umat manusia. Karakter pesantren menjadi identitas tersendiri di masyarakat dengan perilaku akhlak karimah. Hal inilah yang mendorong akar-akar radikalisme sulit

berkembang di pesantren. Terlepas dari peran kiai tentu pengajaran di pesantren menjadi ujung tombak dalam kesuksesan seorang santri.

Bab keenam, menggambarkan kerentanan pesantren dalam kepercayaan terhadap pemerintah dan relasi sosial selama pandemi COVID-19. Bab ini memaparkan munculnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah dimulai dari sumber informasi media. Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan turut serta menjadi alasan mengapa banyak pesantren masih kebingungan.

Bab ketujuh, penutup, menyajikan dinamika kesimpulan dari berbagai bidang di antaranya; bidang kesehatan, bidang pendidikan, peran pemimpin perempuan, peran kiai dalam mencegah radikalisme, serta kepercayaan pesantren terhadap kebijakan pemerintah.

BAB II

DAMPAK & KETAHANAN KESEHATAN DI PESANTREN SELAMA PANDEMI COVID-19

M. Iqbal Nurmansyah

Bagian ini membahas beberapa isu penting terkait ketahanan kesehatan pesantren selama pandemi COVID-19 serta faktor-faktor berpengaruh terhadap ketahanan tersebut. Sebagaimana definisi *American Psychological Association* mendefinisikan resiliensi atau ketahanan sebagai sebuah proses untuk dapat beradaptasi dengan baik dalam menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman atau bahkan sumber stress yang signifikan (Southwick et al., 2014). Maka definisi resiliensi atau ketahanan dalam kesehatan merupakan sebuah kemampuan sistem untuk dapat menyesuaikan fungsinya sebelum, selama, dan setelah terjadi sebuah perubahan dan dirupsi sehingga sistem tersebut dapat menjalankan performa yang baik pada sebuah kondisi yang diharapkan maupun tidak diharapkan (Wiig et al., 2020). Definisi lain menyebutkan bagaimana resiliensi kesehatan dapat membawa sebuah aksi konkrit bagi masyarakat, organisasi maupun institusi untuk dapat mewujudkan sebuah kesejahteraan yang bersifat berkelanjutan dan jangka panjang di tengah kesulitan dan bencana (Wulff et al., 2015). Atas dasar tersebut, ketahanan kesehatan masyarakat pesantren dipandang sebagai sebuah respon atau upaya masyarakat pesantren untuk dapat menjaga dan mewujudkan kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

Disamping itu, bagian ini juga membahas faktor yang mempengaruhi bagaimana pesantren baik secara individual di dalamnya maupun secara institusional dapat merespon pandemi sebagai wujud upaya dalam meningkatkan ketahanan kesehatan pesantren selama pandemi. Adapun berbagai literatur menyebutkan berbagai faktor berpengaruh

terhadap ketahanan institusi di antaranya ialah kapabilitas organisasi, hubungan organisasi, komunikasi organisasi, modal sosial, strategi organisasi, pembelajaran organisasi, dan semangat kerja (Liu et al., 2021). Oleh karena itu, beberapa faktor tersebut kami identifikasi dengan melakukan konteksasi pada pesantren di antaranya ialah pengetahuan, sikap dan keyakinan individu terkait berbagai isu dan upaya dalam merespon pandemi, kepemilikan sumber daya, karakter pemimpin dan upaya membangun jaringan sebagai upaya institusional dalam merespon pandemi.

Bagian ini juga membahas dampak pandemi terhadap kesehatan masyarakat pesantren baik fisik maupun secara psikologis. Ketahanan kesehatan masyarakat sangat penting untuk dikaji mengingat pesantren merupakan salah satu institusi yang berisiko menjadi klaster penularan COVID-19 mengingat karakteristiknya sebagai institusi yang memiliki kepadatan hunian yang cukup tinggi serta kegiatan komunal yang dilakukan di dalamnya di mana karakter tersebut dapat mempermudah terjadinya transmisi COVID-19.

RESPON INDIVIDU PADA MASYARAKAT PESANTREN DALAM PANDEMI COVID-19

Pengetahuan terkait Pandemi COVID-19

Dalam suasana pandemi COVID-19, pondok pesantren harus mempunyai bekal ilmu yang mumpuni sehingga dapat melatarbelakangi terciptanya upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pondok pesantren dilakukan secara tepat dan terukur baik yang dilakukan di tingkat individu maupun institusi.

Secara definitif, pengetahuan kesehatan merupakan teoretikal konstruk yang melingkupi informasi detil dan spesifik terkait penyebab, prevalensi, faktor risiko, pencegahan, transmisi dan perawatan penyakit juga layanan kesehatan serta hak pasien (Trevethan, 2017). Dalam model PRECEDE-PROCEED, model yang dikemukakan Green pada 1974 untuk membantu perencana, pengambil kebijakan serta evaluator untuk menganalisis situasi dan mendesain program kesehatan secara efisien, pengetahuan menjadi salah satu faktor *predisposing* yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan (Green & Kreuter, 2004).

Meskipun mayoritas masyarakat pesantren telah mengetahui berbagai pengetahuan dasar terkait dengan sumber penularan COVID-19 serta pencegahannya, namun secara umum dapat digambarkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat pesantren yang belum mengetahui terkait isu-isu terkini terkait penularan dan pencegahan COVID-19. Pengetahuan tersebut meliputi bagaimana kaitan rokok dengan penularan dan keparahan COVID-19, varian terbaru virus Corona penyebab COVID-19, penggunaan dobel masker dalam pencegahan COVID-19 serta bagaimana menciptakan kekebalan kelompok melalui vaksinasi COVID-19. Diketahui juga masih terdapat disparitas pengetahuan terkait isu-isu tersebut antara santri dan guru/pengurus pondok pesantren di mana santri memiliki pengetahuan atau wawasan lebih rendah daripada guru/pengurus pondok pesantren.

Kurangnya pengetahuan dapat dikarenakan masih minimnya informasi yang diberikan kepada santri terkait dengan informasi terkini COVID-19. Lebih dari itu, COVID-19 tergolong sebagai *new emerging diseases*, di mana hal tersebut menyebabkan bahwa masih berkembangnya berbagai pengetahuan menyangkut virus penyebab COVID-19, penularannya ataupun berbagai pencegahan yang dapat dilakukan. Selain itu, terdapat kondisi infodemik di mana terdapat informasi yang berlebihan tentang suatu masalah, sehingga sulit untuk menemukan solusinya. Penyebaran informasi yang salah, disinformasi, dan rumor selama keadaan darurat kesehatan dapat menghambat respon kesehatan masyarakat yang efektif dan menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan di antara masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan literasi khususnya literasi digital serta peningkatan pengetahuan terkait isu-isu terkini terkait pandemi untuk dapat meningkatkan wawasan masyarakat pesantren sehingga dapat merespon pandemi secara tepat.

Sikap terhadap Pandemi dan Penanggulangannya

Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan untuk berpikir, merasa, dan bertindak dengan cara tertentu terhadap suatu objek atau kelompok tertentu. Sikap dianggap sebagai interaksi yang kompleks antara keyakinan, perasaan, dan nilai-nilai (Ul Haq et al., 2012). Terkait pandemi, berbagai respon dikeluarkan oleh masyarakat terhadap pandemi serta

penanggulangannya. Terdapat masyarakat yang setuju akan berbagai upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi, namun terdapat juga yang tidak setuju terhadap hal tersebut. Sikap positif terhadap upaya penanggulangan pandemi dapat memunculkan dukungan sehingga mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk dapat mendukung penerapan penanggulangan pandemi.

Masyarakat pesantren telah setuju terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi di pondok pesantren seperti perlunya isolasi bagi penderita COVID-19, bersedia dilakukan skrining jika terdapat gejala COVID-19, membantu yang terkena COVID-19, adanya teguran dan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan, serta bersedia untuk melakukan pengobatan jika terkena COVID-19 sesuai dengan ketentuan pengobatan. Namun beberapa sikap masih kurang sesuai dalam upaya mendukung penanggulangan COVID-19 seperti tidak ingin orang lain tahu ketika terkena COVID-19 dan masih setuju jika orang tua dapat mengunjungi ke pesantren selama pandemi.

Tak ingin orang lain mengetahui ketika terkena COVID-19 merupakan buntut adanya stigma negatif terhadap COVID-19 di mana terdapat sebuah stigma bahwa COVID-19 merupakan sebuah aib sehingga dikucilkan oleh orang di sekitarnya. Hal tersebut mendorong untuk orang yang memiliki gejala seperti COVID-19 tidak ingin melakukan tes dan tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dirinya sedang terinfeksi COVID-19.

Adanya berbagai fenomena seperti terdapat oknum yang memalsukan data COVID-19 atau melaporkan seseorang sebagai penderita COVID-19 padahal tidak terinfeksi serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam penanggulangan pandemi karena adanya kebijakan yang dinilai kurang konsisten serta adanya intrik bisnis dalam penanggulangan pandemi menyebabkan berbagai sikap kurang mendukung terhadap berbagai kebijakan penanggulangan pandemi.

Keyakinan terkait Kerentanan terhadap Penularan COVID-19

Pada kerangka *Health Belief Model* disebutkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perilaku kesehatan di antaranya ialah penerimaan seseorang terhadap kerentanan untuk terkena penyakit, keyakinan terhadap konsekuensi keparahan penyakit, potensi manfaat

ketika melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit, persepsi kendala dalam melakukan tindakan pencegahan, paparan terhadap perilaku pencegahan serta kepercayaan diri untuk melakukan tindakan pencegahan (Orji et al., 2012). Beberapa riset menunjukkan bahwa *Health Belief Model* digunakan untuk dapat mengidentifikasi prediktor dalam perilaku pencegahan COVID-19 (Mirzaei et al., 2021).

Terkait dengan kerentanan tertular COVID-19, masih terdapat masyarakat pesantren yang merasa bahwa mereka tidak berisiko tertular COVID-19. Dalam hal kerentanan tertular COVID-19, ditemukan perbedaan signifikan antara guru dan santri di mana pada kelompok santri, lebih dari 50% setuju bahwa mereka tidak berisiko tertular COVID-19 sedangkan pada kelompok guru hanya sekitar 30% bahwa mereka tidak berisiko tertular COVID-19. Rendahnya *perceived susceptibility* tentunya akan berdampak pada perilaku yang abai terhadap pencegahan COVID-19. Hal tersebut dapat dipengaruhi anggapan bahwa para santri sudah merasa aman berada di dalam pondok pesantren dan terproteksi dari penularan COVID-19. Kendati demikian, adanya celah penularan COVID-19 kepada santri melalui interaksi santri dengan pihak pesantren yang masih memiliki mobilitas ke wilayah diluar pesantren serta masyarakat pesantren yang masuk ke lingkungan pesantren menjadikan santri pada dasarnya juga berisiko tertular COVID-19.

Terkait keyakinan keparahan jika terkena COVID-19, masih terdapat masyarakat pesantren yang berkeyakinan bahwa COVID-19 tidak membahayakan. Persepsi bahwa keparahan hanya terjadi kepada orang-orang tertentu saja seperti lansia, orang dengan komorbid, ibu hamil dan kelompok berisiko lainnya menjadikan terdapat kelompok masyarakat yang berkeyakinan bahwa mereka tidak akan terkena keparahan ketika terkena COVID-19. Padahal data menyebutkan bahwa meskipun setengah dari pasien COVID-19 remaja dan anak mengalami gejala ringan COVID-19, beberapa anak-anak memerlukan perawatan intensif serta penggunaan alat bantu pernafasan dalam menjalani perawatan COVID-19 (Kim et al., 2020).

Terkait dengan keyakinan atas manfaat dalam melakukan tindakan pencegahan COVID-19, mayoritas telah memiliki keyakinan berbagai tindakan pencegahan seperti tidak berjabat tangan, menggunakan masker dan mencuci tangan dapat mencegah penularan COVID-19. Ma-

syarakat pesantren juga berkeyakinan bahwa mereka dapat menerapkan protokol kesehatan dalam kesehariannya dikarenakan ketersediaan yang memadai berbagai fasilitas dalam menunjang penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sarana cuci tangan, *hand sanitizer*, fasilitas cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.

Salah satu protokol kesehatan yang diyakini sulit untuk dilaksanakan ialah menjaga jarak. Hal tersebut dikarenakan padatnya hunian di pondok pesantren serta kurang luasnya beberapa fasilitas dalam menunjang kegiatan di dalamnya sehingga dapat mempersulit masyarakat pesantren dalam menerapkan jaga jarak. Selain itu, perilaku untuk menghormati kiai oleh santri dengan melakukan salaman (cium tangan) menjadi sebuah faktor bagi masyarakat pesantren untuk tidak melakukan jaga jarak.

Salah satu keyakinan yang juga diidentifikasi yakin keyakinan terkait vaksinasi COVID-19. Masyarakat pesantren mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kendati demikian, masih terdapat keyakinan bahwa vaksin COVID-19 dapat menimbulkan efek samping yang parah bahkan kematian. Di sisi lain, penolakan untuk melakukan vaksinasi juga datang dari orang tua santri yang memberikan persetujuan bagi anaknya untuk melakukan vaksinasi. Hal tersebut juga ditengarai dari adanya keyakinan akan ketidakefektifan vaksin serta efek samping yang dapat ditimbulkan oleh vaksinasi COVID-19.

RESPON INSTITUSIONAL PESANTREN DALAM PANDEMI COVID-19

Kepemimpinan Kiai dalam Penanganan Pandemi di Pesantren

Kiai dalam pondok pesantren memiliki peran sentral untuk dapat menggerakkan dan mengatur seluruh sumber daya pesantren yang dalam konteks ini untuk dapat dipergunakan dalam rangka penanggulangan pandemi. Masyarakat pesantren menilai bahwa kiai di pesantren telah mendukung berbagai upaya pencegahan COVID-19 seperti menganjurkan masyarakat untuk melakukan tes usap Antigen/PCR dalam rangka deteksi penegakan diagnosis COVID-19 serta penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 di Indonesia. Beberapa karakteristik penting yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan resiliensi pesantren selama pandemi COVID-19 di antaranya ialah strategis, terbuka, berani, mandiri dan kolaboratif.

Kepemimpinan strategis “meliputi kemampuan mengantisipasi, memiliki visi, dan mempertahankan fleksibilitas, memberi kuasa kepada orang-orang lain untuk menciptakan perubahan strategis yang perlu (Kemhan, 2017)”. Dalam pesantren, kiai yang memiliki karakter strategis, sebelum pandemi, telah merancang rencana strategis untuk pesantrennya di mana rencana tersebut juga seiring dengan penanggulangan COVID-19. Sebagai contoh, terdapat pesantren yang telah memiliki rencana strategis untuk mengembangkan pembelajaran daring (dalam jaringan) bagi pesantrennya dengan mengembangkan *e-learning management system* sehingga dengan adanya pandemi maka penggunaan sistem pembelajaran tersebut sangatlah sesuai untuk dipergunakan.

Karakter kepemimpinan penting lain yang perlu dimiliki pesantren ialah sifat terbuka. Sifat terbuka ini dimaknai dalam dua perspektif di mana pimpinan pesantren terbuka dalam berbagai informasi yang valid dalam penanggulangan pandemi COVID-19 sehingga mereka dapat mengambil langkah strategis dalam penanggulangan pandemi. Selain itu, pimpinan pesantren yang terbuka juga dilihat dari perspektif dalam membuka informasi terkait dengan kasus dan penanggulangan pandemi COVID-19 di pondok pesantren sehingga pihak luar seperti dinas kesehatan dan puskesmas dapat mendukung dan membantu penanggulangan pandemi COVID-19 di pondok pesantren.

Kepemimpinan yang berani menjadi salah satu karakteristik yang juga perlu dimiliki pimpinan pesantren. Pimpinan pesantren perlu memiliki karakter yang berani dalam memutuskan apakah pesantren perlu melakukan pembelajaran secara daring maupun luring mengingat disadari bahwa pesantren merupakan salah satu lokasi menjadi klaster penularan COVID-19. Namun di sisi lain, terdapat dorongan baik dari orang tua santri maupun internal pondok pesantren untuk menyelenggarakan pembelajaran luring sehingga pimpinan pondok perlu membuat sebuah keputusan di tengah ketidakpastian dan mengambil risiko untuk dapat di satu sisi mensukseskan pembelajaran namun di sisi lain juga perlu untuk memastikan kesehatan masyarakat pesantren.

Pimpinan pesantren yang mandiri dalam mendapatkan sumber daya untuk dapat mendukung ketahanan pesantren di era pandemi menjadi salah satu faktor penting untuk dapat meningkatkan ketahan-

an pesantren. Pengejawantahan karakter mandiri tersebut dilihat dari bagaimana pesantren mengelola bisnis sosial/amal usaha untuk mendapatkan pendanaan dalam menunjang pengelolaan pesantren.

Karakter lain ialah karakter kolaboratif di mana pimpinan pesantren perlu melakukan kolaborasi dengan membangun jejaring dengan pihak eksternal pesantren. Pesantren berjejaring dengan banyak pihak misalnya 1) sesama pondok pesantren untuk bertukar informasi terkait penanganan pandemi di pondok pesantren, 2) organisasi afiliasi pesantren misalnya NU yang memberi bantuan alat kesehatan seperti masker dll atau Muhammadiyah yang mengadakan pelatihan pembelajaran daring, 3) alumni, misalnya terdapat pesantren yang memberdayakan alumninya untuk menggalang bantuan dana demi keberlangsungan pesantren di masa pandemi, 4) organisasi masyarakat (ormas), seperti pesantren yang menerima bantuan dari ormas keagamaan berupa bantuan sembako untuk warga pondok pesantren, 5) pemerintah, misalnya dalam hal *tracing* atau pelaksanaan vaksinasi bekerjasama dengan puskesmas setempat.

Kepemilikan dan Pengerahan Sumber Daya dalam Penanganan Pandemi

Salah satu sumber daya yang penting dalam mendukung penanggulangan pandemi di pondok pesantren ialah sumber daya komunikasi, informasi dan edukasi terkait COVID-19 serta sumber daya dalam upaya *testing*, *tracing* dan *treatment*. Terdapat pesantren yang menyediakan sumber daya untuk masyarakat pesantren melakukan skrining COVID-19, namun terdapat juga pesantren yang tidak menyediakan alat skrining tersebut melainkan masyarakat pesantren seperti santri perlu mendapatkan fasilitas tersebut diluar pondok pesantren. Terdapat juga pesantren yang menyediakan tes PCR di mana alat tersebut merupakan bantuan dari sebuah universitas.

Dalam hal perawatan, fasilitas atau sumber daya yang tersedia di pondok pesantren sangatlah variatif. Terdapat pondok pesantren yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dasar maupun fasilitas kesehatan berbasis masyarakat di dalam pondok pesantren. Ketidakterersediaan tersebut menyebabkan jika terdapat santri yang terkena atau memiliki gejala COVID-19 maka perlu mendapatkan perawatan diluar pondok pesan-

tren ataupun dipulangkan ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan. Selain itu, terdapat juga pondok pesantren yang tidak memiliki fasilitas layanan kesehatan dasar namun memiliki bantuan dari pihak eksternal untuk dapat memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat pesantren. Sumber daya tersebut berasal dari organisasi afiliasi dari pondok pesantren tersebut. Selain itu, banyak dari pondok pesantren yang telah memiliki sumber daya untuk menyelenggarakan layanan kesehatan dasar secara mandiri oleh pondok pesantren. Adapun fasilitas tersebut di antara lain ialah sumber daya manusia berupa dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya. Sumber daya fasilitas ruangan serta obat-obatan. pondok pesantren dapat memiliki sumber daya seperti dokter maupun perawat, yang berasal dari alumni pondok pesantren yang telah mengenyam pendidikan untuk menjadi tenaga kesehatan.

Manajemen Upaya Preventif dan Promosi Kesehatan dalam Penanganan COVID-19 di Pondok Pesantren

Hampir semua pondok pesantren membuat satuan tugas COVID-19 yang bertanggung jawab untuk mengelola penanggulangan COVID-19 di pondok pesantren. Keberadaan satgas COVID-19 di pondok pesantren salah satunya juga diamanatkan oleh organisasi afiliasi pondok pesantren di mana di setiap lembaga baik itu pondok pesantren maupun institusi lainnya seperti masjid diperlukan adanya satgas COVID-19. Tugas satgas COVID-19 pondok pesantren ialah mengontrol aktivitas di pondok pesantren terutama dalam hal penerapan protokol kesehatan (pembatasan aktivitas keluar masuk tamu, pendisiplinan cuci tangan, pemberian vitamin penyemprotan disinfektan), *testing*, isolasi serta perawatan bagi yang sakit.

Meskipun sudah terdapat satgas COVID-19 di pondok pesantren. Performa satgas atau profesionalitas satgas sangat dipengaruhi oleh beberapa hal di mana salah satunya adalah latar belakang pendidikan atau pengalaman dari yang mengelola satgas tersebut. Orang yang memiliki latar belakang kesehatan cenderung lebih memiliki ketepatan dalam hal menangani pandemi dikarenakan literasi yang dimiliki sudah cukup tinggi terkait kesehatan. Namun, yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan juga tidak memiliki performa yang cukup mengingat mereka memiliki keinginan untuk mau belajar dalam hal

penanganan pandemi terutama di pondok pesantren. Kendati demikian masih terdapat pondok pesantren yang tidak membentuk unit khusus yang menangani COVID-19 di mana penanganan kasus COVID-19 di pondok pesantren ditangani secara langsung oleh struktur pesantren yang sudah ada sebelumnya. Ketiadaan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti minimnya jumlah sumber daya manusia yang ada di pondok pesantren.

Terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pondok pesantren dalam hal pencegahan, skrining serta perawatan terhadap kasus COVID-19, ditemukan variasi antar pondok pesantren. Terkait pencegahan COVID-19, terdapat pondok pesantren yang masih secara ketat dalam hal penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan menjaga jarak. Hal lain ditemukan pada pondok pesantren lainnya di mana sudah tidak lagi melakukan pengetatan dalam hal penggunaan masker, jaga jarak serta mencuci tangan menggunakan sabun. Beberapa hal diungkapkan mengapa tidak ada kebijakan tersebut di mana pengurus pesantren merasa bahwa ketika sudah berada di dalam pondok pesantren seperti berada di dalam rumah, maka masyarakat pesantren tidak diwajibkan untuk menggunakan masker saat di dalam pesantren kecuali bagi yang memiliki gejala maupun yang sedang menjalani isolasi mandiri. Selain itu, terdapat beberapa pembelajaran yang dianggap sulit jika dilakukan menggunakan masker misal dalam hal pelajaran olahraga serta membaca al-Qur'an. Salah satu responden juga mengatakan bahwa mereka tidak mewajibkan masker pada santri secara umum di dalam pondok pesantren mengingat masker yang dimiliki santri tidaklah bersih sehingga justru malah dapat menimbulkan hal yang tidak baik jika tetap menggunakan masker.

Dalam hal kebijakan terkait dengan skrining dan prosedur pemasukan kembali santri ke pondok pesantren, setiap pondok pesantren juga memiliki kebijakan yang berbeda di mana terdapat pondok pesantren yang mewajibkan santrinya melakukan tes antigen di rumahnya masing-masing namun terdapat juga pondok pesantren yang mewajibkan test antigen di pondok pesantren. Selain itu, dalam hal karantina setelah masuk ke pondok pesantren, mayoritas pondok pesantren telah memiliki kebijakan karantina bagi santri yang baru datang ke pondok pesantren, namun, masih terdapat pesantren yang tidak memiliki ke-

bijakan tersebut. Variasi kebijakan pondok pesantren juga ditemukan dalam hal skrining jika terdapat masyarakat pesantren yang memiliki gejala COVID-19, terdapat pondok pesantren yang langsung melakukan skrining COVID-19 jika terdapat masyarakat pesantren yang memiliki gejala COVID-19. Namun terdapat pesantren yang menunggu untuk melakukan skrining COVID-19 jika santri telah memiliki gejala spesifik terkait COVID-19 seperti anosmia. pondok pesantren lain juga memiliki perbedaan kebijakan terkait hal tersebut di mana tidak melakukan skrining gejala COVID-19 namun langsung melakukan isolasi mandiri bagi santri yang memiliki gejala COVID-19. Dalam hal isolasi juga terdapat perbedaan kebijakan dari setiap pondok pesantren di mana terdapat pondok pesantren yang melakukan isolasi sepanjang 14 hari namun terdapat juga pondok pesantren yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 5 hari atau ketika sudah tidak bergejala.

Dalam hal ini, tingginya kasus yang berada di pondok pesantren tentunya tidak selalu menggambarkan kondisi sesungguhnya terjadinya penularan di pondok pesantren melainkan terdapat kemungkinan adanya fenomena gunung es dalam hal penularan COVID-19 di pondok pesantren. Pengungkapan kasus COVID-19 di pondok pesantren sangat dipengaruhi upaya *testing* dan *tracing* yang dilakukan pondok pesantren dalam melakukan pengecekan status COVID-19. Rendahnya upaya pengecekan dan pelacakan kasus COVID-19 di pondok pesantren menjadi salah satu faktor penghambat pondok pesantren untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Kondisi tersebut dapat digambarkan di mana ketika pengecekan dan pelacakan kasus COVID-19 rendah di pondok pesantren, maka seolah-olah pondok pesantren tidak memiliki kasus COVID-19 atau memiliki kasus COVID-19 yang rendah. Padahal, realitanya infeksi sudah tersebar di dalam pondok pesantren di mana kondisi tersebut tidak berpengaruh secara signifikan jika menginfeksi orang dengan daya tahan tubuh yang cukup kuat seperti pada remaja atau usia produktif namun kondisi tersebut dapat sangat merugikan ketika infeksi yang tidak terdeteksi dapat juga menginfeksi kelompok berisiko terjadinya keparahan ketika terinfeksi COVID-19 seperti lansia, ibu hamil dan orang dengan penyakit penyerta.

Dalam hal perawatan pasien COVID-19 juga terdapat perbedaan di antara pondok pesantren. Terdapat pesantren yang sesuai dengan

standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal perawatan pasien COVID-19. Namun terdapat juga pondok pesantren yang hanya memberikan vitamin serta obat pereda gejala COVID-19 dalam melakukan perawatan terhadap pasien COVID-19. Terdapat juga pondok pesantren yang cenderung lebih memilih pengobatan herbal dalam melakukan pencegahan COVID-19 maupun untuk pengobatan seperti sambiloto, bawang putih, probiotik serta ramuan herbal lainnya. Keberadaan pengobatan herbal merupakan hasil masukan dari organisasi afiliasi pondok pesantren maupun rekan pimpinan pondok pesantren.

Beberapa variasi regulasi yang terjadi dapat dikarenakan beberapa hal seperti tidak adanya kebijakan spesifik yang dikeluarkan otoritas yang berwenang serta perubahan kebijakan dalam hal penanganan COVID-19 di pesantren. Selain itu, terdapat pondok pesantren yang memiliki kapasitas yang cukup untuk dapat melakukan pengobatan dan perawatan pasien COVID-19 namun terdapat juga pondok pesantren yang memiliki kapasitas yang minim sehingga tidak dapat memiliki kemampuan untuk memberikan perawatan pasien COVID-19 secara mandiri.

DAMPAK PANDEMI TERHADAP PESANTREN

Perilaku Kesehatan dan Vaksinasi COVID-19 di Pondok Pesantren

Keberadaan COVID-19 memberikan dampak adanya urgensi untuk melakukan adaptasi atau dalam hal ini adalah perlu adanya perubahan perilaku untuk dapat merespon dengan baik pandemi yakni terhindar dari terinfeksi COVID-19. Beberapa perilaku pencegahan COVID-19 seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, perilaku peningkatan imunitas tubuh seperti berjemur, meminum minuman herbal, makan makanan bergizi serta perilaku beribadah yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19 seperti berjabat tangan, memakai masker ketika beribadah, menjaga jarak ketika beribadah serta tidak mencium tangan kiai maupun nyai.

Untuk dapat mengakhiri pandemi, salah satu cara *pharmaceutical intervention* yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan vaksinasi. Terkait dengan status vaksinasi COVID-19, sebagian besar masyarakat pondok pesantren telah divaksinasi COVID-19. Seseorang yang belum dilakukan vaksinasi, lalu ditanyakan kembali minat responden untuk melakukan vaksinasi COVID-19, dari situ ditemukan bahwa sekitar se-

pertiganya masih ragu-ragu dan tidak berminat dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19.

Beberapa alasan masyarakat pesantren untuk ragu dan tidak berminat melakukan vaksinasi COVID-19 di antaranya ialah keluarga tidak setuju dilakukan vaksinasi COVID-19, tidak yakin atas efektifitas vaksin, takut akan efek samping, takut akan jarum suntik serta tidak percaya vaksin COVID-19. Lalu mengapa orang tua tidak setuju anaknya dilakukan vaksinasi COVID-19 di antaranya ialah kurangnya pengetahuan orang tua terkait vaksinasi COVID-19 ataupun yang kurang percaya terhadap vaksinasi COVID-19.

Kesehatan Mental Masyarakat Pondok Pesantren selama Pandemi COVID-19

Pandemi juga berdampak kepada kesehatan mental masyarakat. Terkait hal ini, beberapa hal terkait gejala kesehatan mental yang paling sering terjadi (hampir setiap hari) di kalangan masyarakat pesantren di antaranya ialah sulit tidur, kurang nafsu makan atau terlalu banyak makan, kurang percaya diri atau merasa bahwa anda adalah orang yang gagal atau telah mengecewakan diri sendiri atau keluarga dan sulit berkonsentrasi pada sesuatu. Dari sembilan pertanyaan tersebut, diketahui bahwa terdapat sekitar 5% mengalami gejala depresi agak berat, sekitar 18% mengalami depresi sedang dan 40% mengalami gejala depresi ringan.

BAB III

DAMPAK & KETAHANAN PENDIDIKAN DI PESANTREN SELAMA PANDEMI COVID-19

Laifa Annisa Hendarmin

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan disrupsi dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang mengalami perubahan signifikan akibat adanya pandemi adalah bidang pendidikan. Semua lembaga pendidikan harus melakukan adaptasi dengan mengubah pembelajaran dari pertemuan tatap muka menjadi pertemuan secara *online* atau daring (dalam jaringan). Ketika pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19 di bulan Maret 2020, pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Indonesia yang melakukan pengasuhan santri di asrama, terpaksa harus memulangkan santrinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan pesantren.

“Ya, kita dari awal semenjak bulan Maret 2020 anak-anak kita pulangin semuanya, habis itu kita mempersiapkan eh, ya kita memusyawarahkan lah di sini, pada yayasan juga, tahun ajaran depan bagaimana ini, apakah kita akan online sebagaimana arahan dari pemerintah atau eh kita offline tapi dengan mekanisme yang kita komunikasikan dengan instansi yang terkait gitu, akhirnya dari bulan Maret sampai bulan, sampai menyelesaikan semester semester akhir itu selain online kita juga menyiapkan offline dan menyiapkan prasarana dan juga apa apa namanya, software dan hardware nya untuk bagaimana kalau offline.”¹

1 Wawancara Pimpinan PP RI, 1 September 2021.

HAMBATAN PEMBELAJARAN PONDOK PESANTREN SELAMA PANDEMI COVID-19

Sebagai bagian dari proses adaptasi pesantren dalam menghadapi pandemi, pesantren mengambil langkah penyelenggaraan pembelajaran daring. Meskipun demikian, dalam praktiknya pesantren mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut terdiri dari hambatan teknologi, finansial dan pedagogi. Santri dan guru mengakui bahwa hambatan teknologi yang seringkali terjadi adalah jaringan internet yang tidak stabil dan kuota yang terbatas.

“Sempat masuk sekolah tapi lewat zoom, itu kendalanya paling banyak diinternet, jadi kita keluar masuk-keluar masuk, jadi itu kan enggak bisa menyerap materi secara maksimal.”²

“Kendala yang paling sering adalah siswa tidak punya kuota atau tidak ada jaringan, atau pun kalau punya kuota, kebanyakan kuota chat.”³

Pemerintah memiliki program bantuan kuota. Namun program ini belum bisa menjadi solusi atas keterbatasan kuota yang dimiliki siswa, karena kuota yang diberikan oleh pemerintah hanya bisa digunakan pada situs tertentu. Tidak semua aplikasi maupun situs *online* penunjang pembelajaran dapat diakses menggunakan kuota yang diberikan pemerintah.

“Kemarin itu beberapa untuk kuota Kemendikbud itu hanya untuk fasilitas tertentu, tidak semuanya.”⁴

Selain itu, santri yang tinggal di wilayah pedesaan masih menghadapi masalah kesulitan jaringan internet dan kendala mati listrik. Hal ini pun menjadi hambatan yang berarti dalam proses pelaksanaan pembelajaran daring.

2 Wawancara Santri PP RI, 4 September 2021.

3 Wawancara Guru PP N, 30 Agustus 2021.

4 Wawancara Guru PP N, 30 Agustus 2021.

“Apalagi santri-santri yang rumahnya di daerah-daerah yang jaringan internetnya masih kurang bagus, listriknya kadang masih suka mati.”⁵

Permasalahan teknologi pun terjadi pada aspek kepemilikan gawai. Tidak semua santri memiliki gawai pribadi, melainkan ada santri yang harus memakai gawai milik orang tua maupun menggunakan gawai secara bergantian dengan saudaranya.

“Kedua belum difasilitasi ponsel, jadi ponselnya masih menggunakan ponsel kakaknya atau orang tuanya sedangkan ponselnya juga dipakai sama orang tuanya atau kakaknya.”⁶

Hambatan teknologi yang disebutkan di atas merupakan hambatan teknologi pada aspek teknis. Nyatanya, santri mengakui bahwa selain aspek teknis, teknologi memiliki hambatan tersendiri pada aspek efek psikologis yang dirasakan oleh santri akibat penggunaan gawai dalam belajar. Misalnya, menurut santri pembelajaran daring dengan menggunakan media ponsel atau laptop memecah konsentrasi mereka karena terkadang santri bisa mengikuti kelas dengan *off camera* sedangkan mereka malah main *game* ataupun menonton film.

“Iya kita berusaha matuhi regulasi, ya namanya juga online kadang ada halangan yang terjadi, ya udah kamera mati. Kayak sewajarnya daring-daring di luar juga. Ada juga godaan-godaan untuk main game. PUBG biasanya.”⁷

“Selain itu biasanya main game atau biasanya kalau kaya gitu suka nonton sama temen-temen gitu jadi suka ketinggalan.”⁸

Selain santri, guru pun harus melakukan adaptasi teknologi untuk menunjang pembelajaran daring. Guru mengalami hambatan seperti keterbatasan kemampuan untuk menggunakan maupun menciptakan

5 Wawancara Santri, PP RH, 13 September 2021

6 Wawancara Guru, PP LA, 17 September 2021.

7 Wawancara Santri, PP RL, 11 September 2021.

8 Wawancara Santri, PP RL, 11 September 2021.

variasi media belajar *online*. Bahkan masih ada guru yang belum pernah menggunakan media *Zoom Meeting*.

“Kemudian juga ada pembelajaran melalui pembuatan video pakai aplikasi tertentu gitu ya kita buat tapi karena memang betul sekali ya keterbatasan juga lah, akhirnya inovasi tersebut tidak terlalu maksimal.”⁹

“Awal-awal sih merasa kesulitan agak merasa kaget aja, gitu, karena belum menyesuaikan. Belum menyesuaikan apa? Apakah zoomnya, kah? Atau apa, nih? Zoomnya, karena belum pernah.”¹⁰

Selain hambatan teknologi, hambatan finansial pun dirasakan oleh guru, orang tua dan pesantren. Guru mengalami pemotongan gaji dengan jumlah yang beragam, padahal pengeluaran selama pandemi bertambah dengan kebutuhan membeli kuota atau pemasangan Wi-Fi dan pengeluaran tambahan untuk menunjang kesehatan di masa pandemi. Meskipun demikian, mayoritas guru mengakui bahwa pemotongan gaji merupakan hal yang masih bisa diterima.

“Untuk gaji mungkin ada pemotongan sekitar 25% ya ini cukup ya alhamdulillah sebetulnya karena juga ikut merasakan apa ya merasakan pandemi juga.”¹¹

“Pada saat KBM sebesar 20% dan selama libur semester adanya pengurangan sebesar 50%.”¹²

Orang tua banyak yang mengalami isu finansial seperti kehilangan pekerjaan, penurunan pemasukan bisnis, tidak ada proyek bagi orang tua yang bekerja sebagai kuli bangunan, dan tidak bisa kembali ke Arab Saudi bagi orang tua yang menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Begitupun dengan pesantren yang merasakan dampak langsung akibat terhambatnya pembayaran SPP yang dibayarkan orang tua setiap bulannya. Bahkan ada orang tua yang menganggap sekolah daring serupa dengan tidak sekolah, karena anak mereka belajar di rumah sehingga mereka enggan membayarkan SPP.

9 Wawancara Kepala Sekolah, PP A, 28 Agustus 2021.

10 Wawancara Guru, BS, 22 September 2021.

11 Wawancara Kepala Sekolah, PP A, 28 Agustus 2021.

12 Wawancara Guru, BS Ki, 22 September 2021.

“Kalau bapak saya dulu kan itu bekerja sebagai wiraswasta ibu sebagai TKW gitu ke Arab Jadi kerjanya. Ibu sudah pulang tetapi ketika mau berangkat lagi sudah pandemi jadi nggak bisa berangkat lagi.”¹³

“Oh Bapak jadi tukang bangunan gitu ya? Dan selama pandemi ini masih banyak apa namanya pekerjaan nggak? bangunan gitu ya? Dan selama pandemi ini masih banyak apa namanya pekerjaan nggak? Nggak Ada selama pandemi ini nggak ada kerjaan gitu ya paling di sawah.”¹⁴

“Karena ada mereka yang menganggap bahwa ketika mereka daring itu dianggap kayak enggak sekolah sehingga ketika ditanyakan terkait tentang kewajiban untuk SPPnya, itu mereka banyak dalilnya gitu loh, banyak dalilnya sehingga mereka itu katakanlah enggan untuk membayar gitu.”¹⁵

“Iya sangat terasa sekali ya. Terasa sekali Ketika orang tua santri yang mengeluh karena di PHK misalkan dari pabriknya, dari perusahaannya. Atau ada orang tua santri yang mengeluh bahwa usahanya tidak seberuntung yang sebelumnya, justru merugi. Itukan kita punya tunggakan di luar cukup besar, bukan pesantren Darul Arqam saja.”¹⁶

Adapun hambatan dalam aspek pedagogi, secara umum dirasakan oleh santri dan guru di semua pesantren. Hambatan pedagogi tersebut berupa kesulitan memahami pelajaran khususnya matematika, *faraid* (ilmu waris), bahasa Arab, dan bahasa Inggris yang berpengaruh pada penurunan nilai. Santri juga mengungkapkan bahwa efektivitas pembelajaran daring sangat kurang sehingga ada santri yang perlu tambahan pembelajaran melalui bimbingan belajar dari luar sekolah.

“Jadi kalau untuk pelajaran sekolah ya kita itu benar-benar jadi keterbatasan gitu kayak misalkan sudah

13 Wawancara Santri, PP TU, 5 September 2021.

14 Wawancara Santri, PP TU, 5 September 2021.

15 Wawancara Kepala Sekolah, PP SI, 3 September 2021.

16 Wawancara Pimpinan, PP RA, 28 Agustus 2021.

diajarkan melalui guru pondok gitu tapi kan beda jadi kan kalau online itu semua keterbatasan semua pelajaran tidak dapat dipahami gitu ya matematika ya bahasa Inggris gitu, jadi matematika gimana kadang kita tatap muka aja matematika masih pusing apalagi ini masih hanya sekedar Kaya ber konteks-konteks gitu banyak banget pasti banyak banget hambatan kalau dari pendidikan setelah pandemi itu kayak kita bener-bener terhambat.”¹⁷

“Beberapa pelajaran kepesantrenan seperti mungkin bahasa Arab, Faraid dan yang lainnya memang agak sedikit kesulitan ketika harus disampaikan secara apa, secara online dan terbatas.”¹⁸

“Dan memang pada ujian nilainya juga sangat turun padahal sengaja dipermudah lagi ujiannya, tingkat kesulitan soalnya diturunkan, padahal mah gitu. Sudah dikasih poin-poin atau kisi-kisinya juga tetapi memang kurang juga karena tidak ada tatap muka.”¹⁹

“Nah cerita teman-temanku yang online kemarin mereka yang banyak ambil bimbel tambahan karena kurang efektif dalam eh pembelajaran daringnya, jadi itu sih kak dari diri sendiri seperti ambil bimbel tambahan.”²⁰

Menurut guru, minat belajar santri selama sekolah daring sangat menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya interaksi langsung yang terasa berbeda dengan interaksi daring antara guru dan santri maupun santri dan teman sebayanya. Masalah utama lainnya terkait pembelajaran daring pesantren adalah bahwa pembelajaran daring kurang sesuai dengan esensi pesantren yang bertujuan mentransfer akhlak, bukan sekedar transfer pengetahuan. Akhlak harus diajarkan secara langsung lewat teladan, sehingga pembelajaran daring kurang bisa jadi sarana untuk mencapai hal tersebut.

17 Wawancara Santri, PP TU, 5 September 2021.

18 Wawancara Kepala Sekolah, PP SI, 3 September 2021.

19 Wawancara Guru, PP LA, 17 September 2021.

20 Wawancara Santri, PP RI, 4 September 2021.

“Minat belajar siswa sangat menurun.”²¹

“Komunikasi online dengan offline itu beda banget, apalagi interaksi sama guru itu eh rada beda misalkan pembelajaran online gurunya kan baru ngajar di kita, itu kedekatannya beda banget kalau, harusnya beda banget kalau offline dengan online gitu kak.”²²

“Nah kemudian dirumahkan dalam waktu sangat lama itu ada kayak ilang gitu, dan apa ya jadi lebih sering moodnya naik turun di rumah, beban mood.”²³

“Ada pembelajaran seperti itu (online) kita sudah mencoba hal itu. Tapi, sangat tidak efektif karena pembelajaran pesantren itu kan pembelajaran apa ya bukan cuma mentransfer ilmu, bukan cuma mentransfer nilai, tapi juga ada akhlak yang harus ditransfer gitu kan, jadi karena kami rasa pembelajaran itu kurang efektif.”²⁴

Salah satu hal yang dikhawatirkan pakar pendidikan mengenai hambatan pedagogi yang dialami santri adalah kondisi *learning loss*. *Learning loss* didefinisikan sebagai kondisi hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik itu secara umum atau spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena faktor tertentu.²⁵ Dalam jangka panjang, *learning loss* dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sebuah generasi yang akan memimpin masa depan. Padahal tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang akan semakin kompleks.

Adanya berbagai hambatan yang terjadi dan urgensi untuk menyelamatkan kondisi kritis yang dihadapi oleh pesantren, mayoritas pesantren memutuskan untuk memulai pembelajaran luring. Pembelajaran luring yang dilakukan pesantren didukung oleh adanya SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 menteri di antaranya Menteri Pendidikan

21 Wawancara Kepala Sekolah, PP TU, 4 September 2021.

22 Wawancara Santri, PP RI, 4 September 2021.

23 Wawancara Santri, PP RI, 4 September 2021.

24 Wawancara Guru, PP RL, 19 Agustus 2021.

25 Iqbal Muhtarom. 2021. Apa itu *Learning Loss* yang ditakutkan Nadiem Makarim. Diakses dari <https://tekno.tempo.co/read/1511437/apa-itu-learning-loss-yang-ditakutkan-nadiem-makarim>

dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Implementasi SKB 4 menteri ini dimulai sejak 15 Juli-7 Agustus 2020 yang didasarkan pada sistem zonasi. Bagi sekolah atau pesantren di wilayah zona hijau, maka dapat melakukan pembelajaran luring/tatap muka dengan syarat.²⁶ Dalam hal ini, ketahanan pesantren ditinjau dari kesiapan dan kemampuan pesantren untuk menyelenggarakan pembelajaran luring setelah dikeluarkannya SKB 4 menteri. Berdasarkan hasil penelitian, masih ada pesantren yang hingga hari ini belum bisa menyelenggarakan pembelajaran luring yakni PP E dengan alasan geografis yang berada di Jakarta sebagai episentrum pandemi COVID-19 di Indonesia.

“Nah kalau di Jakarta kan terus terang saja kita hampir sekitar 19 bulan ini belum bisa offline, sehingga kita juga menunggu pemerintah menunggu baiknya dari aturan-aturan yang ada khususnya dari Pemda DKI Jakarta karena kami juga tergabung di dalam Forum Komunikasi pondok pesantren se-DKI Jakarta. Kemudian ada juga KKMS “kelompok kerja madrasah swasta” sehingga informasi-informasi itu hampir kita dapatkan setiap harinya. Kemudian untuk pesantren kami khususnya kami dengan sekolah yang lain termasuk dengan MAN negeri tentu berbeda. Ini saya bandingkan antara pesantren dengan sekolah dan madrasah karena banyak madrasah yang negeri sekarang sudah buka offline. Kenapa kok persis belum katanya madrasah ya, saya sampaikan Kalau sekolah madrasah negeri dan sekolah yang lain itu kan beban hanya sekitar dari jam 7 sampai jam 12 itu juga dengan sterilisasi dan aturan-aturan belajar ketika COVID. Ya sudah dikasih tempat cucinya, sudah dikasih hand sanitizer nya, sudah dikasih maskernya, gitu kan kemudian sekolahnya juga sudah diperbaiki dengan pemerintah gitu kan segala macam dibantu dengan pemerintah fasilitas ada mereka belajarnya sampai

26 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2020. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/ce6bbaf6e8194cc>

dzuhur wajar kalau mereka. Nah kalau pesantren walaupun ada bantuan kan juga tidak maksimal dari pemerintah itu yang pertama. Kemudian fasilitasnya harus ada dan untuk belajar mungkin masih bisa seperti yang Negeri tetapi harus diingat pesantren itu kami mondok, kalau mondok itu anak dari mana-mana nanti kumpul di asrama mereka tidur bersama dalam satu ruangan, mereka makan, minum, belajar, kemudian tidur juga bersama. Ini kan sangat riskan ya untuk mereka naudzubillah terpapar makanya kami juga hati-hati dan di forum komunikasi pondok pesantren di DKI saya selalu sampaikan ini Kita juga harus hati-hati karena khawatir justru akan berkembang kembali virus ini.”²⁷

FAKTOR KETAHANAN PESANTREN

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pendidikan pondok pesantren di antaranya kepemimpinan, *networking*/jaringan, manajemen pondok pesantren, dan sarana prasarana. Dalam aspek kepemimpinan, pimpinan pondok pesantren menunjukkan beberapa karakter yang menunjang ketahanan pesantren, misalnya strategis, berani, mandiri dan kolaboratif.

Pertama, karakter strategis dapat terlihat dari adanya langkah strategis yang diambil pimpinan dalam merespon hambatan pembelajaran di tengah masa pandemi misalnya membentuk tim IT (Informasi dan Teknologi) khusus yang disiapkan untuk menunjang pembelajaran daring dan membentuk tim ahli yang terdiri dari dokter-dokter untuk persiapan sekolah luring.

“Daring, anak-anak ada di rumahnya masing-masing bersama orang tuanya. Dan kita membikin pada saat itu mengeluarkan dana untuk tim IT ya, untuk membedahkan pembelajaran secara daring. Alhamdulillah tamatan DA ada yang dari Fikom, dari IT dari ITB gitu.”²⁸

27 Wawancara Pimpinan, PP E, 23 September 2021.

28 Wawancara Pimpinan, PP RA, 28 Agustus 2021.

“Setelah anak-anak pulang, kita melakukan rapat yang cukup panjang, marathon dan membuat sebuah organisasi yang baru yaitu tim Ahli. Tim Ahli ini terdiri dari para dokter PP RR yang beraktivitas di klinik yang dijadikan seperti konsultan. Kemudian, kita juga bentuk satgas pesantren yang berada di bawah pimpinan seorang direktur. Jadi direktur kita memiliki direktur pendidikan di bawah yayasan, lalu di bawah direktur ini ada salah satu seorang wakil direktur yang kita angkat sebagai salah satu Ketua satgas. Kita berikan wewenang, dan anggaran penuh. Kita posisikan satgas ini berada di atas semua unit ataupun semua organisasi di PP RR termasuk saya sebagai pengurus, kita komitmen bahwa kita di bahwa kendali satgas ini. Lalu satgas ini buat prosedur, setelah melakukan kajian-kajian, setelah itu dilakukan hearing dengan seluruh jajaran pengurus beserta pimpinan, setelah itu dilakukan beberapa kali revisi, hearing lagi, revisi lagi sampai ketemu yang dirasa cocok, dan itu dirasa siap akhirnya kita melakukan penerimaan santri atau kedatangan santri.”²⁹

Kedua, karakteristik berani terlihat dari keberanian mayoritas pimpinan untuk mengambil langkah membuka sekolah luring segera setelah diterbitkannya SKB 4 Menteri. Keputusan membuka sekolah luring bukan keputusan yang mudah, karena masih banyak kekhawatiran yang dirasakan orang-orang terkait sebaran virus di lingkungan pesantren. Selain itu, mendatangkan santri ke pesantren merupakan tanggung jawab yang besar karena berkaitan dengan keselamatan nyawa. Namun, ada pesantren yang sejak awal pandemi belum melakukan pemulangan santri. Faktor utama yang memungkinkan hal ini terjadi adalah karakter berani yang dimiliki pimpinan. Ketika ada kasus COVID-19 di pesantren A, pimpinan berani mengambil resiko untuk menangani kasus tersebut hingga tuntas, dari proses *tracing* hingga isolasi santri yang sakit. Pimpinan memiliki pandangan bahwa pendidikan pesantren tidak akan efektif jika dilakukan secara daring, maka sekolah luring dengan

29 Wawancara Pimpinan, PP RR, 22 September 2021.

menerapkan berbagai protokol merupakan solusi untuk tetap bertahan bagi pendidikan pesantren.

“Maka ketika kita secara filosofi lembaga adalah offline dan yayasan mengizinkan, maka kita melangkah tadi, membuat guidance-guidance, eh birokrasi mengizinkan, alhamdulillah secara lisan mengizinkan, dan panduan kita diberikan apresiasi dan bahkan dibilang, ustaz ini Se-Banten yang kayak gini hanya RI saja katanya, yang melakukan pendekatan dengan izin, komunikasi, hanya RI saja, yang lain nggak nggak ada yang izin, main buka-buka saja, karena yang tadi saya bilang ini kita di bawah naungan pemerintah, kalau ada apa-apa kita juga kerepotan nanti juga akan nyolek ke pemerintah, dan juga mendapat dari orang tua juga, alhamdulillah orang tua pada tahun pertama itu 30% yang trust dengan guidance dan panduan kita, terus pas gelombang kedua itu udah nyampe ke 700-an, kemudian semester yang sekarang ketiga udah nyampe hampir 80% Insya Allah, eh 90-an persen lah.”³⁰

“Jam 12 malam saya sampaikan ke satgas COVID-19, yang saat itu pak walikota saya kabari lewat WhatsApp, Wakil Walikota saya kabari, Kapolres, dan semua yang masuk dalam jajaran petinggi satgas COVID Tasikmalaya saya kabari; bahwa saya dapat konfirmasi dari lab, anak ada yang positif COVID. Nah, kurang lebih sebelum subuh saya ditelepon Pak Walikota, menanyakan ‘apa langkah-langkah yang sudah diambil?’ Saya sudah lockdown, saya lokalisir pondok pesantren ini, kemudian rencananya, siang saya mau tracking lagi anak-anak yang sudah bersentuhan dengan anak yang dinyatakan positif. Saya kunci, terus saya tracking terus. dan saya bertekad ingin menyelesaikan masalah COVID di pondok ini, walau pun akhirnya karena ini masalah nasional, hanya beberapa jam akhirnya viral juga, karena ada orang yang ngejar ke kimiafarma; betul tidak, bahwa pondok kami bikin MoU untuk melakukan

30 Wawancara Pimpinan, PP RI, 1 September 2021.

PCR? Dari mulai rapid ke PCR? Begitu. Memang saya saat itu langsung membuat MoU sampai selesai untuk menggandeng kimiafarma. Itu kira-kira, Bu. Tidak. Walau pun saya, maaf-maaf, Bu, di awal, ada pondok pesantren yang terpapar, heboh, itu luar biasa tekanannya. Pressure dari orang tua atau wali santri yang dihantui ketakutan, satu. Kemudian saya juga banyak kena marah orang; kenapa berani menahan santri kemudian berani mengambil resiko dengan biaya mandiri untuk melakukan penanganan sampai kita dinyatakan tidak ada yang terpapar COVID-19. Saya sampaikan tadi, nilainya bukan nilai yang kecil. Mencapai angka 2 milyar pada saat itu.”³¹

Ketiga, karakteristik mandiri dapat dilihat dari kemampuan pimpinan pesantren dalam mengadakan pendanaan mandiri bagi keberlangsungan pesantren. Mayoritas pondok pesantren mengalami masalah finansial karena orang tua yang terlambat membayar SPP. Dengan demikian, pesantren perlu mencari sumber pendanaan lain. Karakter mandiri bisa terlihat dari kemampuan pimpinan mengelola amal usaha milik pesantren. Misalnya pondok pesantren RG yang memiliki sumber pendanaan dari hasil mengelola kebun kopi untuk ekspor. Selain itu, pondok pesantren RA pun memiliki KBH (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah) yang selama pandemi dana tabungannya digunakan untuk menunjang kesulitan ekonomi pesantren.

“Iya, kita punya kebun. Satu pesantren punya kebun kopi sekitar 8 ha hampir setiap tahun kita ekspor kopi.”³²

“Kita juga DA punya KBH, kelompok bimbingan haji dan umrah. Ya kemarin-kemarin alhamdulillah punya tabungan, karena kan tabungan itu sudah menipis. Kita juga mau memPKH agak ini juga, aduh. Mudah-mudahan semuanya segera berlalu.”³³

Keempat, karakteristik kolaboratif erat kaitannya dengan *networking* pesantren dengan pihak-pihak lain, seperti jaringan sesama pesan-

31 Wawancara Pimpinan, PP A, 28 September 2021.

32 Wawancara Pimpinan, PP RG, 14 September 2021.

33 Wawancara Pimpinan, PP RA, 28 Agustus 2021.

tren, afiliasi organisasi (Muhammadiyah, NU, PERSIS), jaringan alumni pesantren, organisasi masyarakat dan pemerintah. Jejaring ini penting karena pesantren mendapat banyak bantuan seperti pelatihan pembelajaran daring, bantuan fasilitas penunjang protokol kesehatan, dan bantuan pendanaan melalui dana BOS.

“Untuk program workshop beberapa kegiatan memang diselenggarakan oleh Dikdasmen PWM DKI Jakarta karena memang masih termasuk lembaga yang dimiliki atau kepemilikannya, penasehatnya dari PWM DKI Jakarta pengurus wilayah daerah. Tetapi memang alhamdulillah sangat intens sekali karena online ini memang mempermudah, jadi biasanya kalau pelatihan itu kan guru diundang, kalau dilaksanakan secara daring sangat sering bahkan ya kalau yang di DKI itu Dikdasmen mengadakan kegiatan pelatihan. Biasanya kemarin yang diadakan oleh Dikdasmen PWM DKI tentang metode-metode pembelajaran, metode pengembangan media pembelajaran khususnya pelatihan tempat pembuatan media, ya.”³⁴

“Barang kali salah satunya kan untuk mengolah biaya perawatan dan seterusnya kan besar. Karenanya, cara pengelolaan itu, satu, kita meminta ke donator seperti kalender, kemudian ada donator yang merupakan inisiatif pribadi dari alumni. Kalau untuk pondok seperti itu.”³⁵

“Kita kan dari pemerintah juga dapet, biasanya dari BOS. Dari pemerintah alhamdulillah ada BOS. Bos itu kan kita tidak minta. BOS itu kan semuanya dapet, dan sebagian dari BOS itu digunakan untuk pemberian pulsa. Jadi guru itu dikasih pulsa salah satu anggarannya itu dari BOS.”³⁶

Dalam hal manajemen pesantren, manajemen yang baik berbanding lurus dengan kompetensi pimpinan yang baik pula. Maka, salah satu indikator manajemen pesantren yang baik adalah pemilihan pim-

34 Wawancara Guru, BS, 22 September 2021.

35 Wawancara Pimpinan, PP N, 31 Agustus 2021.

36 Wawancara Pimpinan, PP RG, 14 September 2021.

pinan berdasarkan asas meritokrasi. Sebagian besar pesantren memilih pimpinan berdasarkan kemampuan dan riwayatnya di dunia pendidikan, latar belakang pendidikan maupun riwayatnya sebagai alumni pesantren.

“Nah tapi kalau di Jakarta di PP E ini luar biasa jadi semua pesantren PERSIS milik jamiyah PERSIS milik organisasi persis tapi di dalam ketokohnya memang ada yang diangkat dari tokoh itu sendiri atau ada yang sifatnya meminjam kalimat itu demokratis gitu. Ya seperti yang di Jakarta ini tidak ada ketokohan tersendiri kemudian anaknya dan milik keluarga tidak ada tetapi, yang di DKI Jakarta ini milik dari jamiyah ya. Kemudian khususnya pimpinan cabang PERSIS ini siapa yang mampu untuk memimpin pesantren dan dia mempunyai leadership dan manajerial dialah yang akan menjadi mudiram atau menjadi pimpinan pesantren. Baik mudir, mudir jenjang tingkat Tsanawiyah, tingkat Aliyah dan juga tingkat SD dipilih tidak ditunjuk dipilih oleh guru oleh pendidik dan tenaga kependidikan gitu mungkin.”³⁷

“Saya diamanahkan sebagai pengurus tepatnya menjabat sebagai ketua sejak 2018 akhir. Saya di PP RR sejak 2008 mulai dari sebagai guru, wali asrama, semua aktivitas pendidikan di PP RR pernah saya alami. Untuk pendidikan, saya S1 dari Ma’had Aly An-Nuaimy Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, itu posisinya di Jakarta, Kebayoran Lama. Pendidikan S2 saya Manajemen Pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun.”³⁸

Selanjutnya, ketahanan pendidikan di bidang sarana dan prasarana sangat erat kaitannya dengan ketahanan kesehatan. Hubungan erat antara pendidikan dan kesehatan ini tidak dapat dipisahkan karena untuk menunjang ketahanan pendidikan (pembelajaran luring), pondok pesantren harus mempersiapkan ketahanan kesehatan mengingat bahwa pondok pesantren dapat menjadi klaster penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, ketahanan pendidikan dalam bidang sarana

37 Wawancara Pimpinan, PP E, 23 September 2021.

38 Wawancara Pimpinan, PP RR, 22 September 2021.

prasarana merupakan bagian yang terintegrasi dengan ketahanan kesehatan pondok pesantren di masa pandemi COVID-19.

STRATEGI OPTIMALISASI KURIKULUM PESANTREN SELAMA COVID-19

Pada masa pandemi COVID-19, kurikulum pesantren mengalami banyak penyesuaian karena dalam situasi normal, pesantren memiliki kurikulum yang sangat padat. Mayoritas pesantren mengintegrasikan kurikulum pesantren dengan kurikulum nasional yang menjadikan padatnya jam belajar santri. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pembelajaran dan kurikulum di masa pandemi di antaranya penyederhanaan kurikulum (misalnya dari 10 bahasan jadi 8 bahasan saja), hanya untuk menyampaikan materi inti dan pengurangan jam belajar sebagai bentuk adaptasi bagi santri sehingga pembelajaran lebih berorientasi pada proses daripada hasil.

Meskipun demikian, pesantren pun melakukan berbagai upaya optimalisasi kurikulum dengan berbagai strategi misalnya menggunakan variasi media belajar seperti rekaman You Tube, *podcast*, aplikasi pembuat video agar santri dapat lebih mudah memahami pelajaran.

“Ya, materinya guru-guru diminta untuk membuat videopembelajaran, merangkum materi pembelajaran agar lebih padat dan mudah ya kalau anak-anak rada lupa bisa diulang ya. Jadi ketika Zoom bisa lebih Tanya jawab dan diskusi.”³⁹

Selain itu, pesantren juga memaksimalkan penggunaan fasilitas perpustakaan bagi santri yang tinggal di asrama agar bisa mendalami materi pelajaran. Selain itu, guru memberikan perpanjangan waktu pengerjaan *deadline* tugas karena guru menyadari sebagian santri membutuhkan waktu lebih banyak untuk memahami pelajaran akibat pembelajaran daring.

“Kita memberikan kesempatan mereka untuk membaca buku meminjamkan buku dari perpustakaan.”⁴⁰

39 Wawancara Guru, PP RR, 22 September 2021.

40 Wawancara Guru, PP TU, 4 September 2021.

“Eh kita sering ngeluh juga sih ke guru yang ngasih tugas. Tapi gurunya juga mengerti kadang-kadang. Eh apa deadline engumpukan nya itu lama enggak, misalkan hari ini harus dikumpulkan jadi lama, tapi tergantung guru sih kak.”⁴¹

41 Wawancara Santri, PP SI, 4 September 2021.

BAB IV

PERAN PEMIMPIN PEREMPUAN SELAMA PANDEMI COVID-19

Ida Rosyidah

PENGETAHUAN DAN SIKAP PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM KESEHATAN

Pengetahuan pemimpin, termasuk pemimpin perempuan tentang COVID-19, akan sangat berpengaruh pada ketahanan kesehatan di masa pandemi. Alasannya, karena peran kepemimpinan perempuan berkontribusi besar dalam menjaga, mengawasi dan membina santri perempuan dalam implementasi protokol kesehatan. Riset ini menemukan sebagian besar pemimpin perempuan memahami dengan baik tentang apa itu COVID-19 dan cara-cara penularannya. Pada umumnya mereka memahami bahwa COVID-19 adalah virus yang penularannya terjadi melalui droplet. “*COVID itu suatu virus yang menyebar yang asal muasalnya dari Cina*”, ujar seorang kepala pengasuh pesantren.⁴² Pernyataan senada juga disampaikan oleh beberapa pemimpin perempuan di berbagai pesantren lainnya.

Pada tingkat pengetahuan tentang pengertian COVID-19 dan cara penularannya, tidak ada perbedaan pemahaman antara pemimpin perempuan di pesantren yang memiliki latar belakang ekonomi kuat dan lemah, atau pesantren yang ada di desa atau kota. Para pemimpin perempuan dari 15 pesantren yang diteliti menyadari pentingnya menghindari diri dari penularan COVID-19, dan pengetahuan tentang COVID-19 ini menjadi dasar bagi mereka dalam mengemban peran dan tugasnya di pesantren.

Selain itu, sikap pemimpin perempuan di pesantren yang menjadi sasaran penelitian ini secara personal dalam penerapan protokol kese-

42 Wawancara, Kepala Pembina Santri Putri, PP E, 30 September 2021.

hatan sehari-hari pada umumnya sudah relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan mereka terhadap anjuran pemerintah untuk vaksin dan kepatuhan mereka dalam penerapan prokes 5 M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Meskipun ada di antara mereka yang memandang bahwa COVID-19 ini merupakan hasil konspirasi untuk kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu, namun faktanya mereka sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk divaksin. Pada saat penelitian ini dilakukan memang masih ditemukan adanya pemimpin perempuan yang mengaku baru divaksin satu kali. Mereka pada umumnya mengakui bahwa vaksin perlu dilakukan sebagai sebuah ikhtiar bersama untuk *herd immunity* (kekebalan komunitas).

Pendidikan dan Sikap Progresivitas Pemimpin Perempuan dalam Bidang Kesehatan

Perkembangan modernisasi dan globalisasi telah membuka ruang bagi pemimpin perempuan untuk meraih jenjang pendidikan yang tinggi dan akhirnya meraih jabatan tinggi di pesantren. Riset ini menemukan mayoritas pemimpin perempuan di pesantren lulus sarjana baik sarjana S1, S2 maupun S3. Dari 9 orang nyai yang diwawancarai, hanya ada dua orang yang berlatar belakang bukan sarjana lihat tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Terakhir dan Jabatan Pemimpin Perempuan di Pesantren Yang Menjadi Sasaran Penelitian

No	Nama Pesantren	Jabatan Lain	Pendidikan Terakhir	Aktifis
1	PP LA	Ibu Rumah Tangga	S1- Psikologi	Pengurus Muslimat wilayah
2	PP TU	Guru Tafsir	Pesantren Salafi	Tidak Aktif
3	PP BA	Ibu Rumah Tangga	Muallimat	Tidak Aktif
4	PP RL	Guru	S1- Kesmas	Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu
5	PP BS	Pembina Santri Putri	S3-	Tidak Aktif
6	PP RH	Kepala Biro/Bidang <i>International Relation</i>	S2-Komunikasi	Tidak Aktif

No	Nama Pesantren	Jabatan Lain	Pendidikan Terakhir	Aktifis
7	PP SI	Lurah Santri Putri	S2 Manajemen Pendidikan	Tidak Aktif
8	PP RR	Dosen PT- RR	S3 UIN Jakarta	Ketua Salimah & Ketua Presidium BMOIWI
9	PP N	Pembina Putri	SLTA	Tidak Aktif

Sumber: diolah dari data hasil wawancara, 2021

Tabel tersebut menunjukkan kebanyakan pemimpin perempuan di pesantren bukan merupakan sarjana yang berlatar belakang studi keagamaan tapi justru dari lulusan studi umum seperti Kesehatan Masyarakat, Komunikasi, Manajemen Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan lain-lain. Realitas ini juga berlaku pada istri kiai di pesantren yang diteliti. Fenomena ini sangat berbeda dengan realitas nyai dan pemimpin perempuan di pondok pesantren di masa lalu yang harus memiliki pengetahuan agama yang sangat kuat, yang pada umumnya lulusan pesantren salafi.

Sementara itu, pemimpin perempuan yang bukan trah nyai juga memiliki latar belakang pendidikan yang relatif baik. Pada umumnya mereka lulusan sarjana D3 S1, S2 dan S3. Dari 11 orang pemimpin perempuan yang diwawancarai hanya satu orang yang lulus Sekolah Lanjutan Atas (Lihat tabel 3).

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Terakhir dan Jabatan Pemimpin Perempuan di Pesantren yang menjadi Sasaran Penelitian

No	Nama Pesantren	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Aktifis
1	PPE	Pembina Santri Putri	S1-PAI dan S1 Bahasa Arab	Ketua Persistri Daerah
2	PP TU	Kepala Sekolah	S2/Magister Manajemen Pendidikan	Pengurus Muslimat
3	PP RA	Pembina Santri Putri	S1- IPS IAIN Bandung	Tidak Aktif
4	PP A	Pembina/Pengurus Santri Putri	D3 Kesling	Ketua Lajnah Umamahat

No	Nama Pesantren	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Aktifis
5	PP SI	Lurah Santri Putri	S2 Manajemen Pendidikan	Tidak Aktif
6	PP RI	Kepala Bidang Pendidikan	S2-Teknologi Pembelajaran	Tidak Aktif
7	PP RG	Ketua Bidang Sumber Daya Insani	S2 Studi Ilmu al-Qur'an	Pengurus Per-sistri
8	PP RI	Ketua Satgas	Sarjana Pendidikan Dokter	Tidak Aktif
9	PP RA	Ketua Satgas	Sarjana Pendidikan Dokter	Tidak Aktif
10	PP N	Ketua Pembina Santri Putri	SLTA	Tidak Aktif
11	RA	Kepala Sekolah	S2	Tidak Aktif

Sumber: diolah dari data hasil wawancara, 2021

Latar belakang pendidikan tinggi menyebabkan perempuan memiliki *critical thinking* yang memungkinkan pemimpin perempuan berperan lebih besar di pesantren karena mereka memiliki *knowledge authority*. Namun, dari beragam wawancara ditemukan tidak mudah bagi pemimpin perempuan untuk menduduki posisi penting di pesantren, terutama pada pesantren dengan model kelembagaan profesional, bukan kepemilikan. Pemimpin perempuan yang menduduki posisi tinggi, yang secara langsung memimpin kaum laki-laki dan perempuan, dituntut untuk memiliki kapasitas dan karakter sebaik laki-laki.

Salah seorang informan menceritakan pengalamannya untuk berjuang sejak awal menjadi staf di bidang kurikulum, kemudian beralih menjadi kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA dan terakhir menjadi kepala bidang pendidikan yang memenej banyak sub-sub lembaga lainnya seperti perpustakaan, institusi pendidikan SMP dan SMA, *LRC (Learning Resource Center)*, keasramaan dan multimedia.

Pengalaman perempuan di atas menegaskan perempuan perlu membuktikan bahwa mereka mampu melaksanakan beragam tugas yang diemban secara baik, baru kepercayaan untuk memimpin diberikan. Tanpa bukti adanya kompetensi dan kinerja yang baik sangat mustahil perempuan dapat menduduki posisi yang cukup tinggi di pesantren, khususnya pesantren dengan model kelembagaan profesional.

kepala bidang pendidikan merupakan jabatan strategis yang biasanya ditempati oleh laki-laki. Jabatan strategis tersebut baru diraih perempuan setelah perempuan membuktikan bahwa prestasi dan kinerjanya sebaik laki-laki.

AGENSI, POWER SHARING KIAI DAN PEMIMPIN PEREMPUAN

Agensi secara sederhana sering didefinisikan sebagai *the capacity to act* atau kapasitas untuk bertindak atau juga dimaknai "*free will*" or *the making of choices* yaitu bebas bertindak dan bebas mengambil pilihan (Dunn and Powelilliams, 2007). Namun, kapasitas bertindak ini hanya bisa dipahami bila dikaitkan dengan situasi sosial yang spesifik terkait ruang dan waktu seperti negara, institusi sosial, kelompok, budaya, norma-norma agama dan lain-lain (Charrad, 2010). Sementara itu, agensi juga bermakna kemampuan agen-agen sosial untuk keluar dari beragam penindasan struktur (Berger & Luckman, 1966). Agensi belakangan ini juga banyak menjadi kajian feminis. Sebagian Feminis memahami agensi pada pilihan rasional perempuan yang otonom, yang menuntut kebebasan sehingga membuka jalan adanya pemberdayaan perempuan (e.g. Mahmood, 2001). Pembebasan yang dimaksudkan di sini yaitu pembebasan individu dari mitos, tradisi, otoritas irrasional yang diwariskan dari masa lalu baik dalam bentuk "*culture*", "*religion*" dan "*tradition*" yang melembaga dalam beragam struktur sosial yang mensubordinasi dan memarginalisasikan perempuan.

Struktur pesantren baik pesantren dengan manajemen keluarga maupun manajemen profesional pada umumnya didominasi oleh laki-laki. Namun, belakangan ini keterlibatan perempuan di pesantren sudah semakin meningkat. Posisi dan tanggungjawab perempuan sudah makin meluas tidak hanya terbatas sebagai pendamping kiai atau pemimpin pesantren tetapi juga terlibat dalam posisi kunci dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, peran perempuan juga semakin berarti di dunia pesantren.

Perkembangan modernisasi dan globalisasi serta gerakan-gerakan perempuan di Indonesia telah mempengaruhi tumbuhnya kesadaran nyai dan kiai di sebagian pesantren untuk mengubah pola relasi antar mereka. Riset ini menemukan peran nyai dan pemimpin perempuan yang makin menguat. Bila di masa lalu, pola relasi antara kiai dan nyai

pada umumnya terbatas pada relasi suami-istri dengan model komplementer, kini nyai berada pada posisi sebagai mitra suami. Dengan demikian, pola relasi lebih dibangun ke arah pola relasi kerja di dunia publik yang lebih profesional.

Riset ini menemukan nyai dan pemimpin perempuan yang menduduki posisi penting di pesantren seperti kepala biro hubungan internasional, kepala bidang pendidikan, dosen, ketua bidang sumber daya insani, pembina/pengurus/lurah santri perempuan, kepala sekolah santri putri, dan guru sekolah/guru pesantren, dan lain-lain.

Posisi struktural yang tinggi itu bukanlah sebuah hadiah semata-mata dari kiai atau pengurus yayasan, melainkan diperoleh perempuan melalui hasil usaha kerja keras. Ini berlaku tidak hanya pada pesantren dengan model kelembagaan profesional tetapi juga pada pesantren dengan model kepemilikan. Perubahan struktural pesantren dari tradisional menuju ke modern menuntut juga perubahan dalam kelembagaan ke arah manajemen profesional, yang menempatkan seseorang pada jabatan sesuai dengan kapasitas dan profesi yang dimilikinya.

Realitas ini menumbuhkan kesadaran perempuan untuk memperkuat agensinya melalui pendidikan tinggi, dengan begitu mereka bisa bekerja sama dengan semua pihak, baik eksternal maupun internal berdasarkan kapasitasnya bukan karena keturunan seperti anak, istri, ibu atau adik kiai. Dari 9 pesantren dengan model kepemilikan yang diteliti ada 2 (dua) orang nyai yang sudah meraih gelar doktor, 3 (tiga) orang master, (2) orang sarjana (S1) dan 3 (tiga) orang santri lulus pesantren (*salaf/muallimat*). Sementara itu, dari pesantren dengan model kelembagaan profesional, pendidikan terakhir dari pemimpin perempuan yang diwawancarai dalam penelitian ini meliputi yaitu 2 (dua) orang dokter, 3 (tiga) orang *master degree*, 2 (dua) orang sarjana (S1) dan 1 orang lulus D3, 1 orang masih duduk di SLTA.

Salah seorang nyai di sebuah pesantren di Jakarta, misalnya, memperoleh posisi ketua bidang hubungan internasional, bukan semata-mata karena dia istri kiai, tetapi karena S1 nya bahasa Inggris dan S2 nya dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah. Sementara itu, adik perempuan kiai menjadi kepala sekolah Aliyah di suatu pesantren, karena sesuai dengan *backgroundnya* di Magister Manajemen Pendidikan. Dalam penelitian ini juga ditemukan nyai yang tidak memiliki posisi stra-

tegis dan kurang mampu menegosiasikan gagasannya karena tidak memiliki *knowledge authority* yang setara dengan kiai atau ketua yayasan.

Relasi kuasa di 15 pesantren yang diteliti ini pada umumnya memang dimiliki oleh laki-laki, baik kiai atau ketua yayasan. Kuasa perempuan masih sangat terbatas. Realitas ini didukung oleh pernyataan informan nyai dari salah satu pesantren yang mengakui di pesantrennya hampir semua posisi kunci ditempati oleh laki-laki, kecuali posisi kepala biro hubungan internasional yang kini dijabat olehnya.

“Di sini perempuan belum diberikan porsi [yang besar] untuk mengambil kebijakan. Saya akui itu. Jadi kepala biro laki-laki semua. Tapi mereka punya wakil, nah biasanya wakilnya adalah ustazah. Wakil kepala biro pengasuhan putri mereka ada di lingkungan putri dan menangani santri putri. Wakil biro pengasuhan putra juga ada dan lain-lain seperti itu.”⁴³

Namun, nyai dan pemimpin perempuan, yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, di masa pandemi ini tidak tinggal diam. Mereka berusaha menegosiasikan gagasan-gagasannya agar didengar oleh kiai. Seorang nyai, yang menjabat kepala sekolah di Banten menceritakan pengalamannya ketika menegosiasikan gagasannya dengan kiai terkait penggunaan ponsel untuk pembelajaran bagi santri saat pandemi yang memang selama ini dilarang keras. Saat itu, kiai menginstruksikan untuk menggunakan fasilitas komputer milik pesantren, namun dia berargumentasi bahwa komputer yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan seluruh santri. Akhirnya, kiai menyetujui dengan beberapa pembatasan-pembatasan.

Bahkan pada masa pandemi, nyai dan pemimpin perempuan yang memiliki profesi di bidang kesehatan, memiliki *power* yang lebih kuat lagi karena kiai sering mendialogkan persoalan kesehatan dengan nyai dan pemimpin pesantren yang dianggap berkompeten di bidangnya. Salah seorang informan yang berstatus nyai menuturkan pengalamannya, saat pandemi kiai sering mendiskusikan ide-ide terkait *promoting* kesehatan dengannya karena dia kebetulan merupakan sarjana Kesehatan Masyarakat.

43 Wawancara Ketua satgas PP RI, 1 September 2021.

Ketua satgas di salah satu pesantren ternama di Indonesia, yang berprofesi sebagai dokter perempuan, menceritakan usahanya menegosiasikan strategi-strategi untuk penanganan COVID-19. Ketua yayasan dan kiai yang semula kurang responsif pada akhirnya selalu merespon positif ide-ide yang digagasnya.

“...Meskipun saya dokter tapi saya tidak bisa melihat ini COVID atau bukan, saya bilang saya tidak bisa memastikan, kalau tidak diantigen atau PCR saya tidak bisa [mengetahui secara pasti] ini COVID atau bukan, karena dia punya 1000 wajah. Jadi memang sulit apalagi dengan kerapatan anak-anak sendiri. Terlambat memisahkan anak dengan COVID satu hari saja sudah bisa menularkan 3 sampai 5 orang maka testing itu sangat penting. Makanya akhirnya dari yayasan sudah oke. Ini berapa dana, silahkan dipakai, jadi memang nanti Bapak bisa minta wawancara ke humas. Jadi alhamdulillahnya yayasan mensupport ke satgas, jadi apapun kebutuhan kita terkait COVID diapprove.”⁴⁴

Dengan demikian, nyai dan pemimpin perempuan khususnya yang memiliki profesi sebagai tenaga kesehatan mampu mengembangkan keagensiannya untuk melakukan *bargaining power* (daya tawar) dalam kebijakan pesantren, dibandingkan yang tidak. Kapasitas daya tawar ini juga didukung oleh inisiatif, kreativitas, dan keberanian dari nyai dan pemimpin perempuan untuk menegosiasikan gagasannya bagi kemajuan pesantren. Kesadaran itu muncul diperkuat oleh keyakinan terkait adanya *knowledge authority* yang tidak dimiliki kiai atau ketua yayasan.

Bargaining power yang dimiliki nyai dan pemimpin perempuan berhasil juga karena didukung oleh adanya sikap keterbukaan kiai untuk menerima masukan dari pemimpin perempuan. Tanpa adanya keterbukaan kiai, nyai dan pemimpin perempuan lainnya pasti mengalami kesulitan berkiprah demi kemajuan dan ketahanan pesantren di masa pandemi. Peran serta nyai dan pemimpin perempuan pesantren, apalagi yang berprofesi sebagai tenaga medis, bukan hanya pada bidang teknis tetapi juga strategis, sesuai dengan jabatan yang dimilikinya.

44 Wawancara Ketua satgas, PP RI, 1 September 2021.

PERAN PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN

Situasi pandemi COVID-19 telah menyebabkan terganggunya realitas belajar mengajar di berbagai institusi pendidikan. Sejak awal munculnya COVID-19 di awal Maret 2020, banyak pesantren yang secara cepat langsung memulangkan santrinya dan memulai pembelajaran dengan daring. Kondisi ini mengantarkan banyak pemimpin perempuan yang menjadi guru baik di sekolah formal maupun guru di kepesantrenan untuk bisa melakukan pembelajaran melalui beragam teknologi media. Mereka didorong untuk mengikuti beragam pelatihan terkait digitalisasi pembelajaran baik yang diadakan oleh kalangan internal pesantren maupun kalangan eksternal seperti Kementerian Agama atau institusi lainnya. Melalui peningkatan kapasitas digitalisasi tersebut, guru-guru diharapkan dapat menjalankan tugasnya sehingga tercapainya kompetensi santri sesuai dengan yang diharapkan.

Faktanya, sebagian besar pemimpin perempuan yang juga menjadi guru beranggapan sulit untuk tercapainya kompetensi siswa melalui pembelajaran daring karena beragam hambatan seperti kendala jaringan, kuota, dan kesulitan untuk memastikan bahwa santri benar-benar mengikuti pembelajaran. Selain itu, masih adanya guru-guru yang masih gagap teknologi sehingga proses pembelajaran tidak maksimal.

“Banyak yang kadang ada yang terkedala apalagi yang di luar daerah yang dipelosok gitu mesti manjat pohon dulu biar dapat sinyal.”⁴⁵

“Ya tentunya perhatian kita nggak bisa betul-betul memantau anak itu memperhatikan atau enggak, kita nggak tahu.”⁴⁶

Ketika pesantren sudah mulai dibuka dan santri kembali belajar di pesantren, beberapa pemimpin perempuan masih mengeluhkan sulitnya mencapai kompetensi pembelajaran, meskipun pembelajaran sudah mulai berubah dengan metode luring atau *blended*. Ada beragam penyebabnya antara lain yaitu waktu belajar masih terbatas, dan adanya kebijakan karantina saat kedatangan santri atau saat adanya santri yang reaktif dan seluruh siswa satu lorong atau satu asrama harus di *lockdown*.

45 Wawancara Kepala Sekolah, PP RA, 11 September 2021.

46 Wawancara, Lurah Santri Perempuan, PP SI, 09 September 2021.

Selama pandemi, peran nyai dan pemimpin perempuan di pesantren dalam bidang pengasuhan berkurang karena sejak santri dipulangkan ke rumah tugas pengasuhan menjadi tanggungjawab orang tua masing-masing. Nilai-nilai pengasuhan yang diorientasikan untuk pembangunan karakter seperti kedisiplinan, istikamah, kerjasama, kemandirian, sikap toleran terhadap teman, ketaatan dan lain-lain tidak lagi bisa diajarkan. Selain itu, materi-materi pembelajaran yang menjadi kekhasan pesantren juga tidak lagi diajarkan seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris, baca kitab, tafsir, pendalaman fikih, *tahfidz* dan lain-lain. Kalaupun ada upaya-upaya untuk mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran formal, seperti *tahfidz*, tetapi itu dipandang tidak efektif.

Para pemimpin perempuan berpendapat bahwa pandemi telah menyebabkan terjadinya *learning loss*, terutama dalam bidang mata pelajaran dan nilai-nilai pengasuhan yang menjadi *core* pesantren karena saat pandemi yang diprioritaskan hanya mata pelajaran umum. Pada sisi lain, orang tua tidak sepenuhnya bisa melakukan pembentukan karakter berbasis nilai-nilai keislaman di rumah karena pendidikan di rumah tidak sistematis pendidikan di pesantren serta kesibukan yang dimiliki orang tua dalam *me-manage* belajar anak.

PERAN MOTHERING: KERJA DOMESTIK YANG MELEKAT PADA PEREMPUAN (DALAM KESEHATAN)

Penelitian ini menemukan ada cukup banyak peran yang dilakukan nyai dan pemimpin perempuan dalam bidang kesehatan santri antara lain yaitu *mothering*, sosialisasi tentang kesehatan dan meminimalisir hoaks. Isu-isu *mothering* terkait kesehatan yang menjadi tanggungjawab nyai dan pembina asrama khusus putri antara lain yaitu menjaga stamina dan imunitas santri termasuk mengatur dan mengawasi menu makanan, kebersihan lingkungan, pakaian, dan lain-lain.

“Kalau kepala dapur, dia ahli gizi di UNJ. Dia yang mengatur semua menu makanan santri, termasuk untuk menambah imun selama pandemi ini. Saya dilibatkan untuk itu, misal saya minta untuk makanan yang berbau gorengan ya kurangi lah. Antisipasi anak-anak gak batuk ya hilangkan dari menu. Keterlibatan saya non structural. Untuk rapat guru misalnya, rapat yang kecil-kecil, sekarang ada rapat,

*saya melarang ada gorengan. Apalagi gurunya ya sudah tua-tua, kurangi makanan yang gorengan. Menu santri dan guru sekarang jadi lebih banyak yang rebus-rebusan atau kukus yang sekarang diutamakan. Sekarang juga saya minimalis pedas. Dulu 10-30 kg kita belanja cabai ya. Sekarang kita kurangi.*⁴⁷

Pengalaman pemimpin perempuan tersebut menunjukkan bahwa dia memiliki multi peran. Secara struktural, nyai tersebut menjabat kepala biro hubungan internasional, tetapi secara kultural dia tetap terlibat dalam kerja domestik karena *stereotype* yang sudah melekat padanya sebagai seorang perempuan. Meskipun sudah ada ahli gizi yang profesional, namun dia tetap dilibatkan dalam pengaturan menu makanan.

Untuk memperkuat pengetahuan terkait menu makanan yang sehat, beberapa pemimpin perempuan seperti pengurus atau pembina asrama di berbagai pesantren telah mengikuti pelatihan terkait olahan makanan yang murah dan bergizi untuk meningkatkan imun santri. Isu imunitas ini menjadi penting di masa COVID-19 karena itu merupakan upaya pertahanan santri untuk melawan virus yang dapat menyebar dengan cepat di lingkungan pesantren.

Peran *mothering* lainnya yang dilakukan pemimpin perempuan yaitu mengawasi kesehatan santri secara fisik dan psikis, melakukan pengawasan dalam penerapan prokes, mengkoordinir perawatan santri yang sakit, mendengarkan curhatan santri, menjadi mediator yang menghubungkan santri dengan orang tua, memberikan sanksi pada santri yang melanggar prokes dan lain-lain. Beban dan tanggung jawab pemimpin perempuan dalam aspek *mothering* bertambah pada masa pandemi karena adanya tuntutan untuk penerapan prokes yang lebih ketat dibanding sebelumnya. Beban yang berat tersebut menyebabkan kepala pembina santri perempuan sebenarnya bekerja sehari semalam selama 24 jam.

MENGUATNYA PERAN DALAM PROMOSI KESEHATAN

Peran pemimpin perempuan lainnya dalam bidang kesehatan yaitu melakukan promosi kesehatan dengan beragam kegiatan yang bero-

47 Wawancara Kepala Biro Hubungan Internasional PP RH, 30 Agustus 2021.

rientasi untuk memperkuat pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi. Promosi kesehatan yang dimaksudkan disini yaitu serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memelihara kesehatan baik secara individu maupun kelompok. Promosi kesehatan ini menyangkut tiga tindakan yaitu edukasi cara hidup sehat untuk pencegahan penyakit, pengelolaan dan penanganan penyakit.

Beberapa pemimpin perempuan bersama dengan unit lainnya melakukan promosi kesehatan melalui webinar tentang vaksin karena masih banyak orang tua yang melarang anak mereka untuk divaksin. Nara sumber yang diundang beragam, ada ustaz, dokter dan alumni. Sasaran webinar ini tidak hanya santri, tetapi juga wali santri.

Promosi kesehatan juga dilakukan melalui upaya-upaya penggunaan herbal baik untuk tujuan pencegahan maupun pengobatan sebagaimana dilakukan di beberapa pesantren.

“Salah satunya bawang putih, sambiloto. Itu cuma itu aja, jadi kita bahkan seperti mewajibkan mengunyah bawang putih. Dan alhamdulillah itu sangat jitu sampai kemarin dokter RSUD itu sampe heran. Tiga hari setelah anak-anak diswab positif, tapi ya 2-4 hari ya mereka sudah sembuh. Karena begitu ketatnya kita ya, jadi kita jadwalkan. Jam segini harus minum obat, jam segini harus olah raga, jam segini harus minum susu dan lain-lain.”⁴⁸

Kewajiban mengkonsumsi herbal tersebut tidak hanya diberlakukan kepada santri putra dan putri yang terpapar COVID-19 tetapi juga kepada para santri putra dan putri yang sehat. Salah satu pesantren di Bogor mewajibkan santrinya minum herbal untuk menjaga imun, namun pada umumnya mereka menolak untuk mengkonsumsinya. Solusinya, beberapa ustaz dan ustazah pembina asrama melakukan beragam strategi untuk memotivasi mereka mengkonsumsi obat herbal. Salah satunya adalah memberikan ancaman tidak mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan orang tua. Hal ini cukup efektif karena santri terpaksa minum obat herbal yang disiapkan pesantren.

48 Wawancara Nyai BS, 21 Agustus 2021.

Selain obat herbal, beberapa pesantren sengaja menyiapkan vitamin, madu, susu, dan makanan bergizi lainnya untuk menunjang sistem imun. Kebijakan menggunakan herbal untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga dilakukan oleh pesantren-pesantren lainnya dengan memberikan makanan berprotein dan minuman herbal seperti wedang jahe, empon-empon, lemon tea dan lain-lain.

Kebijakan promosi kesehatan lainnya di mana para pemimpin perempuan terlibat dalam proses implementasinya adalah pada sosialisasi, pengawasan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan untuk tujuan pencegahan penularan COVID-19. Para pemimpin perempuan ini selain melakukan sosialisasi prokes juga memastikan ketaatan siswa dalam mencuci tangan, penggunaan *hand sanitizer*, pengecekan suhu tubuh, dan lain-lain. Bahkan beberapa pesantren menetapkan kebijakan *lockdown* yang mewajibkan ustaz dan ustazahnya menetap di pesantren untuk menghindari kontak dengan orang luar. Selain itu, ada pula pesantren yang memberhentikan sementara beberapa karyawannya demi menjaga kesehatan santri atau membuat aturan pemilahan karyawannya menjadi ring 1 (satu), ring 2 (dua), dan ring 3 (tiga). Ring satu itu adalah pegawai yang tinggal di pesantren RI dan berinteraksi langsung dengan santri. Ring 2 adalah yang tinggal di dalam pesantren namun tidak berinteraksi dengan santri. Ring 3 yang tidak tinggal di pesantren dan tidak berinteraksi dengan santri. Dengan demikian, ketahanan pesantren dari paparan COVID-19 dapat terjaga.

COUNTERING COVID-19 SEBAGAI ISU KONSPIRASI

Para pemimpin perempuan juga berperan dalam upaya meminalisir kepercayaan santri bahwa COVID-19 itu hanya konspirasi untuk kepentingan politik dan ekonomi dunia barat. Kepercayaan tentang konspirasi ini masih cukup banyak dianut di kalangan santri, terutama santri laki-laki. Data kuantitatif juga menunjukkan bahwa ada sekitar rata-rata 323,73 santri laki-laki yang percaya konspirasi ini di pesantren-pesantren yang diteliti. Data dari *Forum Grup Discussion* juga menunjukkan beberapa pandangan santri perempuan dan laki-laki yang menyakini COVID-19 sebagai hasil konspirasi:

“Ya kan negara-negara Amerika sering uji coba-uji coba bom militer gitu, jadi ga menutup kemungkinan ini juga ulah mereka gitu.”⁴⁹

“Kalau saya sendiri sudah agak curiga dari awalnya informasinya itu melalui hewan eh yang utamanya itu kelelawar ya, tapi jika dilihat-lihat sekarang hewan mana yang terkena COVID, sedangkan justru ribuan manusia yang terpapar COVID. Nah bingungnya di saya, kenapa yang awalnya virus ini dibawa oleh hewan tapi kenapa hewan mana gitu yang terpapar COVID dari tahun 2019 itu? Jadi saya agak curiga juga dari situ. Apakah ini hanya buatan atau rencana manusia sendiri atau memang musibah alami gitu?”⁵⁰

“Nah kalau itu mungkin saya sedikit setuju bu karena saya juga pernah baca buku Tatanan Dunia Baru kalau tidak salah Novus Ordo Seclorum. Itu kalau enggak salah itu tuh diceritakan kalau misalnya dari zaman dulu itu emang elit-elit global itu udah bikin sesuatu rencana buat depopulasi manusia, kayak tertulis di Stonehenge kalau tidak salah ada 7 pokoknya buat kemajuan umat manusia ke depannya tapi harus salah satunya depopulasi umat manusia, nah caranya itu yang katanya itu kalau misalnya pingin cepet depopulasi manusia itu dengan senjata biologis, nah corona ini kan dari virus gitu, jadi ya bisa jadi aja sih kalau misal benar kayak itu.”⁵¹

Beberapa strategi yang dilakukan nyai dan pemimpin perempuan di pesantren antara lain pertama, membatasi penggunaan ponsel yang hanya bisa digunakan saat mulai pembelajaran formal dan setelah proses pembelajaran usai. Dengan demikian, siswa tidak punya waktu untuk berselancar atau *browsing* informasi-informasi lain. Kedua, membuat aturan bahwa santri hanya boleh mendengarkan dan mengikuti informasi yang diberitakan secara resmi oleh pesantren.

Ketiga, mayoritas nyai dan pemimpin perempuan memberi nasehat dengan bahasa-bahasa agama bahwa COVID-19 itu sebuah bencana

49 FGD Santri PP BA, 26 September 2021.

50 FGD Santri PP RI, 4 September 2021.

51 FGD Santri PP RI, 4 September 2021.

atau ujian dari Allah swt karena manusia sudah melakukan beragam kerusakan di dunia dan wabah pandemi semacam ini sudah ada sejak masa Rasulullah Saw.

Pada umumnya nyai dan pemimpin perempuan juga tidak percaya bahwa COVID-19 adalah buatan Amerika atau negara-negara barat lainnya karena faktanya Amerika dan negara-negara Eropa terserang wabah COVID-19 lebih dahulu dan negaranya sempat *collapse*. Logikanya tidak mungkin mereka akan menghancurkan ekonomi dan kehidupan masyarakatnya sendiri.

Pandangan seperti inilah yang disuarakan dan disosialisasikan nyai dan pemimpin perempuan kepada para santri. Namun, ada pula nyai lainnya yang mengkonter isu COVID-19 sebagai konspirasi dengan memberi saran pada santri agar tidak terpengaruh dengan isu-isu dan gosip yang akan menyesatkan.

Keempat, mendorong santri untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang lebih positif di pesantren. Pemimpin perempuan di salah satu pesantren, mendorong santri perempuan untuk mengisi waktu luang dengan permainan tradisional karena situasi pandemi menyebabkan mereka tidak bisa berolahraga akibat kebijakan *lockdown* yang menutup akses mereka ke sarana olah raga yang ada di luar kompleks pesantren.

Realitas pandemi ini telah mengembangkan kreativitas berbagai pihak khususnya nyai dan pemimpin perempuan agar santri tidak jenuh dan stress akibat adanya pembatasan-pembatasan sosial. Nyai dan pemimpin perempuan di pesantren berusaha menciptakan beragam mainan dan aktivitas untuk membunuh rasa jenuh santri. Misalnya, santri yang isolasi mandiri dikirimkan novel-novel dan buku-buku sastra yang semula dilarang untuk menghindari kejenuhan.

Kelima, mengingatkan santri tentang tujuan utama belajar di pesantren dan bahwa COVID-19 adalah ujian dari Allah dan wabah yang sama pernah terjadi di masa Rasulullah. Mereka mendorong santri untuk bersabar dan meningkatkan spiritualitas melalui memperbanyak zikir, shalawat *Tibbil Qulub*, sholawat *li khomsatun*, mengaji, do'a qunut nazilah, dan lain-lain. Amalan-amalan ini dibaca dengan tujuan menghindarkan diri dari penyakit dan meningkatkan imunitas dari segi religiusitas.

Upaya pemimpin perempuan di pesantren untuk mengkonter kepercayaan terhadap isu konspirasi ini sangat penting karena dari beragam data ditemukan kepercayaan COVID-19 sebagai konspirasi akan berdampak negatif terhadap kesehatan mental atau psikis santri dan pengabaian terhadap prokes. Meskipun demikian, riset ini juga menemukan masih ada pemimpin perempuan yang menjadi sasaran penelitian ini meyakini isu konspirasi, tapi jumlahnya sangat sedikit.

Satu pertanyaan penting yang muncul yaitu dari mana santri mengenal pengetahuan bahwa COVID-19 itu merupakan konspirasi? Kebanyakan santri ketika diwawancarai menyatakan informasi tentang isu konspirasi tersebut diperoleh dari media sosial dan *website* bukan dari guru, nyai dan pemimpin perempuan. Hasil dari pengumpulan data kuantitatif juga menunjukkan sosial media seperti Instagram, You Tube, Twitter, Facebook, dan WhatsApp berpengaruh pada kepercayaan santri terhadap isu konspirasi.

PERAN PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN JARINGAN DAN MEMPERKUAT KETAHANAN PESANTREN

Pemimpin perempuan yang berprofesi di bidang kesehatan dan aktifis dalam organisasi sosial di luar pesantren memiliki peran besar dalam upaya membangun jaringan untuk ketahanan pesantren. Ketua satgas di salah satu pesantren, yang berprofesi sebagai dokter, misalnya, membangun jaringan dengan Universitas Andalas untuk PCR agar bisa meminimalisir pengeluaran pesantren karena saat itu biaya PCR sangat mahal.

Pemimpin perempuan juga berperan dalam membangun network dengan alumni untuk kegiatan edukasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan santri tentang perilaku hidup sehat di masa COVID-19. Mereka melakukan promosi kesehatan melalui kegiatan webinar dengan mengundang para alumni yang sedang kuliah di luar negeri sebagai nara sumber.

“Awal pandemi belum ada webinar, yang masih 45 menit. RH Geet The World. Alumni RH yang belajar di luar negeri di mana saja. Contohnya alumni RH di Jepang kuliah di Tokyo itu temanya kesehatan. Saya tidak memberikan tema beasiswa dan lain-lain.

Kami lebih ke bahas pengalaman mereka di sana, “Kesehatan ala Negeri Sakura”. Bagaimana cara mereka membuang sampah, dan lainnya.”⁵²

Selain itu, nyai dan pemimpin perempuan yang aktif dalam organisasi masyarakat Islam (Ormas Islam) berperan signifikan dalam promosi kesehatan baik untuk menetralsir isu konspirasi atau penolakan terhadap vaksin di kalangan wali santri maupun di masyarakat tempat mereka mengabdikan. Salah seorang pembina santri perempuan yang juga menjabat sebagai aktivis di salah satu organisasi masyarakat, Jakarta Timur menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam kepengurusan membuatnya harus mengikuti perkembangan informasi termasuk fatwa-fatwa tentang vaksin sehingga dia dapat memberikan informasi yang benar kepada santri, wali santri dan jamaahnya. Apalagi saat itu, informasi tentang kehalalan vaksin masih simpang siur.

KIPRAH PEMIMPIN PEREMPUAN UNTUK KETAHANAN PESANTREN

Sebenarnya secara umum tidak ada kebijakan dan strategi khusus yang dilakukan oleh nyai dan pemimpin perempuan yang mempengaruhi ketahanan pesantren karena mereka adalah bagian dari “karyawan” pesantren yang keputusan utamanya ada pada kiai atau ketua yayasan. Namun, peran mereka baik secara struktural maupun kultural dalam mempertahankan pesantren dari gempuran COVID-19 telah turut berkontribusi bagi ketahanan pesantren baik di bidang kesehatan maupun pendidikan. Ada beberapa faktor yang mendorong kontribusi nyai dan pimpinan perempuan dalam mendukung ketahanan pesantren yaitu antara lain:

1. Latar belakang pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor yang mendorong nyai dan pemimpin perempuan mengembangkan keagensiannya untuk berani menyampaikan ide dan mendialogkan gagasannya untuk ketahanan pesantren di masa pandemi. Salah seorang informan menceritakan pengalamannya ketika mengajukan usulan kepada kiai untuk menambah jumlah staf di lingkungan pembina asrama putri yang selama ini hanya dikelola satu

52 Wawancara Kepala Biro Hubungan Internasional PP RH, 30 Agustus 2021.

orang seperti yang dialaminya. Untuk membantu tugas-tugasnya yang cukup banyak, pembina putri tersebut selama ini hanya memperkerjakan anak-anaknya dan santri-santri senior sebagai *unpaid workers*. Ia lalu mengajukan usulannya ke kiai dengan beragam argumentasi dan tahun lalu baru disetujui setelah lebih dari 10 tahun dia bekerja sebagai kepala pembina asrama seorang diri tanpa bantuan guru atau staf lainnya.

Mengapa latar belakang pendidikan tinggi ini menjadi faktor penting karena beberapa nyai dan pemimpin pesantren putri yang berlatar belakang pendidikan yang lebih rendah kurang atau tidak berani untuk menegosiasikan gagasannya kepada kiai. Sebagaimana yang diungkapkan kiai dari salah satu pesantren di Bandung yang menyatakan:

“Istri saya mah enggak bisa ngomong apa-apa dia gimana saya aja.”⁵³

Apalagi nyai dan pemimpin perempuan yang memiliki profesi sebagai tenaga medis atau ahli kesehatan, peran mereka lebih besar lagi karena kiai atau pemimpin yayasan mempercayakan ide-ide untuk ketahanan pesantren, terutama di tingkat implementasinya.

2. Kekkerabatan dan kedekatan emosial juga berpengaruh terhadap peran nyai dalam memberikan ide-ide untuk memperkuat ketahanan pesantren. Nyai di satu pesantren di wilayah Bogor menyampaikan idenya kepada kiai untuk menambah jumlah beasiswa bagi santri yatim piatu atau santri yang terdampak COVID-19. Alhasil, kiai menyetujui sehingga saat ini jumlahnya bertambah dari 50 santri penerima beasiswa menjadi 75 orang. Pengalaman yang hampir sama juga dialami nyai di Banten, yang menjabat kepala sekolah Madrasah Aliyah, yang juga merupakan adik kandung kiai, mendialogkan gagasannya terkait pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengalami pengalihan alokasi sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi, khususnya sesuai dengan ketentuan baru dari Kemendikbud.

53 Wawancara Pimpinan PP BA, 26 September 2021.

Kebijakan penggunaan dana BOS semula diatur dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, namun pada kondisi pandemi COVID-19 kebijakan tersebut disesuaikan dan diubah melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Permendikbud tersebut lebih fleksibel dan memberikan keleluasaan bagi kepala sekolah untuk pemanfaatan Dana BOS yang antara lain dapat digunakan untuk (a) pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar. (b) pembelian cairan atau sabun pembersih tangan dan penunjang kesehatan lainnya. (c) lebih dari 50 persen untuk guru honorer.

Nyai tersebut menyampaikan gagasannya ke kiai untuk menggunakan sebagian dana BOS untuk pembelian masker, *hand sanitizer*, paket data untuk santri dan pembelian disinfektan. Sebagian disinfektan tersebut dimanfaatkan untuk penyemprotan rumah-rumah santri yang tidak mampu, yang tinggal di sekitar pesantren.

“Alhamdulillah kiai setuju. Beliau menyerahkan kebijakan itu pada saya. Jadi enggak ada intervensi untuk pemanfaatannya.”⁵⁴

3. Inisiatif nyai dan pemimpin perempuan dalam promosi kesehatan dan penempatan SDM yang cocok yang secara tidak langsung berimplikasi pada ketahanan pesantren di masa pandemi. Sebagaimana pengalaman seorang nyai di Jakarta yang cukup progressif dalam menanamkan promosi kesehatan karena menurutnya tidak cukup melalui upaya transfer pengetahuan, aturan dan hukuman tetapi seharusnya juga melalui teladan.

“Kalau di kelas [saya] memasukkan perspektif kesehatan di masa pandemi. Saya kalau ngajar, bawaannya banyak. Dulu hand sanitizer, masker ganti, tisu basah. Saya cenderung memberikan contoh [seperti] bangku, dan meja saya semprot disinfektan

54 Wawancara Pimpinan PP BA, 26 September 2021.

*dan lain-lain. Dengan begitu, saya mencontohkan ya.*⁵⁵

4. Inisiatif juga dilakukan oleh seorang nyai di Cirebon, yang membantu kiai menempatkan orang-orang yang cocok dalam struktur kelembagaan sekolah atau kepesantrenan. Sebagaimana dilakukan nyai tersebut di Cirebon.

*“Saya sih enggak punya posisi apa-apa di pesantren. Orang lihatnya saya diam aja di rumah, tapi sebenarnya saya ikut mengerjakan yang tidak kepegang Aa [kiai], yang detil-detil, seperti menentukan pembimbing asrama, ustaz atau ustazah, pendamping satgas. Saya juga yang menempatkan siapa yang cocok membantu kepala sekolah, karena biasanya kepala sekolah seringkali mengangkat yang cantik-cantik aja biar enak dibawa ke Dinas katanya. Kalau saya profesional. Saya lihat siapa yang rajin meski tidak cantik saya tempatkan jadi pembimbing di asrama atau staf di sekolah. Nanti kalau sudah saya buat rancangannya, itu saya tanyakan ke Aa dan Aa biasanya setuju. Kalau kepala sekolah memang ditunjuk, eh diangkat kiai, tapi bawahannya kan enggak karena kiai sibuk, gak kepegang. Ini saya lakukan sendiri, enggak pernah disuruh sama Aa [kiai].”*⁵⁶

Kehadiran pembimbing asrama ini sangat penting apalagi di masa pandemi, karena mereka yang mendampingi langsung santri dalam proses belajar mengajar, termasuk pembangunan karakternya, sehingga bila ada santri yang sakit atau perilaku santri yang kurang sesuai dengan aturan pesantren, pembimbing asrama yang akan bertanggung jawab. Setiap kamar terdiri dari 20 orang santri dengan satu orang pembimbing yang tinggal bersama mereka.

Atas dasar itulah, nyai tanpa sepengetahuan mereka mengamati kinerja pembimbing asrama dan membuat catatan-catatan sehingga ketika terjadi rotasi atau pengangkatan jabatan dia sudah memiliki petanya. Bahkan, nyai juga berinisiatif untuk mengangkat

55 Wawancara Kepala Biro Hubungan Internasional PP RH, 30 Agustus 2021.

56 Wawancara Nyai PP LA, 30 September 2021.

dua orang pegawai khusus yang akan mencatat perilaku dan ketekunan ibadah dari para pembimbing dan ustaz/ustazah di pesantrennya.

“Saya juga meminta kedua pegawai saya mencatat kehadiran para pembimbing asrama, ustaz/ustazah, apakah mereka hadir ke masjid apa tidak setiap sholat. Kalau mereka absen kena sanksi. Sanksinya ya didenda 10.000 untuk tiap kali absen tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi kalau bolos 8 kali sholat jamaah ya kena dipotong gajinya 80.000.”⁵⁷

5. Kesabaran dan kedisiplinan para pembina santri putri telah berdampak pada rendahnya angka santri perempuan yang terdampak COVID-19 di semua pesantren yang diteliti. Sikap-sikap ini dibutuhkan dalam upaya menghindari santri dari COVID-19.

“Iya, dulu memang pernah awal-awal, yang alhamdulillah kita [santri perempuan/akhwat] nol persen, kalau ihwan itu sampai 131 yang kena [COVID-19], sampai kita akhirnya dari Dinas Kesehatan sini mengalokasikan ke rusunawa, rusun yang bekas kepolisian yang kosong untuk dipakai santri ke sana [untuk isolasi]. Jadi kita kayak punya pesantren baru di sana.”⁵⁸

Meskipun diakui bahwa ada faktor-faktor lainnya yang juga berperan dalam rendahnya santri perempuan terpapar COVID-19 antara lain santri perempuan lebih taat dibandingkan santri laki-laki, lokasi asrama perempuan jauh dari pintu masuk pesantren sehingga santri perempuan tidak memiliki kontak langsung dengan dunia luar, santri laki-laki banyak melakukan aktivitas olah raga yang memungkinkan mereka tidak nyaman menggunakan masker seperti sepak bola, voli dan lain-lain, sementara santri perempuan tidak. Faktor lainnya yaitu santri perempuan memakai cadar dan itu berdampak positif untuk perlindungan diri dari COVID-19.

57 Wawancara Nyai, PP LA, 30 September 2021.

58 Wawancara Kepala Pengurus Pesantren Putri, PP A, 14 September 2021.

“Mungkin ini, dengan pemakaian cadar juga mungkin alhamdulillah, dan putri cenderung menjaganya lebih [baik] untuk [pemakaian] masker. [Selain itu], pakai cadarnya juga kami menghibau, bukan agak keras [memaksakan] ya. [Putri], gampang diatur ya, eh beda ama putra, kalau main bola tuh mudah [melepas masker] di mana saja, tapi yang ana lihat ya udah sembarangan gitu, makanya lebih cepat terpapar kemarin itu...Kalau ketika pembelajaran itu wajib karena banyak ustaznya laki-laki. Tidak semua yang mengajar itu ustazah tapi ustaz sehingga untuk memudahkan pengajaran kita pakai hijab secara keseluruhan tetapi akhirnya yang putri itu yang pakai cadar sehingga terjaga ada ustaznya, jadi wajib di kelas untuk memakai walaupun misalkan ada masker silahkan pakai masker kalau pakai masker tidak pakai cadar tidak masalah.”⁵⁹

Selain itu, ketahanan pesantren juga tergantung kepada kemampuan nyai dan pemimpin perempuan untuk membangun jaringan dengan berbagai pihak seperti alumni, afiliasi organisasi dan institusi kesehatan. Pengembangan jaringan di masa pandemi ini lebih banyak dilakukan oleh nyai yang berlatar belakang profesi di bidang Kesehatan.

Ketahanan dapat berjalan melalui proses dari waktu ke waktu melalui berbagai cara dan lintas sistem. Ketahanan pesantren tentu tidak hanya tergantung pada kiai atau ketua yayasan sebagai pengambil kebijakan utama tetapi juga pada semua unit yang telah bekerja untuk bahu-membahu meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap situasi pandemi ini, termasuk di antaranya peran nyai dan pemimpin perempuan lainnya yang telah berkontribusi besar bagi ketahanan pesantren.

59 Wawancara Kepala Pengurus Pesantren Putri PP A, 14 September 2021.

BAB V

AKTUALISASI PESANTREN DALAM MEMBANGUN TOLERANSI & MENANGKAL RADIKALISME SELAMA PANDEMI COVID-19

Alvin Noor Sahab Rizal

PERAN KIAI DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER DAN RELIGIUSITAS DI PESANTREN SELAMA PANDEMI COVID-19

Pada dasarnya, pondok pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan yang mengkhususkan perhatiannya pada pengembangan nilai-nilai budi pekerti dari segi nilai bangsa terutama agama (Islam). Hal ini dilihat dari metode pengajaran yang tidak hanya terpaku pada pengembangan kognitif, akan tetapi juga memperhatikan segi psikomotorik dan afektif dalam diri siswa. Sehingga sangat wajar Sauri mengatakan bahwa pesantren lebih efektif dalam pembinaan karakter bila dibandingkan dengan pendidikan karakter yang terdapat di persekolahan (Sauri, 2011).

Dengan memprioritaskan pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik, pesantren mampu mencetak generasi yang cerdas dalam berintelektual dan memiliki akhlak karimah. Kepatuhan terhadap pemimpin pesantren disebut kiai maupun ustaz dalam lingkungan pesantren adalah salah satu akibat dari penanaman nilai Islam yang mengajarkan untuk bersikap baik terhadap kehidupan bermasyarakat terutama kepada orang yang telah mengajarkan keilmuan (Wirosukarto, 2000). Hal ini merupakan nilai plus tersendiri, bahkan Zamakhsyari (2004) mengatakan bahwa sikap *takzim* yang abadi dalam kehidupannya merupakan ciri khas yang paling eksotis ketika peserta didik mengenyam pendidikan di pesantren.

Jika diperhatikan terhadap fenomena *takzim* yang tertanam dalam diri santri, maka sejatinya perilaku tersebut tidak pernah diperin-

tah oleh sang guru maupun ustaz di pesantren untuk taat kepadanya. Hanya saja, santri menganggap dirinya merasa kecil dan kurang dalam segi keilmuan dibandingkan gurunya yang telah mumpuni. Selain itu, sikap *takzim* juga merupakan bentuk terima kasih dari santri kepada gurunya karena telah mengajarkan banyak ilmu serta membina dengan penuh rasa sabar dan sayang sehingga terciptalah kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Akhlak Karimah). Fenomena *takzim* ini menjadi ciri khas dalam pesantren, namun ada beberapa pesantren lain yang tidak memiliki fenomena semacam ini. Hal ini disebabkan adanya pergeseran terhadap paradigma yang dibangun atas beberapa faktor, salah satunya yakni adanya tuntutan keadaan.

Atas dasar inilah, metode pendidikan karakter yang terdapat di pesantren kemudian mendapat perhatian dari kalangan pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya pembuktian berupa lulusan yang mempunyai nilai moral yang baik meskipun fasilitas dalam pengajaran di beberapa pesantren belum memadai. Berbanding terbalik ketika berbicara mengenai lembaga pendidikan umum di mana memiliki modul pembelajaran yang sistematis sehingga secara otomatis lebih mengedepankan kecerdasan intelektual daripada kecerdasan berperilaku karimah.

Berbicara mengenai karakter, Simon Philips (2008) memberikan definisi sebagai sebuah perilaku, sikap, dan pemikiran yang dilandasi oleh sebuah sistem yang dilahirkan dari berbagai kumpulan tata nilai yang diperoleh individu. Adapun Doeni Koesoema (2007) menyebut karakter sebagai sebuah kepribadian. Kepribadian tersebut merupakan sebuah identitas dari segi sifat seseorang yang terbentuk dari berbagai macam faktor, seperti sifat turunan genetik dan lingkungan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Bila dikaitkan dengan konsep pendidikan, maka sejatinya pendidikan karakter terhadap suatu individu merupakan tujuan utama dari sebuah pendidikan. Meskipun dalam hal ini, ada beberapa pendapat yang bertentangan di mana pendapat pertama berkeyakinan bahwa sebuah karakter akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan berkembangnya manusia, sehingga pembinaan karakter tidak perlu dilaksanakan. Sementara pendapat lainnya mengatakan bahwa karakter atau perilaku harus dibentuk dan dibina sedemikian rupa untuk menghasilkan perilaku yang sesuai dengan tatanan agama dan negara. Bahkan, Imam

Ghazali sebagaimana dikutip oleh Fathiyah Hasan (1986) menegaskan bahwa pendidikan, nasihat, ataupun aturan-aturan lainnya akan menjadi sia-sia apabila karakter yang terdapat dalam diri manusia tidak dapat diubah.

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak diterima oleh masyarakat adalah pendapat yang kedua. Hal ini dibuktikan dengan terciptanya lembaga pendidikan yang terlaksana di setiap lapisan masyarakat. Bahkan seiring berkembangnya zaman, dapat ditemukan berbagai jenis lembaga pendidikan di seluruh penjuru dunia. Andaikata karakter tidak dapat dilatih atau dididik, maka lembaga pendidikan juga tidak akan berkembang seperti saat ini. Karena sejatinya, pendidikan bukan hanya membina secara intelektual saja, akan tetapi juga membina sikap manusia ke arah yang baik.

Salah satu ciri yang terdapat dalam pendidikan adalah ada yang menerima ilmu atau disebut murid dan yang mengajarkan ilmu atau disebut guru. Dalam ruang lingkup pesantren, seorang kiai mempunyai urgensi yang signifikan dalam proses pembentukan karakter pada santri. Selain sebagai pengajar, seorang kiai juga memiliki beban lain yakni menjadi pengasuh atau pengganti orang tua dari peserta didik. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi para kiai mengingat mereka juga memiliki kesibukan lainnya. Untuk itu, para kiai harus mempunyai strategi yang tepat dalam membentuk akhlak karimah.

Salah satu strategi yang dilakukan para kiai dalam mencetak akhlak karimah adalah dengan memberi contoh. Dalam hal ini, para kiai akan ikut andil melakukan perbuatan yang ingin mereka tanamkan kepada para santri, seperti bersikap dermawan, sopan santun, dan beradab, sehingga tidak terkesan memerintah. Dengan demikian, santri akan mudah memahami sekaligus mengaktualisasikan perilaku tersebut dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang ia lihat dari kiainya.

Strategi keteladanan ternyata merupakan strategi yang paling efektif dilakukan dalam rangka membentuk perilaku manusia. Sulaiman (2016) menjelaskan bahwa perilaku memberi contoh kepada santri akan sesuatu ternyata memiliki pengaruh besar dibanding hanya sekedar memerintah atau memberi tahu sesuatu tanpa tindakan. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh kiai di PP N;

“Jangan idealis jadi pemimpin. Kita bertahap dalam memberikan pengajaran. Yang penting kita memberikan pengarahan pendidikan, pengarahan materi, pengarahan pengajian untuk membangkitkan semangat Taqarrub, kemudian semangat ibadah, itu nanti juga muncul dengan sendirinya. Santri tidak harus dipaksa.”⁶⁰

Dengan memberi teladan, santri akan terangsang secara kognitif dan sensorik sehingga akan membekas lebih lama dalam ingatannya. Strategi keteladanan ini juga dilakukan oleh Rasulullah saw dalam mengajarkan dan mengamalkan nilai Islam kepada umatnya. Sehingga sangat pantas jika beliau menyandang predikat sebagai suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia, sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Sejatinya, karakter yang dibangun oleh para kiai terhadap santri di lingkungan pesantren adalah karakter yang berlandaskan Islam. Akan tetapi, tujuannya bukan berarti hanya terpaku pada manfaat urusan agama saja melainkan juga meliputi urusan dunia lainnya terutama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemunculan pandemi COVID-19 menimbulkan kekacauan pada seluruh sistem kehidupan manusia. Salah satu dampak yang terjadi di pesantren ialah pada sisi peningkatan karakter religius santri. Disebut berdampak karena pada awalnya peningkatan karakter religius santri menjadi tanggung jawab kiai dan ustaz/ustazah saat berada di pesantren, namun dengan sistem pembelajaran jarak jauh peningkatan karakter religius santri yang seharusnya menjadi tanggung jawab kiai dan ustaz/ustazah kini tidak lagi memiliki kontrol dan akses yang luas untuk mengorganisasi religius santri, sebab keduanya terpisah oleh lokasi dan jarak.

⁶⁰ Wawancara Pimpinan, PP N, 31 Agustus 2021.

Tanpa adanya karakter religius maka seseorang akan menjalani kehidupan layaknya seseorang yang tidak memiliki agama. Untuk itulah penanaman karakter religius perlu dilakukan sejak dini. Peningkatan karakter religius Sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab guru saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab orang tua, Bahkan ketika di rumah orang tua lah yang bertanggung jawab secara penuh untuk peningkatan karakter religius anaknya.

“Peningkatan keimanan menjadi tugas kita sejak sebelum pandemi sudah kita lakukan. Kalau disini pasti shalat fardhu berjamaah sudah dilakukan, malam juma’at nya baca yasin, dan mendirikan shalat dhuha sebelum masuk kelas. Jadwal shalat malam bergilir tiap kelas dan setiap habis shalat membaca qunut nazilah. tujuannya bagaimana agar kita terhindar dari berbagai penyakit, dan diselamatkan di dunia dan akhirat. Terutama sebagai pendidikan dan tingkatin iman anak-anak. Menjaga prokes dan menambah keimanan juga.”⁶¹

Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini seorang santri berusaha melawan kondisi ketidakpastian. untuk melawan kondisi tidak nyaman dalam dirinya, dengan meningkatkan religiusitas dalam diri akan memberikan kondisi ketenangan jiwa. 85,3% seseorang mengalami peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt selama pandemi COVID-19. Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pandemi COVID-19 di antaranya; sering berwudhu, lebih sering membaca al-Qur’an, membaca qunut nazilah, berdzikir, shalat sunnah malam, dan berinfaq.

Individu dengan religiusitas tinggi tentu akan memunculkan perasaan bahagia, senang, puas, merasa aman yang pada akhirnya akan mengacu pada ketenangan batin sehingga mampu meningkatkan daya tahan seseorang dalam mengatasi ketegangan-ketegangan akibat permasalahan yang dirasakan berat dan menekan. Dengan demikian individu dengan religiusitas yang tinggi dianggap memiliki pedoman untuk merespon hidup dan mempunyai daya tahan yang lebih baik dalam mengelola permasalahan yang dihadapi.

61 Wawancara Kepala Sekolah, PP RL, 8 September 2021.

SPIRIT TOLERANSI SANTRI DAN HARMONISASI SOSIAL SELAMA PANDEMI COVID-19

Persoalan terhadap pesantren selalu menjadi isu menarik dan hangat diperbincangkan oleh para cendekiawan. Hal ini dikarenakan pesantren memiliki ruang yang cukup luar untuk dikaji sehingga mendapat perhatian yang cukup intens dari berbagai bidang akademisi. Selain itu, ciri khas yang melekat pada pesantren membuat lembaga pendidikan ini menjadi primadona dari lembaga pendidikan lainnya. Bahkan penelitian sebelumnya mengatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan asli Indonesia sekaligus lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia (Mujamil, 1998).

Pesantren muncul sebagai akibat adanya pengaruh Islam yang pada saat itu merupakan kondisi genting dalam melakukan penyebaran Islam di tanah air Indonesia. Oleh karena pesantren merupakan lembaga pendidikan tua yang masih bertahan hingga saat ini, maka tidak mengherankan bila pesantren memiliki karakteristik tersendiri baik dari segi sistem pendidikan, sejarah perkembangan, atau bahkan paradigma dari orang yang menempati pesantren.

Bertahannya pesantren hingga saat ini merupakan prestasi gemilang yang patut dibanggakan. Dalam perjalanannya, pesantren selalu dihadapkan dengan peradaban yang terus berubah dari masa ke masa. Agar tidak tenggelam dalam tatanan kehidupan yang terus berkembang, pesantren dituntut untuk terus beradaptasi dan berbaur seiring berkembangnya zaman. Pesantren saat ini bukan hanya sebagai wadah dalam mendalami ilmu agama tetapi juga sebagai penggerak *agent of change* dalam kemaslahatan bermasyarakat. Dengan kata lain, pesantren turut bertanggung jawab dalam menciptakan tatanan masyarakat yang sesuai dengan pancasila. Terbukti dengan adanya misi tersebut, pesantren dapat diterima hingga saat ini sebagai lembaga pendidikan yang mampu menjawab tantangan dalam memperbaiki sistem masyarakat sekaligus menanamkan nilai-nilai humaniora dengan landasan agama Islam sebagai perubahan menuju kehidupan yang paripurna.

Namun, misi sebagai dinamisator dan katalisator dalam pembangunan masyarakat tidak serta merta membuat pesantren kehilangan identitas dirinya. Akan tetapi, justru karena adanya penambahan misi tersebut menjadikan pesantren semakin kaya akan budayanya (Abdur-

rahman Wahid, 1995). Hal ini dikarenakan pesantren menempatkan posisinya sebagai sebuah kapas yang dapat menyerap tanpa merusak jati dirinya. Oleh karena itu, akan menduduki kultural tertinggi dari masyarakat lainnya, sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Abdurrahman Wahid bahwa pesantren tidak akan tumbang atau tenggelam dimakan zaman disebabkan pesantren memiliki kultur tersendiri dan pola kehidupan yang unik dengan menggunakan nilai-nilai yang dibuatnya sendiri yang mana hal ini dapat membuatnya bertahan sepanjang zaman.

Salah satu bentuk sinergi yang terjadi antara pesantren dengan masyarakat dapat dilihat dari adanya upaya terhadap pengembangan mengenai toleransi beragama. Terkait ini, pesantren memang telah mendalami tentang apa yang dimaksud dalam toleran beragama. Hal ini dapat dilihat beberapa referensi pembelajaran dari pesantren seperti kitab kuning (*Kutub al-Shafra*), tasawuf, fikih dan sebagainya yang merupakan pondasi dalam pendidikan khususnya mengenai toleransi. Sayangnya, tidak semua santri dapat mengamalkan nilai tersebut kepada masyarakat bahkan beberapa pesantren telah menghilangkan adanya pembelajaran kitab kuning ini. Salah satu penyebabnya adalah karena minimnya teladan atau jarang dicontohkan.

Mengingat di pesantren merupakan lingkungan yang secara keseluruhan menganut agama Islam, tidak menutup kemungkinan hal tersebut menjadi problematika tersendiri bagi santri, meskipun secara konsep mereka sangat paham betul tentang menghargai umat beragama. Sehingga, pengaplikasian nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari dapat dikatakan masih kurang dilaksanakan karena tiadanya pembiasaan di lingkungan pesantren tersebut. Untuk itu, pesantren berupaya untuk mengenalkan para santrinya terhadap kondisi dan situasi yang berbeda sehingga terjadi pembiasaan dalam pengaktualisasian nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sosial.

Saat terjadinya pandemi COVID-19 pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia tentunya tidak diam. pesantren turut serta membantu penularan tidak hanya pada santri dan ustaz/ustazah saja, melainkan elemen masyarakat yang ada di sekitarnya diberikan arahan baik melalui dakwah maupun memfasilitasi vaksinasi. Pesantren juga membantu umat agama lain sebagai wujud multikultural

antar sesama umat manusia di tengah bencana. 97,3% para santri menyatakan akan membantu teman beda agama yang terpapar COVID-19.

“Walaupun kita ada perbedaan antar agama, tapi kan dalam Islam kita diajarkan untuk saling membantu tanpa peduli apa agamanya, yang penting berbuat baik. Sebaiknya kita membantu sekitar kita, karena dari situ juga orang akan memandang umat muslim seperti apa.”⁶²

Dengan adanya upaya tersebut, Persentren diharapkan mampu menjadi pesantren pluralis yang dapat memenuhi beberapa syarat. Pertama, menjadi *religious studies center* di lingkungannya. Kedua, kompendium yang dimiliki pesantren mencakup hubungan antar agama dalam porsi yang besar. Ketiga, terjalinnya silaturahmi yang baik antara kiai dan tokoh agama lain. Keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik dari agama luar untuk belajar di dalam pesantren meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Kelima, adanya kebijakan untuk mengadakan atau menerima kunjungan dari agama lain. Keenam, para pengurus pesantren benar-benar memahami mengenai istilah penting yang sering digunakan seputar hubungan antar agama seperti inklusifisme, plurarisme, dan lain sebagainya. Ketujuh, para santri telah menunjukkan sikap toleransi ketika berdialog dengan non muslim. Kedelapan, lahirnya berbagai karya yang berkaitan dengan toleransi dan sejenisnya.

Untuk mencapai kriteria di atas, pesantren melakukan upaya dengan mengadakan berbagai kegiatan terkait hal yang menunjang toleransi secara intensif dan kontinu. Misalnya, sering berkunjung ke tempat ibadah agama nonIslam, bergaul atau bahkan dapat bertukar pikiran dengan teman nonmuslim terkait masing-masing agama dengan catatan telah memahami doktrin agama sendiri, dan lain sebagainya.

Dengan terlaksananya program ini, maka akan terjadi pembiasaan dalam diri santri yang mana kemudian akan melahirkan karakter yang tertanam berupa toleransi terhadap umat antar agama. Pembiasaan ini tentu akan sangat berguna demi terciptanya kehidupan yang rukun dan harmonis dalam beragama yang mana akan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat secara luas atau bahkan secara internal seperti keluarga. Karena bagaimanapun juga, penanaman nilai-nilai kemanusiaan khu-

62 FGD Santri, PP RH, 13 September 2021.

susnya terhadap toleransi sejak dini merupakan hal yang sangat penting dan paling mudah dalam membentuk karakter anak. Mengingat anak diibaratkan oleh sebuah kertas yang masih putih sehingga sangat memungkinkan untuk menyerap berbagai nilai kehidupan yang diajarkan sesuai dengan norma agama dan negara.

Pembiasaan yang terus distimulasi oleh kedua orang tua akan menghasilkan pola pikir yang baik ketika beranjak dewasa. Artinya, anak akan mudah memahami bahwa akan ada banyak keyakinan dan kebudayaan yang berbeda dari dirinya sehingga ia harus mampu menempatkan dirinya untuk selalu bersikap rukun dan damai. Berbeda dengan anak yang tidak mendapat pembiasaan sejak dini, mereka akan sering menemukan *shock culture* karena ketidaktahuannya tentang keberagaman baik dari segi agama maupun budaya. Akibatnya, mereka bisa saja tidak dapat menerima dan memahami kultur orang yang berbeda dengannya yang mana nantinya dikhawatirkan dapat menimbulkan sikap radikal. Karakter seperti inilah yang menjadi *boomerang* bagi masyarakat lainnya karena bertentangan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk beragama dan makhluk bersosial.

Selain bermanfaat bagi keluarga, pesantren dapat dijadikan ajang *role model* bagi lembaga pendidikan lainnya. Bila dilihat dari perjalanan pesantren saat ini, banyak ditemukan kasus tuduhan negatif yang dilontarkan kepada pesantren sebagai lembaga yang menghasilkan teroris, menanamkan doktrin intoleran serta membiasakan untuk bersikap radikal. Hal ini tentu dapat merugikan pesantren dan merusak citranya sebagai lembaga yang berlandaskan Islam yang damai. Maka dengan adanya upaya pengembangan toleransi beragama yang digerakkan oleh pesantren ini, *image* negatif pesantren perlahan akan menghilang dengan sendirinya, justru akan berbuah hasil menjadi pusat pengembangan toleransi beragama.

Adapun manfaat selanjutnya yakni ditujukan kepada masyarakat luas. Ini merupakan tujuan paling penting dalam terselenggaranya pengembangan toleransi beragama. Ketika pembiasaan itu terus dilakukan secara berkala dalam pesantren, maka ia akan menjadi manusia yang mempunyai jiwa pluralis dan toleran. Sikap ini akan memberikan kekuatan menular kepada siapa saja yang berinteraksi dengannya sehingga kemungkinan besar lawan bicaranya akan merasakan manfaat

dari sikap toleran dan tergerak hatinya untuk memiliki sikap toleran kepada orang lain.

PENGAJARAN DI PONDOK PESANTREN DALAM MENCEGAH FAHAM RADIKALISME DAN MASUKNYA KONSPIRASI

Maraknya aksi intoleransi dan radikalisme di dunia maupun Indonesia dengan atas nama umat Islam menjadikan Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* mengalami sorotan negatif. Doktrin jihad yang diajarkan dalam Islam seringkali mendapatkan tuduhan sebagai sumber terjadinya kekerasan. Lembaga pesantren juga terkena dampak atas tuduhan tersebut. Lembaga pendidikan Islam tertua dalam sejarah Indonesia digelorakan sebagai wadah atau pusat pembelajaran Islam fundamental yang kemudian menjadi akar bagi gerakan radikal mengatasnamakan Islam.

Fakta bahwa sebagian besar pelaku radikalisasi dan aksi terorisme atas nama Tuhan di Indonesia merupakan alumni pesantren tidak dapat dihindarkan. Namun, mengingat karakteristik dan pola perkembangan lembaga pendidikan Islam Indonesia yang sangat beragam, jelas merupakan kesalahan mendasar untuk memandang semua lembaga pendidikan tersebut sebagai sumber ajaran radikalisme dan teroris. Selain itu, hasil beberapa survei menunjukkan bahwa pondok pesantren di Indonesia sangat berbeda dengan lembaga pendidikan sejenis di negara lain.

Secara umum gerakan radikal Islam sebagai bagian dari gerakan Islamisme global dapat ditelusuri akar keberadaannya dari pemikiran pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Bana (1906-1949), di Mesir dan pendiri Partai Jamaat-Islami, Abul A'la Al-Maududi (1903-1978), di India. Ideologi Islamis ini makin mengental di bawah penajaman pemikiran yang digagas Sayyid Quthb melalui beberapa karyanya. Tawarannya tentang jihad sebagai upaya menegakkan berlakunya *Hakimiyyat Allah* (tegaknya hukum Allah sebagai satu-satunya pengatur kehidupan) menjadi basis dari hampir semua ideologi jihadis di dunia. Ideologi ini kemudian melahirkan sejumlah gerakan sempalan yang beraliran keras (semisal, Jamaah al-Takfir, Jamaah Islamiyyah, dsb) dan berkembang secara internasional termasuk ke sejumlah negara seperti Indonesia (Bubalo, 2007).

Dalam konteks sejarah Indonesia, gerakan Islam radikal sering dikaitkan dengan DI/TII yang dipimpin oleh R.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Benih-benih ideologi tersebut, dipadu dengan kebebasan yang berkembang pesat di era Reformasi, dengan mudah memunculkan ide-ide baru, termasuk ideologi radikal ala Timur Tengah yang banyak melahirkan gerakan-gerakan Islam di dalam negeri, baik yang masih mengusung nama asli gerakan tersebut, maupun sebatas ideologi (Hafid, 2020). Gerakan-gerakan yang ada juga bervariasi dalam sifat dan ruang lingkup di tingkat lokal dan nasional. Perkembangan gerakan Islam transnasional ini, ditambah dengan faktor lokal di Indonesia, telah menyebabkan beberapa gerakan radikalisasi dan terorisme selama ini.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H, meneropong sejumlah alasan munculnya gerakan radikalisme Islam di Indonesia, antara lain; adanya korupsi, kemiskinan, globalisasi, dan sejarah (BNPT.go.id, 2020). Pandangan serupa disampaikan Muhammad Tholhah Hasan, menilai pada awalnya gerakan intoleransi dan radikalisme di Indonesia terutama pasca reformasi disebabkan peranan media internet (IT), konstalasi politik internasional, dan kondisi sosial domestik (Hasan, 2010).

Korupsi sebagai bentuk penyimpangan keuangan negara oleh oknum penguasa juga terus menjadi fenomena dalam kehidupan bernegara. Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perceptions Index (CPI)* yang dikeluarkan oleh *Transparency International* sejak 1995 selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang dipersepsikan sangat korup, tidak jauh dari negara berperingkat terendah. Data tahun 2020, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi 102 (dari 180 negara yang disurvei) dengan nilai 37 atau setara dengan Gambia, dan Kepulauan Solomon. Posisi ini menjadikan Indonesia kalah kompetitif dibandingkan negara tetangga seperti Timor Leste dengan nilai (40), Malaysia (51), Brunei Darussalam (60), Singapore (85). Selain ikut memiskinkan masyarakatnya, korupsi secara langsung juga berdampak pada makin rendahnya keyakinan akan kapasitas negara dalam menjalankan tugasnya sehingga bujukan halus untuk mendirikan negara Islam dengan berbagai kelebihan dan keutamaannya menjadi lebih mudah menemukan massa pendukung.

Pada saat yang sama, kemiskinan menjadi lahan subur bagi benih-benih aktivisme keagamaan, mengingat kelompok masyarakat ini sangat rentan terhadap bujukan dan godaan yang berujung pada aksi teror. Banyak orang Indonesia menghadapi kehidupan yang sulit karena kegagalan negara untuk memenuhi misi kesejahteraan dan tekanan ekonomi kapitalis. Alhasil, lahan subur untuk mengajaka menuju kehidupan yang lebih baik melalui jihad menjadi ancaman. Kemiskinan memang merupakan fenomena yang menyedihkan dalam kehidupan berbangsa saat ini. Sejak reformasi dan keterbukaan, puluhan juta orang hidup dalam kemiskinan. Data resmi yang tersedia menunjukkan bahwa per September 2021, 26,50 juta orang atau (9,71%) hidup di bawah garis kemiskinan. Upaya pemberantasan radikalisme akan sangat sulit selama kemiskinan terus berlanjut.

Sementara itu, masyarakat agaknya menjadi sensitif ketika berbicara hal-hal yang berkaitan dengan identitas yang mereka miliki. Hal-hal yang berkaitan dengan agama, suku, budaya, ras, dan sebagainya yang sepatutnya menjadi hal yang dibanggakan justru menjadi sulutan api yang memunculkan banyak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa selain pemerintah gagal dalam menangani masalah kemiskinan yang terjadi, mereka juga telah gagal dalam menciptakan kedamaian dalam masyarakat bermajemuk.

Munculnya beberapa perspektif mengenai gerakan radikal yang dilontarkan kepada pesantren merupakan salah satu minimnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini dikarenakan pesantren yang berkembang di Indonesia memiliki karakter tersendiri yang jelas perbedaannya bila dibandingkan lembaga pendidikan lainnya. Padahal jika diperhatikan dengan seksama, perilaku *ta'zim* terhadap gurunya merupakan bukti nyata bahwa di dalam pesantren terdapat pengajaran yang baik dan damai. Hal ini juga sejalan datangnya Islam di negeri nusantara yang tidak akan ditemukan kekerasan atau bahkan perang agar Islam dapat diterima di Indonesia. Keselarasan Islam yang masuk secara damai juga memberikan pengaruh besar terhadap paradigma yang ada di pondok pesantren.

Untuk menghindari adanya pemahaman skeptis terhadap pesantren, maka lembaga-lembaga juga harus ikut berpartisipasi dan berperan aktif terutama pemerintah. Kontribusi pesantren harus digerakkan

secara meluas dalam mengatasi permasalahan yang menimbulkan pemikiran radikal. Perlu diketahui bahwasanya pemikiran radikal dapat tumbuh di sektor mana saja terutama pada sektor-sektor besar seperti sektor sosial, ekonomi, dan politik. Ajaran jihad menjadi salah satu topik terpenting yang harus diluruskan, karena ternyata pemahaman jihad dalam dunia pesantren jauh berbeda dengan perspektif yang dianut oleh gerakan radikal secara umum. Dengan demikian, pesantren tidak hanya bukan hanya dikontrol melalui kurikulum pesantren yang sebenarnya kurang relevan untuk dilakukan mengingat jumlah dan budaya *takzim* yang begitu kuat.

Persoalan radikalisme di pesantren tentu berkaitan erat dengan adanya konsep konspirasi yang dibangun baik melalui teman, lingkungan, dan khususnya media *online*. Saat pandemi COVID-19 respon masyarakat pesantren percaya bahwa pandemi ini disebabkan oleh teori konspirasi. Hal ini membuktikan bahwa kontrol anak usia muda lebih mudah dipengaruhi oleh suatu berita yang belum tentu benar. 45,3% responden menyatakan virus korona adalah senjata biologis yang dibuat Cina/Amerika untuk menguasai dunia. Selanjutnya 48,6% responden menyatakan Cina/Amerika sebenarnya sudah memiliki vaksin sebelum pandemi. 63% responden menunjukkan sepakat bahwa Yahudi membuat virus untuk meruntuhkan muslim.

“Pada awal berita ini, saya sempat kepikiran tentang konspirasi karena terbawa oleh isu-isu karena kasus ini menyebar secara cepat dan muncul di salah satu negara yang memang sudah banyak cerita konspirasinya, gitu. Kita semua tau China merupakan negara yang banyak kontroversinya. Dengan menyebarnya virus yang sangat cepat hampir ke seluruh negara, saya berpendapat bahwa virus ini adalah program bisnis.”⁶³

Beberapa pesantren ternyata cukup rentan dalam persepsi konspirasi. Hal ini terlihat dengan cukup tingginya angka yang diperoleh selama penelitian, tentu peristiwa ini berkaitan dengan adanya situasi pandemi di mana elit global terlalu menampakkan bentuk ketiakhadiran bagi masyarakat.

63 FGD Guru, PP BS, 22 September 2021.

BAB VI

KERENTANAN PESANTREN TERHADAP RELASI SOSIAL & KEPERCAYAAN PEMERINTAH SELAMA PANDEMI COVID-19

Farha Kamalia

RESPON PESANTREN TERHADAP MEDIA DAN INFORMASI COVID-19

Globalisasi telah mempercepat penyebaran arus informasi. Selama pandemi COVID-19, masyarakat di seluruh dunia dipaksa untuk memaksimalkan berkegiatan secara *virtual*, yang berarti juga lebih banyak waktu digunakan untuk dihabiskan di dunia maya. Informasi juga lebih mudah didapatkan secara daring. Akan tetapi, informasi yang didapatkan dari media daring tidak serta merta selalu sesuai dengan fakta. Berbagai informasi dan opini dengan mudah disebar dan didapatkan karena siapapun dapat mengutarakan pendapatnya sehingga fenomena disrupsi informasi tidak dapat dihindari.

Kenyataan ini tidak terkecuali pada masyarakat pesantren. Masyarakat pesantren yang awalnya sangat hati-hati dan membatasi penggunaan gawai dan internet, selama pandemi COVID-19 harus beradaptasi dengan kondisi. Hampir seluruh pesantren yang diteliti dalam penelitian ini, memulangkan santrinya selama pandemi COVID-19. Pembelajaran diadakan baik secara daring, luring maupun *hybrid*.

Penyebaran informasi yang masif tidak selalu memberikan dampak positif. Adakalanya, informasi yang tersebar merupakan hoaks yang dapat membahayakan siapapun yang mempercayainya, khususnya informasi hoaks terkait COVID-19. Dalam menerima informasi mengenai COVID-19, masyarakat pesantren ikut menyoroti bagaimana penyebaran informasi COVID-19 yang seringkali menyesatkan.

“Kemudian masalah hoaks-hoaks, juga ragu. Mungkin karena ada juga berita-berita hoaks yang sengaja ditunggangi untuk dukungan politik. Jadi [penyebaran berita hoaks] ditunggangi oleh politik, [sehingga] kurangnya kepercayaan pada pemerintah.”⁶⁴

Masyarakat pesantren menginginkan adanya upaya untuk melawan penyebaran misinformasi dan disinformasi.

“Paling, mungkin, tentang sosialisasi ke masyarakat tentang apa itu COVID, jadi lebih ke info-info tentang COVID itu seperti apa, untuk melawan penyebaran informasi-informasi yang hoaks itu loh, Mbak. Jadi, sehingga masyarakat itu bisa tahu yang sebenarnya seperti apa. Jadi lebih ke arah situnya. Jadi masyarakat kita itu menurut saya, gampang terprovokasi, gampang tersulut, tentang berita-berita hoaks. “Vaksin itu nanti bikin kejang loh, kemudian dua bulan kemudian meninggal ini.” Informasi-informasi yang seperti itu ada loh, Mbak. Paling pemerintah akan lebih baik jika mem-back up informasi-informasi yang seperti itu. Mem-back up nya seperti apa, itu pemerintah, lah, yang tahu. Saya nggak paham yang model begitu. jadi masyarakat kita masih butuh informasi yang akurat, terpercaya, dan itu pemerintah butuh penyebaran informasi itu secara masif supaya yang tersebar di masyarakat bukan berita hoaks.”⁶⁵

Simpang siur informasi menyebabkan perbedaan pengetahuan, pendapat, dan keyakinan pada suatu isu. Studi lima belas pesantren di provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat ini menunjukkan bahwa pesantren rentan terhadap ketidakpercayaan pada institusi politik dan isu kepercayaan pada pemerintah terkait dalam menangani pandemi COVID-19. Kerentanan terhadap ketidakpercayaan pada pemerintah merupakan kondisi rendahnya keyakinan publik dan isu-isu pada pemerintah dan institusi politik akibat pelayanan pemerintahan selama terjadinya pandemi COVID-19 (Heintzman and Marson, 2003).

64 FGD Santri, PP A, 4 Oktober 2021.

65 FGD Guru, PP N, 17 September 2021.

Berdasarkan media informasi yang digunakan, sosial media dan *website* secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap persepsi isu-isu kepercayaan pada pemerintah, baik mengenai kesetujuan sistem khilafah dan ketidakkompetenan pemerintah dalam menghadapi pandemi. Mayoritas pengakses informasi dari sosial media dan *website* menganggap keparahan pandemi COVID-19 di Indonesia disebabkan ketidakkompetenan pemerintah dan sistem. Sementara pengakses informasi dari komunikasi tradisional hanya setengah jumlah responden yang menganggap demikian. Pengakses sosial media dan *website*, dengan *platform* Pinterest, Telegram, dan TikTok sebagai media informasi terkait COVID-19 secara signifikan lebih rentan terhadap ketidakpercayaan pemerintah dibanding dengan pengakses media lainnya. Di sisi lain, responden yang mengandalkan informasi terkait COVID-19 dari pesantren secara konsisten menunjukkan persepsi yang positif terhadap isu-isu tersebut.

Analisis korelasi menunjukkan adanya temuan korelasi dan pengaruh variabel satu dengan lainnya yang dapat berkontribusi pada kerentanan pesantren. Media sosial dan *website* atau dalam studi ini disebut *social networking* menjadi sumber utama informasi COVID-19 responden. *Social networking* inilah yang secara tidak langsung berkontribusi pada tingkat kepercayaan pemerintah dan isunya serta skeptisisme pada pemerintah.

Meskipun gempuran informasi dari berbagai media tidak dapat dielakkan, pesantren mempunyai mekanisme meminimalisir kerentanan tersebut. Kondisi pesantren yang “terisolasi” dan adanya peraturan pembatasan ataupun pelarangan penggunaan gawai di pesantren menjadi nilai positif pesantren untuk dapat membendung banjir informasi di dunia maya sehingga dapat mengurangi paparan informasi negatif di masa pandemi. Selain itu, pimpinan pesantren dan guru seringkali juga turut serta meluruskan informasi hoaks beredar di lingkungan pesantren.

KEPERCAYAAN DAN REAKSI PESANTREN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19

Berdasarkan survei yang dilakukan dalam studi ini di lima belas pesantren yang ada di provinsi Daerah Keistimewaan Indonesia (DKI)

Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, kepercayaan masyarakat pesantren terhadap institusi politik selama pandemi COVID-19 secara umum sangat rendah. Masyarakat pesantren memiliki kepercayaan terendah pada partai politik untuk mengatasi pandemi COVID-19. Sedangkan pemerintah daerah dan pemerintah Pusat sedikit lebih dipercaya dalam permasalahan pandemi namun tidak terlalu tinggi.

Lebih lanjut, studi ini menggali isu-isu krusial terkait kepercayaan pada pemerintah terkait pandemi COVID-19. Rendahnya kepercayaan pemerintah sejalan dengan rendahnya kepercayaan mereka terhadap isu-isu pemerintah yang berkaitan dengan COVID-19. Lebih dari setengah total responden menganggap penyebab keparahan pandemi COVID-19 disebabkan pemimpin yang tidak kompeten. Bahkan seperempat responden mendukung penggantian sistem demokrasi ke sistem khilafah akibat ketidakkompetenan pemerintah dan sistemnya.

Untuk memahami tingginya fenomena penerimaan isu tersebut secara mendalam, studi ini membandingkannya berdasarkan karakteristik sosio-demografi responden. Santri secara signifikan lebih dominan setuju dengan isu-isu sensitif terkait kepercayaan pemerintah dibandingkan guru. Pada isu khilafah, lebih dari seperempat santri yang disurvei setuju penggantian sistem demokrasi dengan sistem khilafah bila tidak dapat mengatasi krisis pandemi. Isu-isu ini secara signifikan semakin banyak disetujui oleh responden dari pesantren dengan jenis pesantren modern.

Masyarakat pesantren yang mengadakan kegiatan belajar mengajar secara daring juga cenderung lebih setuju dengan kedua isu tersebut dibanding mereka yang melakukannya secara *hybrid* dan luring. Jenis sekolah Madrasah Aliyah (MA) juga secara signifikan lebih sepatutnya dengan isu tersebut dibanding dua jenis sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Budaya, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pesantren menghadapi kerentanan ketidakpercayaan pada pemerintah. Kerentanan secara umum dalam *Cambridge Dictionary* didefinisikan sebagai kualitas menjadi rentan atau mudah disakiti, dipengaruhi, atau diserang. Definisi, konsep, dan metode pengukuran kerentanan berbeda di tiap disiplin ilmu sehingga penjelasannya disesuaikan dengan latar belakang minat

studinya (Alwang et al., 2001; Hufschmidt, 2011; Paul, 2014). Meskipun di setiap studi mempunyai konsep yang berbeda, kerentanan memiliki gagasan konsep umum yang berkaitan dengan risiko. Paul (2014) mendefinisikan kerentanan sebagai faktor risiko atau sistem yang terpapar bahaya yang tidak mudah menahan gangguan eksternal. Secara singkat, kerentanan merupakan kualitas menjadi rentan atau mudah terpapar dan dipengaruhi yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang rendah tersebut terkonfirmasi dengan temuan pada saat FGD dan wawancara, di mana seringkali informan mengeluhkan ketidaksiapan pemerintah dalam menangani pandemi.

“Kita memang sudah kecolongan dari awal. Penanganan di pandemi ini kurang serius di awal dan tidak konsisten terhadap kebijakan, berubah istilah tapi maknanya sama saja itu dari segi kebijakan yang dibuat. Tahu kan pernyataan pejabat kita di awal. Menyepelkan pandemi, dan penanggung jawab bukan orang yang ahlinya di bidang kesehatan melainkan dari Menko Perekonomian Investasi. Jadi harusnya yang jadi leading sector itu Menteri Kesehatan. Itu karena ini jadi bencana nasional juga ada dari BNPB. Itu yang seharusnya jadi titik fokus. Dan pemerintah harusnya memberikan wewenang yang penuh pada daerah untuk menangani pandemi ini kan. Kebanyakan pemda ini terhambat oleh pemerintah pusat itu sendiri, yang jadi hambatannya bukan pandeminya tapi kebijakannya yang jadi hambatan.”⁶⁶

Meskipun tingkat kepercayaan masyarakat pesantren terhadap pemerintah namun masyarakat pesantren tidak serta merta merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 secara negatif. Adanya peraturan pembelajaran daring direspon secara beragam oleh pesantren. Sebagian besar pesantren mengikuti aturan pemerintah untuk mengadakan pembelajaran secara daring, di mana pesantren berarti memulangkan santrinya secara bertahap dan penuh kehati-hatian. Sebagian pesantren juga memberikan

66 FGD Guru, PP RI, 22 September 2021.

keringanan kepada santri yang rumahnya sangat jauh dan terkendala karantina wilayah, transportasi dan biaya untuk pulang dengan membiarkan santri tersebut untuk tetap tinggal di pesantren. Sebagian kecil pesantren, meskipun tidak bermaksud untuk menentang kebijakan pemerintah namun tidak memulangkan santrinya. Pesantren terpaksa tidak memulangkan santri karena adanya keterbatasan kemampuan menjalankan pembelajaran secara daring.

“Kalau saya melihat dari tindakan pemerintah terutama tentang pembelajaran daring, mungkin pembelajaran daring kalau diterapkan di kota-kota besar yang fasilitasnya mencukupi dan siswanya memiliki akses yang mudah, misalkan memiliki ponsel kemudian jaringannya bagus, itu bisa jadi kebijakan yang betul-betul bagus untuk menghadapi COVID-19. Tapi kalau untuk di daerah-daerah seperti di sini, itu kan bukan hanya terkendala karena jaringan, tapi juga terkendala di akses siswa tidak punya ponsel, kalau pun punya ponsel juga ponsel jadul, kemudian pakai kartu yang sinyalnya jarang, sehingga kendalanya itu berlipat-lipat, bukan hanya fasilitas tapi juga ketersediaan jaringan, kemampuan membeli kuota, dan sebagainya. Sedangkan dari guru sendiri pun keadaannya tidak jauh berbeda dengan muridnya. ...Nah, kendala seperti itu mungkin diperhatikan lagi oleh pemerintah, bagaimana sebaiknya, apakah dengan cara tertentu, bisa win-win solution-lah yang bisa menguntungkan semua pihak.”⁶⁷

Masyarakat pesantren tidak hanya merespon kebijakan terkait pendidikan namun juga kebijakan-kebijakan lain seperti program vaksinasi. Semua pesantren yang terlibat dalam penelitian ini menunjukkan apresiasi dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah program vaksinasi. Beberapa pesantren yang diteliti juga bekerja sama dengan pemerintah maupun dengan lembaga amal untuk mengadakan vaksinasi masal bagi masyarakat pesantren dan masyarakat umum. Akan tetapi, masih terdapat beberapa orang tua yang tidak ingin anaknya divaksin sehingga pesantren memberikan edukasi terhadap wali santri.

67 FGD Guru, PP N, 17 September 2021.

“Sebenarnya salah satu ikhtiar pemerintah untuk mengadakan kembali tatap muka di sekolah itu cukup bagus dan harus kita dukung yaitu vaksinasi masal. Cuma, di lapangan atau masyarakat banyak yang tidak mau vaksin karena khawatir ada dampak buruk. Alhamdulillah dari vaksin ini kita cukup percaya diri cukup yakin kalau ini ikhtiar yg baik. Kemudian pemerintah juga sudah ikhtiar maksimal menerapkan PPKM, membatasi kerumuman di mal, di pasar, di jalanan itu cukup baik dan kebijakan pemerintah ini cukup kita dukung dan kita doakan semoga ini ikhtiar yang baik untuk negara kita.”⁶⁸

Meskipun mengapresiasi kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah namun masyarakat pesantren menilai implementasinya masih memerlukan perbaikan.

“Sebenarnya programnya sudah sesuai, sudah bagus. Namun pelaksanaannya. Aturan di mana-mana telah sempurna namun dalam pelaksanaannya sebagai manusia kita melihat program vaksinasi dan program bansos belum efektif. Buktinya di desa-desa itu.”⁶⁹

Selain rentan terhadap ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam penanggulangan COVID-19, masyarakat pesantren juga rentan bersikap skeptis terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan masyarakat pesantren masih memiliki sikap dan perasaan cemas dan ragu-ragu terhadap kebijakan dan informasi yang dikeluarkan otoritas dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Sebagian masyarakat pesantren percaya adanya penyesatan publik terkait data di lapangan. Informan menceritakan pengalamannya terkait manipulasi data.

“Karena saya juga aktif di desa dan melihat keadaan desa yang tidak tepat sasaran dan data-data yang dimanipulasi semua.”⁷⁰

68 Wawancara Kepala Sekolah, PP RN, 21 Agustus 2021.

69 FGD Guru, PP BS, 22 September 2021.

70 FGD Guru, PP BS, 22 September 2021.

Meskipun masyarakat pesantren skeptis terhadap data mengenai COVID-19 yang disajikan pemerintah namun mayoritas pesantren masih mengandalkan informasi dari saintis atau ahlinya. Informan yang percaya terhadap ahli terkait COVID-19 mencari informasi kepada ahlinya.

“Kalau kita tidak tahu sesuatu maka bertanyalah pada ahlinya gitu, kan. Maka tentunya ketika ada pandemi ini maka kita kembalikan pada ahlinya. Nah dalam hal ini ahlinya kan ada dua. Ada ulama dan ada ahli kesehatan. Kita juga punya teman-teman di UGM. Peneliti-peneliti di UGM itu alhamdulillah teman-teman saya dulu ketika di Yogya. Juga lihat di berita, pandangan-pandangan ahli kesehatan ya kita mengikuti itu bahwa COVID memang nyata dan ada beberapa efek terjadi karena itu. Dan kita lihat pada ulama juga menguatkan beberapa fatwa terkait COVID. Dan ulama tidak asal muasal ketika mengeluarkan fatwa.”⁷¹

Terkait dengan skeptisisme tersebut, status, jenis kelamin, jenis pembelajaran, jenis sekolah, sumber informasi, dan sosial media memiliki signifikansi pengaruh terhadap kerentanan skeptisisme. Pada kelompok guru dan santri, santri secara signifikan skeptis pada pemerintah dan ahli terkait COVID-19. Pada jenis pembelajaran, para pembelajar daring paling skeptis dengan pemerintah dan saintis, sebaliknya, pembelajar *hybrid* paling tidak skeptis terhadap informasi dari pemerintah dan saintis. Selain jenis pembelajaran, jenis sekolah juga secara signifikan menunjukkan bahwa Aliyah konsisten paling skeptis dibanding SMA dan SMK.

KOHESI SOSIAL MASYARAKAT PESANTREN DI MASA PANDEMI

Kohesi sosial dipercaya sebagai salah satu elemen penting dalam menghadapi suatu krisis, dalam hal ini krisis pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini menunjukkan kohesi sosial masyarakat pesantren selama pandemi COVID-19 secara umum tidak begitu lemah di tiga aspek area inti.

⁷¹ Wawancara satgas, PP A, 13 September 2021.

Sub-indeks relasi sosial paling kuat di antara dua sub-indeks lainnya. Meskipun penilaian terhadap kepercayaan pada masyarakat dan keberagaman sangat tinggi, namun penilaian prioritas bersama mereka rendah, yang berarti mereka memiliki cara pandang yang lebih beragam terkait pandemi COVID-19. Hal ini dimungkinkan akibat informasi yang diterima dan bagaimana mereka meresponnya.

Secara umum, kohesi sosial pesantren selama pandemi menunjukkan kecenderungan positif terutama dalam kehidupan dan relasi sosial untuk saling membantu dan menghormati peraturan yang ada. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi individu masyarakat pesantren maupun ekonomi institusi pesantren dan sekolah tidak menyurutkan untuk saling peduli tanpa memandang perbedaan latar belakang.

“Terus kalau menurut saya, sudah banyak platform untuk bantu orang lain yah seperti kitabisa.com, dan lain-lain. Itu kan tidak memandang dia terlepas dari agamanya apa, dia backgroundnya syi’ah atau sunni atau, dllnya. Jadi mungkin kalau kita mau menolongkan bisa melewati platform itu dan platform itu juga tidak melihat memandang siapapun orangnya. Jadi kita bisa donasi semampu kita dan terus itu kita percaya kalau dia bisa menyalurkannya ke yang memang membutuhkan gitu tanpa melihat backgroundnya apa.”⁷²

Akan tetapi, kohesi sosial di pesantren menghadapi tantangan kerentanan ketika dikaitkan dengan isu pemerintah maupun sistem politik. Kerentanan tersebut dapat melemahkan kohesi sosial secara eksternal. Informan memandang pemerintah Indonesia yang belum maksimal dalam menangani pandemi COVID-19 diperparah dengan sistem negaranya korup karena kejadian korupsi bantuan sosial di tengah krisis.

“Ya karena COVID makin naik gitu. Tiap denger gitu COVID naik terus dan juga pernah denger ada yang korupsi dana bansos (bantuan sosial) lah apalah gitu.”⁷³

72 FGD Guru, PP BA, 29 September 2021.

73 FGD Santri, PP E, 16 September 2021.

Dilihat dari aspek sosio-demografi, area pesantren lebih memengaruhi tingkat kohesi sosial dibanding asal daerah responden. Meskipun jenis sekolah tidak signifikan perbedaannya (kecuali pada area fokus pada kebaikan bersama), Sekolah Menengah Kejuruan memiliki tingkat kohesi sosial yang paling tinggi, sebaliknya Sekolah Menengah Atas tingkat kohesi sosialnya paling lemah kecuali pada aspek relasi sosial.

Sementara kohesi sosial pesantren secara garis besar cukup kuat namun dalam beberapa kasus kohesi sosial rendah karena secara negatif dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti bagaimana persepsi mereka diperlakukan secara adil, kepercayaan pemerintah dalam menangani pandemi, serta persepsi sistem yang korup. Pada akhirnya keseluruhan variabel tersebut memengaruhi tingkat kohesi sosial di pesantren meskipun tidak mengakibatkan tingkat kohesi sosial pesantren lemah pada keseluruhan aspek. Hal ini disebabkan variabel lain yang mempunyai skor tinggi, salah satunya terkait toleransi yang menunjukkan skor yang cukup tinggi.

Kohesi sosial masyarakat pesantren yang cukup solid ini diharapkan dapat membantu merekatkan mereka untuk bersama-sama mengatasi krisis pandemi COVID-19.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasannya, selama pandemi COVID-19 santri di 15 pesantren di daerah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat terdapat beberapa kerentanan serta ketahanan dalam merespon berkembangnya virus tersebut. Pertama dalam hal kesehatan untuk dapat meraih ketahanan yang kuat diperlukan 1) pengetahuan serta sikap yang mumpuni dalam hal penanggulangan COVID-19, 2) keyakinan bahwa COVID-19 merupakan hal yang berbahaya dan mematikan, 3) sikap untuk mendukung upaya pencegahan COVID-19, 4) keberadaan pihak eksternal pondok pesantren (Dinas Kesehatan, afiliasi organisasi serta organisasi lainnya) yang mendukung upaya penanggulangan COVID-19 di pesantren, 5) adanya dukungan dari pihak pimpinan pondok pesantren yang tertuang dalam kebijakan penanggulangan COVID-19 di masing-masing pondok pesantren, 6) beberapa pondok pesantren telah memiliki fasilitas/sumber daya yang mendukung dalam penanggulangan COVID-19 yakni keberadaan media komunikasi informasi edukasi yang cukup, fasilitas layanan kesehatan dasar dan bahan medis habis pakai serta sumber daya manusia kesehatan.

Sedangkan kerentanan yang dimiliki pesantren selama pandemi COVID-19 di antaranya; 1) masih adanya beberapa aspek pengetahuan yang rendah dalam hal pencegahan COVID-19 di mana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemberian edukasi maupun adanya mis/disinformasi yang beredar di kalangan masyarakat terkait COVID-19, 2) masih adanya sikap bahwa masyarakat pesantren tidak ingin diketahui jika terkena COVID-19, 3) keyakinan bahwa masyarakat pondok pesantren tidak memiliki risiko tertular COVID-19, 4) kekurangan sumber daya dalam hal penanganan COVID-19 (materi edukasi serta skrining dan perawatan pasien COVID-19 di pondok pesantren, 5)

ketidakseragaman dan ketidakcukupan kebijakan dalam hal merespon pandemi bagi pondok pesantren.

Kedua, dalam dunia pendidikan, ternyata pondok pesantren mengalami berbagai hambatan pendidikan ketika pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Hambatan-hambatan tersebut berupa hambatan teknologi yang terdiri dari jaringan internet yang buruk, kuota yang terbatas, masih ada santri yang tidak memiliki gawai pribadi dan ada santri yang menggunakan gawai atau laptopnya untuk main game dan menonton ketika pembelajaran daring sedang berlangsung. Dari sisi guru, ada keterbatasan dalam penggunaan media belajar *online*, bahkan ada guru yang belum pernah menggunakan *zoom*. Hambatan finansial terdiri dari kesulitan pesantren dalam menggaji guru dan adanya pemotongan gaji guru. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran SPP orang tua yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan. Lalu, hambatan pedagogi yang terdiri dari kurangnya efektivitas pembelajaran yang menyebabkan sulit memahami pelajaran. Menurut guru, minimnya efektivitas pembelajaran pun berdampak pada penurunan nilai santri. Santri dan guru menyatakan bahwa pembelajaran daring membuat santri kekurangan interaksi baik antar teman sebayanya maupun antara santri dan guru. Hambatan pedagogi yang terjadi dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan kondisi *learning loss* yakni kondisi hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik itu secara umum atau spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena faktor tertentu.

Dampak pandemi terhadap pondok pesantren dapat ditinjau dari dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain pesantren menjadi lebih perhatian terhadap isu kebersihan dan kesehatan dalam rangka menunjang pembelajaran *offline*, pesantren dapat memaksimalkan fasilitas pendidikan maupun mengadakan fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran *online*, pesantren menjadi lebih inovatif dalam metode pembelajaran maupun membuat materi belajar. Adapun dampak negatifnya antara lain mayoritas pesantren harus menyederhanakan kurikulum atau mengurangi jam belajar, sehingga materi yang diperoleh santri menjadi tidak maksimal. Selain itu, banyak program kepesantrenan yang tidak bisa terlaksana akibat pandemi.

Dampak-dampak ini berkaitan dengan ketahanan dan kerentanan pondok pesantren. Ketahanan dan kerentanan dapat ditinjau dari sisi SDM, fasilitas dan bantuan eksternal (pemerintah dan afiliasi organisasi pesantren). Dari segi SDM, ketahanan pesantren tampak dari adanya upaya untuk mendorong guru untuk lebih paham teknologi, meskipun dari segi kerentanannya masih ada guru yang gagap teknologi. Dari segi fasilitas, pesantren terdorong untuk memaksimalkan fasilitas untuk menunjang pembelajaran. Dari segi kerentanan fasilitas, tidak semua pesantren dapat menyediakan fasilitas karena keterbatasan kemampuan. Misalnya tidak ada dana karena pesantren tidak punya badan usaha sendiri yang bisa menjadi tambahan pemasukan selama pandemi. Dari segi ketahanan bantuan eksternal, mayoritas pesantren mendapat bantuan BOS dan kuota dari pemerintah. Bagi pesantren yang terafiliasi organisasi misalnya Muhammadiyah, pesantren mendapat bantuan juga dari organisasi berupa pelatihan dan bantuan finansial. Meski demikian, kerentanannya pun ada yaitu kuota dari pemerintah tidak dapat digunakan secara maksimal karena akses terbatas pada situs tertentu. Bantuan dari organisasi pun hanya diberikan di awal pandemi saja.

Ketiga, peran nyai dan pemimpin perempuan tentu memiliki peran strategis di pesantren yang diteliti, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit dan perannya cenderung masih berdasarkan pada *stereotype* gendernya. Pada saat pandemi, peran nyai semakin menguat terutama nyai yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang Kesehatan dan Pengasuh yang tidak memiliki satgas. Akses dan partisipasi terkait pengetahuan agama dan aktivitas ekstra kurikuler yang menunjang hidup sehat belum seimbang antara perempuan dan laki-laki. Perempuan belum mengambil manfaat yang sama dari sarana dan prasarana pembelajaran di pesantren.

Pada umumnya kiai masih sangat dominan dalam pengambilan keputusan sehingga perempuan berada pada posisi *peripheral*. Di tengah dominasi kiai, nyai masih mampu mengembangkan *power*nya melalui pengembangan *power legitimate*, *power in person*, dan *power in message* untuk mempengaruhi *power* kiai.

Keempat, dalam hal religiusitas pesantren selama pandemi COVID-19 menunjukkan eksistensinya dalam spiritualitas. Spektrum ini terbentang dari zona ketakutan yang menganggap pandemi ini telah

menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah sebagaimana lazimnya, ke zona baru yang berupaya menerima pandemi ini sebagai ujian dan perlu upaya adanya pencegahan. Polarisasi ini tentu dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman teologis. Pesantren yang memiliki corak khas tersendiri dalam pemikirannya dapat membentuk karakteristik seseorang dalam menghadapi pandemi semacam COVID-19. Dampak besar yang dialami dari pesantren selama COVID-19 tentu berbeda-beda, akan tetapi dari segi keagamaan secara umum melakukan ikhtiyar yang terbaik. Hal ini dibuktikan dengan mengadakan shalawat Burdah, qunut nazilah, istighosah serta shalat sunnah malam maupun dhuha. Hikmah adanya pandemi COVID-19 dirasakan pesantren dengan lebih terstrukturnya para santri dalam beribadah, biasanya mereka lebih susah dan suka melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, akan tetapi hadirnya COVID-19 menjadi pelajaran penting pandemi sebagai bagian dari kekuasaan Allah dan pandemi sudah berlangsung sejak zaman Nabi saw.

Selanjutnya ketahanan dapat diwujudkan sebagai upaya adaptasi yang positif dari individu atau kemampuan mengatur serta usaha agar mendapatkan kembali kesehatan mental diri kita walaupun dalam keadaan yang tertekan. Kegiatan pembelajaran di pondok pesantren merupakan salah satu kegiatan setiap hari, kegiatan santri dilakukan secara mandiri dan tidak setiap saat dikontrol oleh pengurus kepesantrenan. Para santri dituntut agar bisa mengatur hidupnya sesuai dengan aturan yang berlaku di pesantren, mulai dari cara mengatur kegiatan ibadah, kegiatan akademik, pola makan, waktu istirahat, keuangan, kesehatan, termasuk masalah psikologis dan masalah-malalah sosial yang dihadapi.

Ketahanan santri dalam pemikiran keagamaan sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu adanya bimbingan dari kiai atau pimpinan pesantren melalui ustaz/pengurus pesantren untuk dapat mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan di pesantren agar tidak menjadi virus kerentanan yang tidak diharapkan. Kerentanan santri bisa saja muncul akibat tidak tegasnya peraturan yang diterapkan dalam pesantren. Ketika COVID-19 secara umum santri dipulangkan dirumahnya masing-masing. Pola baru yang belum pernah terjadi adalah santri dengan leluasa memegang ponsel tanpa kontrol. Tidak seperti di pesantren, mereka tanpa media telekomunikasi. Media saat ini sangat berbahaya tanpa di-

iringi dengan wawasan dan pengecekan. Tanpa memfilter berita-berita yang bertebaran bisa saja santri terpapar isu-isu hoak dan pemikirannya dapat tergiring untuk melakukan hal-hal negatif baik di keluarga, teman, maupun masyarakat nantinya.

Kelima, kepercayaan terhadap pemerintah selama pandemi COVID-19 memiliki dampak yang beragam dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi pesantren. Pesantren yang dipercaya merupakan institusi pendidikan tertua di Indonesia pada perjalanannya mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, termasuk ketika menghadapi krisis pandemi COVID-19 pesantren mampu menunjukkan kemampuannya untuk tetap bertahan. Ketahanan pesantren melatarbelakangi berbagai faktor. Dengan sumber daya seadanya, pesantren mampu beradaptasi secara cepat dengan strategi dan kebijakannya yang dinamis, misalnya bagaimana mengatur arus keluar masuk keuangan dengan memperhatikan kondisi sasaran kebijakannya, yaitu guru dan santri. Nilai-nilai yang dipegang kuat pesantren, seperti kemandirian, keikhlasan, kebersamaan untuk saling membantu, dan tidak menitikberatkan pada materialisme memberikan kekuatan pesantren untuk tetap bertahan dan berinovasi tanpa menunggu bantuan dari pihak manapun termasuk pemerintah. Faktor kekuatan pesantren juga terletak pada afiliasi dan jaringan mereka yang bersinergi untuk memberikan bantuan kepada pesantren. Kondisi pesantren yang “terisolasi” dan adanya peraturan pembatasan ataupun pelarangan penggunaan gawai di pesantren juga menjadi nilai positif pesantren untuk dapat membendung banjir informasi di dunia maya sehingga dapat mengurangi stres maupun paparan informasi negatif di masa pandemi. Kohesi sosial masyarakat pesantren juga cukup solid, yang dapat merekatkan mereka untuk bersama-sama mengatasi krisis pandemi.

Meskipun demikian, ketahanan pesantren juga menghadapi tantangan ketika berhubungan dengan kepercayaan pada pemerintah dan institusi politik. Masyarakat pesantren secara umum memiliki krisis kepercayaan pada pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 sehingga mereka tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah. Pesantren dengan pembelajaran daring juga lebih beresiko terpapar mempunyai persepsi negatif terhadap pemerintah dan sistemnya. Hal ini linear

dengan temuan bahwa sumber informasi dari media sosial berpengaruh negatif terhadap persepsi tersebut.

Pemerintah perlu memperhatikan pesantren dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah membuka kemungkinan terpapar isu dan narasi ekstrem seperti konspirasi, antipemerintah maupun antidemokrasi. Terlebih lagi, mayoritas mereka yang rentan adalah santri yang merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa ini. Selain itu, kepercayaan pada pemerintah salah satu unsur dari kohesifnya masyarakat. Kepercayaan pada pemerintah yang buruk dapat mendegradasi kohesifitas masyarakat, khususnya dalam kasus ini sebagai perekat untuk bersama-sama dapat keluar dari krisis pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Al ahdab, S. 2021. A cross-sectional survey of knowledge, attitude and practice (KAP) towards COVID-19 pandemic among the Syrian residents. *BMC Public Health*, 21(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10353-3>
- Alwang, J., Siegel, P. B., Jørgensen, S. L., & Tech, V. 2001. *Series Vulnerability : A View From Different Disciplines*. Social Protection Discussion Paper . World Bank, 46.
- Andrade, C., Menon, V., Ameen, S., & Kumar Praharaj, S. (2020). Designing and Conducting Knowledge, Attitude, and Practice Surveys in Psychiatry: Practical Guidance. *Indian Journal of Psychological Medicine*, 42(5), 478–481. <https://doi.org/10.1177/0253717620946111>
- Azlan, A. A., Hamzah, M. R., Sern, T. J., Ayub, S. H., & Mohamad, E. (2020). Public knowledge, attitudes and practices towards COVID-19: A cross-sectional study in Malaysia. *PLoS ONE*, 15(5), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233668>
- Bano, R., Alshammari, E., Syeda, Fatima, B., Norah, & Al-Shammari, A. (2013). A comparative study of Knowledge, Attitude, Practice of nutrition and non-nutrition student towards a balanced diet in Hail University. *IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS)*, 2(3), 29–36.
- Bouckaert, G., & Van de Walle, S. 2003. Comparing measures of citizen trust and user satisfaction as indicators of “good governance”: Difficulties in linking trust and satisfaction indicators. *International Review of Administrative Sciences*, 69(3), 329–343. <https://doi.org/10.1177/00208523030693003>
- Bubalo, Anthony, and Greg Fealy. 2007. *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Mizan Pustaka.

- Bukhori, B. 2012. Toleransi terhadap Umat Kristiani Ditinjau dari Fundamentalisme Agama dan Kontrol Diri (Studi Pada Jamaah Majelis Taklim Di Kota Semarang). Laporan Penelitian. Semarang.
- Champion, Victoria L., and Celette Sugg Skinner. "The health belief model." *Health behavior and health education: Theory, research, and practice* 4 (2008): 45-65.
- Charrad, Mounira M. 2010. "Women's Agency across Cultures: Conceptualizing Strengths and Boundaries." *Women's Studies International Forum*. No. 33. h. 517–522.
- Clarke, C. P. 2020. From COVID to the Caliphate: A Look at Violent Extremism Heading into 2021 | United States Institute of Peace (pp. 1–3). pp. 1–3. New York City.
- Commision for Countering Extremism. (2020). COVID-19: How hateful extremists are exploiting the pandemic. In Commision for COuntering Extremism.
- Delhey, J., Boehnke, K., Dragolov, G., Ignácz, Z. S., Larsen, M., Lorenz, J., & Koch, M. 2018. Social Cohesion and Its Correlates: A Comparison of Western and Asian Societies. *Comparative Sociology*, 17(3–4), 426–455. <https://doi.org/10.1163/15691330-12341468>
- Douglas, K. M., Sutton, R. M., & Cichocka, A. (2017). The Psychology of Conspiracy Theories. *Current Directions in Psychological Science*, 26(6), 538–542. <https://doi.org/10.1177/0963721417718261>
- Dunn, Jennifer L., & Melissa Powell-Williams. October 2007. "Everybody Makes Choices": Victim Advocates and the Social Construction of Battered Women's Victimization and Agency." *Violence Against Women*. Volume: 13. Issue:10. Pages:977-1001. Published <http://www.sagepub.com/>
- Frey, B. B. 2018. *The Sage Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation*. Thousand Oaks, California: SAGE publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781506326139> NV - 4
- Geertz, Clifford. "Comments on Benjamin White's "demand for labor and population growth in colonial Java"." *Human Ecology* 1.3 (1973): 237-239.
- Gellert, P., & Tille, F. 2015. What do we know so far? The role of health knowledge within theories of health literacy. *The European Health Psychologist*, 17(6), 266–274.

- Graneheim, U. H., & Lundman, B. 2004. Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. *Nurse Education Today*, 24(2), 105–112. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001>
- Habibi, Achmad dkk. Desember, 2020. “Mapping Instructional Barriers during COVID-19 Outbreak: Islamic Education Context” *Religions* 2021, 12, 50. <https://www.mdpi.com/journal/religions>.
- Hafid, Wahyudin. “Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal).” *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1.1 (2020): 31-48.
- Hasan, Muhammad Tholhah. “Mozaik Islam Indonesia-Nusantara: Dialektika Keislaman dan Keindonesiaan”, makalah disampaikan dalam Annual Conference on Islamic Studies 2010, Banjarmasin 1-4 November 2010.
- Heintzman, Ralph and Brian Marson 2003. *People, Service and Trust: Is there a Public Sector Service Value Chain?*
- Hjerm, M., Eger, M. A., Bohman, A., & Fors Connolly, F. (2020). A New Approach to the Study of Tolerance: Conceptualizing and Measuring Acceptance, Respect, and Appreciation of Difference. *Social Indicators Research*, 147(3), 897–919. <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02176-y>
- Hufschmidt, G. 2011. A Comparative Analysis of Several Vulnerability Concepts. *Natural Hazards*, 58(2), 621–643. <https://doi.org/10.1007/s11069-011-9823-7>
- Igboin, B. O. 2019. Political Onanism and Scepticism in A Democratic Country. *Lumina*, 22(1), 105–112.
- Jenson, J. 1998. *Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research*. In Canadian Policy Research Networks Inc (No. F 03). Ottawa.
- John W Santrock. 2003. *Adolescence Perkembangan Remaja*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Koesoema, Doni. “Pendidikan karakter: Strategi mendidik anak di zaman global.” Jakarta: grasindo (2007): 212-221.
- LaMorte, W. 2019. *Behavioral Change Models*. Retrieved March 18, 2021, from <https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/sb/behavioralchangetheories/BehavioralChangeTheories3.html>

- Lee, M., Kang, B., & You, M. 2021. Knowledge , attitudes , and practices (KAP) toward COVID-19 : a cross-sectional study in South Korea. *BMC Public Health*, 21(295), 1–10.
- Levi, M. (2003). A Sstate of Trust. In V. B. and M. Levi (Ed.), *Trust and Governance* (Vol. 1, pp. 77–101). New York: Russell Sage Foundation.
- Lickona, T. 2002. Tolerance, Diversity, and Respect for Conscience: The Neglected Issue. *The Fourth and Fifth Rs*, 8(2).
- MacDonald, M. 1981. *Mystical Bedlam: madness, anxiety and healing in seventeenth-century England*. Cambridge University Press.
- Mahmood, S. (2001). Feminist theory, embodiment, and the docile agent: Some reflections on the Egyptian Islamic revival. *Cultural anthropology*, 16 (2), 202-236.
- Mahmood, Saba. 2011. “Feminist Theory Embodiment, and the Docile Agent: Some Reflections on the Egyptian Islamic Revival.” *Cultural Anthropology*, Vol 6/No 2, h. h202–236.
- McCracken, M. C. 2016. Social Cohesion and Macroeconomic Performance. In L. Osberg (Ed.), *The Economic Implications of Social Cohesion* (pp. 213–230). Toronto: University of Toronto Press. <https://doi.org/10.3138/9781442681149-008/MACHINEREADABLECITATION/RIS>
- Montaño, D. E., & Kasprzyk, D. 2008. Theory Of Reasoned Action, Theory Of Planned Behavior, and The Integrated Behavioral Model. In K. Glanz, B. Rimer, & K. Viswanath (Eds.), *Health behavior and health education : theory, research, and practice* (4th editio, pp. 67–96). Jossey-Bass.
- Mujamil. 1988. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, tt), hal. 7; Suyoto, “Pondok Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional”, dalam M. Dawan Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES.
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Narayana, G., Pradeepkumar, B., & Dasaratha, J. 2020. Knowledge , perception , and practices towards COVID-19 pandemic among general public of India : A cross-sectional online survey. *Current Medicine Research and Practic*, 10(January), 153–159.

- Paul, S. K. 2014. Vulnerability Concepts and its Application in Various Fields: A Review on Geographical Perspective. *Journal of Life and Earth Science*, 8(May 2013), 63–81. <https://doi.org/10.3329/jles.v8i0.20150>.
- Philips, Simon. 2008. “Refleksi Karakter Bangsa.” Jakarta: Bumi Aksara.
- Prakoso Permono. 2021. Potensi Ancaman Terorisme pada Masa Pandemi COVID-19 dan Pencegahannya di Indonesia: Studi Etnografi Digital dalam Jaringan Afiliasi Islamic State di Indonesia. Tesis Universitas Indonesia.
- Prooije, J.-W. Van. (2018). *The Psychology of Conspiracy Theories*. In *The Psychology of Conspiracy Theories* (1st ed.). Oxon: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315525419>
- Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case Study Method: A Step-by-Step Guide for Business Researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1609406919862424. <https://doi.org/10.1177/1609406919862424>
- Sarria-Guzmán, Y., Fusaro, C., Bernal, J. E., Mosso-González, C., González-Jiménez, F. E., & Serrano-Silva, N. 2021. Knowledge, Attitude and Practices (KAP) towards COVID-19 pandemic in America: A preliminary systematic review. *The Journal of Infection in Developing Countries*, 15(01), 9–21. <https://doi.org/10.3855/jidc.14388>.
- Sauri, Sofyan. “Nilai Kearifan Lokal Pesantren Dalam Upaya Pembinaan Karakter Santri.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 2.2 (2017): 21–50.
- Schwartz, Jeffrey, and Jay A. Labinger. 1976. “Hydrozirconation: A new transition metal reagent for organic synthesis.” *Angewandte Chemie International Edition in English* 15.6: 333–340.
- Shahnazi, H., Ahmadi-Livani, M., Pahlavanzadeh, B., Rajabi, A., Hamrah, M. S., & Charkazi, A. 2020. Assessing preventive health behaviors from COVID-19: a cross sectional study with health belief model in Golestan Province, Northern of Iran. *Infectious Diseases of Poverty*, 9(1), 157. <https://doi.org/10.1186/s40249-020-00776-2>
- Shmueli, L. 2021. Predicting intention to receive COVID-19 vaccine among the general population using the health belief model and the theory of planned behavior model. *BMC Public Health*, 21 (1), 804. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10816-7>

- Souto, T. S., Ramires, A., Leite, Â., Santos, V., & Santo, R. E. (2018). Health perception: Validation of a scale for the Portuguese population. *Trends in Psychology*, 26(4), 2185–2201. <https://doi.org/10.9788/TP2018.4-17En>
- Sri Rumini dan Siti Sundari. 2004. *Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Suci, Afred. 2014. 121 Indonesia's Scandals. Loveable Store.
- Sulaiman, Sulaiman. "Kepemimpinan Kiai dalam Transformasi Pendidikan Islam (Studi Atas Perilaku Kepemimpinan Kiai dalam Mengelola Pondok Pesantren di Situbondo)." *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 7.2 (2016): 331-360.
- Ul Haq, N., Hassali, M. A., Shafie, A. A., Saleem, F., Farooqui, M., & Aljadhey, H. (2012). A cross sectional assessment of knowledge, attitude and practice towards Hepatitis B among healthy population of Quetta, Pakistan. *BMC Public Health*, 12 (1), 1. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-692>
- United Nations Institute for Training and Research. 2020. *Impact of COVID-19 on Violent Extremism and Terrorism*. Geneva: United Nations Institute for Training and Research.
- Wahid, Abdurrahman. 1995. "Pesantren sebagai Kultur", dalam Dawam Raharjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES.
- Whitman, Cedric H. 2013. *Homer and the heroic tradition*. Harvard University Press.
- WHO. World Health Organization, & Partnership, S. T. 2008. A guide to developing knowledge , attitude and practice surveys. World Health Organisation, 1–68. <https://doi.org/Advocacy, communication and social mobilization for TB control: a guide to developing knowledge, attitude and practice surveys. WHO/HTM/STB/2008.46>

Internet

- Abdul Tholib. 2015. *Pendidikan di Pondok Pesantren Modern*. Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 1. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/234935989.pdf>, pada 23 Maret 2021.
- Agus Yulianto. 2017. *Pertumbuhan Pesantren di Indonesia Dinilai Menakutkan*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/30/po88lk396-pertumbu->

- [han-pesantren-di-indonesia-dinilai-menakjubkan](#), pada 22 Maret 2021.
- Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. 2020. *Survei Pesantren dan Ancaman COVID-19: Respon dan Kesiapan Masa New Normal*. Diakses pada 22 Maret 2021.
- Badan Pusat Statistik. *Potret Sensus Penduduk 2020*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MjEzOTk1Yzg4MTQyOGZlZjIwYTE4MjI2&xzmn=aHRocHM-6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2FoZW9uLzIwMjEvM-DEvMjEvMjEzOTk1Yzg4MTQyOGZlZjIwYTE4MjI2L3BvdHJld-C1zZW5zdXMtcGVuZHVkdWstMjAyMC1tZW51anUtc2FodS1kY-XRrLWt1cGVuZHVkdWthbi1pbmRvbMvZuWUeuaHRt-bA%3D%3D&twoadfnofeuf=MjAyMSowMyoxMSAwOTooM-TooNw%3D%3D>, pada 11 Maret 2021.
- Dadang Kurnia. 2020. *Pentingnya Peran Aktif Kiai Atasi COVID-19 di Pesantren*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qhx-rld380/pentingnya-peran-aktif-kiai-atasi-COVID19-di-pesantren>, pada 20 April 2021.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. *Merrespon Imbauan Kemenag, 90% Pesantren Miliki Gugus Tugas COVID-19*. Diakses dari <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detil&id=11753#.YEmUolUzbiU>, pada 11 Maret 2021.
- Hanan Putra. 2014. *Pondok Pesantren Pendidikan Islam Tertua di Indonesia (Bagian 1)*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/n2ek4e/pondok-pesantren-pendidikan-islam-tertua-di-indonesia-bagian1>, pada 22 Maret 2021.
- Inkana Putri. *4.328 Santri Kena Corona, Kemenag Diminta Serius Atasi Klaster Pesantren*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5295042/4328-santri-kena-corona-kemenag-diminta-serius-atasi-klaster-pesantren>, pada 11 Maret 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019*. Diakses dari <file:///C:/Users/samsung/Documents/PPIM/PANDEMIK/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202019.pdf>, pada 22 Maret 2021.

- Kementerian Agama RI. *Analisis dan Interpretasi Data pada Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Tahun Pelajaran 2011-2012*. 2012.
- Kementerian Agama RI. Surat Edaran Nomor 6 tahun 2020. <https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-menteri-agama-nomor-6-tahun-2020-tentang-panduan-ibadah-ramadan-dan-idul-fitri-1-syawal-1441h-di-tengah-pandemi-wabah-COVID-19>
- Kementerian Agama Wilayah Banten. 2017. *H.A Bazari Syam : Pondok Pesantren Merupakan Lembaga Pendidikan Tertua yang Mengantarkan Republik*. Diakses dari <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-4568-2.html>, pada 22 Maret 2021.
- Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. *Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035*. Diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1iEXyyAhI2ere7bBL1NM75JRxDbi8pI6l/view>, pada 22 Maret 2021.
- Lilah Burke. 2020. *More Infections from an Online Semester?*. Diakses dari <https://www.insidehighered.com/news/2020/07/01/cornell-researchers-say-person-semester-university-safer-online-one>, pada 22 Maret 2021.
- Mitzi A Brammer. *Student Resilience and COVID-19*. Diakses pada <https://ssrn.com/abstract=3637824> pada 9 Maret 2021.
- Muhammad Ashari. 2020. *Peraturan Turunan UU Pesantren Disiapkan, Menteri Agama Tegaskan Satu Hal*. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01340119/peraturan-turunan-uu-pesantren-disiapkan-menteri-agama-tegaskan-satu-hal>, pada 22 Maret 2021.
- Mulyadi Daud. *COVID-19: Laporan baru UNICEF mengungkap setidaknya sepertiga anak sekolah di seluruh dunia tidak dapat mengakses pembelajaran jarak jauh selama sekolah ditutup*. Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/COVID-19-laporan-baru-unicef-mengungkap-setidaknya-seperti-ga-anak-sekolah-di-seluruh>, pada 11 Maret 2021.
- PPIM UIN Jakarta. 2019. *Kompilasi Ringkasan Eksekutif Pesantren di Era Milenial: Studi Ketahanan dan Kerentanan terhadap Radikalisme*.

- PPIM UIN Jakarta. *Kompilasi Ringkasan Eksekutif Pesantren di Era Milenial: Studi Ketahanan dan Kerentanan terhadap Radikalisme*. 2019.
- Rachma Fitriati, dkk. 2020. *Pesantren Tangguh Bencana COVID -19*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Ratna Puspita. *Kemendikbud: 68 Juta Siswa Terdampak Pandemi COVID-19*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qejb7r428/kemendikbud-68-juta-siswa-terdampak-pandemi-COVID19>, pada 11 Maret 2021.
- Setyo Pujiastuti. *Dampak COVID-19 terhadap Pendidikan Anak*. Diakses dari <https://surveymeter.org/id/node/568>, pada 11 Maret 2021.
- Syifa Arrahmah. 2021. *Pentingnya Peran Bu Nyai di Lingkungan Pesantren*. Diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/127553/pentingnya-peran-ibu-nyai-di-lingkungan-pesantren>, pada 20 April 2021.
- Viva Budy Kusnandar. 2019. *Jumlah Penduduk Indonesia Diproyeksikan Mencapai 270 Juta pada 2020*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020>, pada 6 April 2021.

BIODATA PENULIS



Laifa Annisa Hendarmin adalah Kepala Medical Research Unit (MRU) Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan peneliti di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta sejak tahun 2014. Ia seorang dokter gigi lulusan Universitas Indonesia (2002) dan memperoleh gelar doktor dari Kyushu University, Fukuoka, Jepang (2008). Sejak awal pandemi, ia bekerja di laboratorium pengujian COVID-19 UIN Jakarta. Laifa juga banyak terlibat dalam studi interdisipliner dengan penekanan khusus pada interaksi institusi keagamaan dan masalah kesehatan. Dalam penelitian ini, Laifa merupakan koordinator yang dapat dihubungi melalui laifa@uinjkt.ac.id.



Ida Rosyidah adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan studi doktoralnya pada Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Indonesia. Penelitian yang pernah ia lakukan antara lain “Assessment on Contemporary Hijrah Movement & Empowerment of Moderate Religious Actors” (2020), “Homeschooling: Menakar Ketahanan dan Kerentanan” (2019), “The Greater Jakarta: Transition to Adulthood Study (Transisi Kehidupan Penduduk Usia Muda)” (2013), “Integrating Gender and Reproductive Health Issues in the Indonesian National School Curricula: Challenges for Moslem Societies” (2008-2010). Ida dapat ditemui melalui email idar.ihsan@gmail.com dan ida.rosyidah@uinjkt.ac.id.



M. Iqbal Nurmansyah adalah dosen program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Telah menyelesaikan studi sarjana Jurusan Kesehatan Masyarakat di UIN Syarif Hidayatullah dan magister di Dokuz Eylul University, Turki di bidang yang sama serta pernah mengikuti program pertukaran pelajar Erasmus+ di Maastricht University, Belanda. Kini aktif sebagai editor di berbagai jurnal nasional dan reviewer pada jurnal internasional seperti BMJ Open, Journal of Religion and Health, Tobacco Induced Diseases dan Journal of Health Research. Aktif berkecimpung di IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) dan Divisi Kesehatan MCCC (Muhammadiyah COVID-19 Command Center). Iqbal dapat dihubungi melalui e-mail: iqbalnurmansyah@uinjkt.ac.id



Farha Kamalia adalah alumni Pesantren Tebuireng 2006-2010, yang kembali mengabdikan diri di Pesantren Tebuireng di Tebuireng Media Group setelah menamatkan studi sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) dari Kementerian Agama RI. Ia melanjutkan studi masternya di program studi Religion, Politics and Society di University of Birmingham. Minatnya di isu *interfaith* dan kultural membawanya ke beberapa kegiatan, seperti pertukaran pelajar di Tohoku University dan menjadi *liaison officer* untuk program The Media Project kunjungan profesor dan mahasiswa the King's College, New York di Pesantren Tebuireng. Farha dapat dihubungi melalui e-mail: farha.kamalia@uinjkt.ac.id



Alvin Noor Sahab adalah alumni Pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak dan alumni S1 UIN Sunan Kalijaga (2016), saat ini masih aktif sebagai mahasiswa Magister Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah jurusan Ilmu Politik dengan beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Ia aktif sebagai pengurus MUI Pusat di lembaga Pentashih Buku dan

Konten Keislaman, Editor Jurnal Indo-Islamika Sps UIN Syarif Hidayatullah, Wakil Sekertaris Pengurus Pusat WASATHI (Wadah Silaturahmi Khatib Indonesia). Alvin dapat dihubungi melalui e-mail: alins-ab52@gmail.com

